



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 perlu penyesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

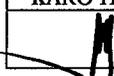
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai berikut :
 - a. penyesuaian terkait kebijakan keuangan daerah pada BAB III;
 - b. penyesuaian SKPD penanggungjawab program pada BAB IV;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- c. penyesuaian lampiran program kegiatan berdasarkan SKPD atas perubahan Perda OPD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal II

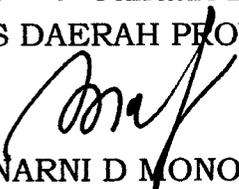
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2017
Plt. GUBERNUR GORONTALO,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



WINARNI D MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 08

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2016**

NOMOR : 08 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 JANUARI 2017

**TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2017**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**

Diperbanyak Oleh :
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1. LATAR BELAKANG	I.1
	1.2. LANDASAN HUKUM	I.1
	1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I.2
	1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I.3
	1.5. SISTIMATIKA	I.3
BAB II	EVALUASI CAPAIAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II.1
	2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
	2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II.1
	2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II.4
	2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II.14
	2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II.18
	2.1.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH	II.18
	2.1.4.2 INFRASTRUKTUR WILAYAH	II.29
	2.1.4.3 INVESTASI	II.37
	2.1.4.4 SUMBERDAYA MANUSIA	II.38
	2.1.5 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II.38
	2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN BERJALAN	II. 40
	2.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015	II.48
	2.4 MASALAH DAN TANTANGAN POKOK 2017	II.50
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.1
	3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III.1
	3.1.1 KONDISI EKONOMI MAKRO PROVINSI GORONTALO	III.1
	3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018	III.7
	3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.12
	3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III.13
	3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	III.21



BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV.1
	4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV.4
	4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.6
	4.2.1. ISU STRATEGIS	IV.6
	4.2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.9
	4.2.3 PROGRAM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI	IV.20
	4.2.4. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	IV.22
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017	V.1
	5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	V.1
BAB VI	PENUTUP	VI.1
	LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. GAMBAR 1.1 KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL, DAERAH DAN SKPD	I.2
2. GAMBAR 2.1 PETA PROVINSI GORONTALO	II.2
3. TABEL 2.1 LUAS WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	II.2
4. TABEL 2.2 JUMLAH PENDUDUK GORONTALO 2011 - 2015	II.3
5. TABEL 2.3 KONDISI DEMOGRAFI PROVINSI GORONTALO	II.4
6. TABEL 2.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI GORONTALO	II.5
7. TABEL 2.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN	II.6
8. TABEL 2.6 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	II.6
9. TABEL 2.7 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA DI SEKTOR FORMAL-INFORMAL	II.7
10. TABEL 2.8 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA	II.7
11. TABEL 2.9 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	II.8
12. TABEL 2.10 GARIS KEMISKINAN PROVINSI MENURUT DAERAH PENDIDIKAN	II.9
13. TABEL 2.11 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ADHB DAN KONSTAN	II.11
14. TABEL 2.12 PDRB SERI 2010 ADHB DAN HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2015	II.11
15. TABEL 2.13 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	II.12
16. TABEL 2.14 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2015	II.12
17. TABEL 2.15. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN 2007-2015	II.23
18. TABEL 2.16 HUBUNGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	II.23
19. TABEL 2.17 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	II.39
20. TABEL 2.18 EVALUASI CAPAIAN MISI SATU RPJMD TAHUN 2015	II.40
21. TABEL 2.19 EVALUASI CAPAIAN MISI DUA RPJMD TAHUN 2015	II.42
22. TABEL 2.20 EVALUASI CAPAIAN MISI KETIGA RPJMD TAHUN 2015	II.44
23. TABEL 2.21 EVALUASI CAPAIAN MISI KEEMPAT RPJMD TAHUN 2015	II.47
24. TABEL 2.22 EVALUASI CAPAIAN MISI KELIMA RPJMD TAHUN 2015	II.48



25. TABEL 2.23 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2015	II.49
26. TABEL 3.1. NILAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 DAN 2015 (TAHUN DASAR 2000)	III.1
27. TABEL 3.2 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010	III.2
28. TABEL 3.3. PDRB PERKAPITA TAHUN DASAR 2010 TAHUN 2014 - 2015	III.3
29. TABEL 3.4 LAJU INFLASI KOTA GORONTALO DESEMBER 2015, TAHUN KALENDER 2015	III.4
30. TABEL 3.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN	III.5
31. TABEL 3.6 GARIS KEMISKINAN PROVINSI GORONTALO	III.6
32. TABEL 3.7 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	III.7
33. TABEL 3.8 PERKIRAAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2016	III.7
34. TABEL 3.9 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO 2016 - 2017	III.11
35. TABEL 3.10 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN SEMESTER 1 TAHUN 2016	III.14
36. TABEL 3.11 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 TAHUN 2012 - 2016	III.14
37. TABEL 3.12 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN	III.17
38. TABEL 3.13 PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH PADA APBD T.A 2016 DAN KU-APBD T.A 2017	III.17
39. TABEL 3.14 RINGKASAN PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA APBD 2012 - 2016	III.23
40. TABEL 3.15 REALISASI ANGGARAN BELANJA SEMESTER I TAHUN 2016	III.24
41. TABEL 3.16 PERBANDINGAN KEBIJAKAN BELANJA PADA APBD TAHUN 2016 DAN KU-APBD TAHUN ANGGARAN 2017	III.24
42. TABEL 4.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 - 2017	IV.4
43. TABEL 4.2 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2017	IV.10
44. TABEL 4.3 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017	IV.16
45. TABEL 4.4 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.26
46. TABEL 5.1 URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	V.1
47. TABEL 5.2 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI GORONTALO 2017	
48. TABEL 5.3 STOK KEGIATAN INFRASTRUKTUR	



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disebabkan adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) yang dilakukan karena adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), serta Undang – Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah perubahan dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 sebagai penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 - 2017 adalah merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing - masing SKPD maupun seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana amanah undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan lebih dieksplicitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD ini memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan program - program Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Selanjutnya RKPD akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut :

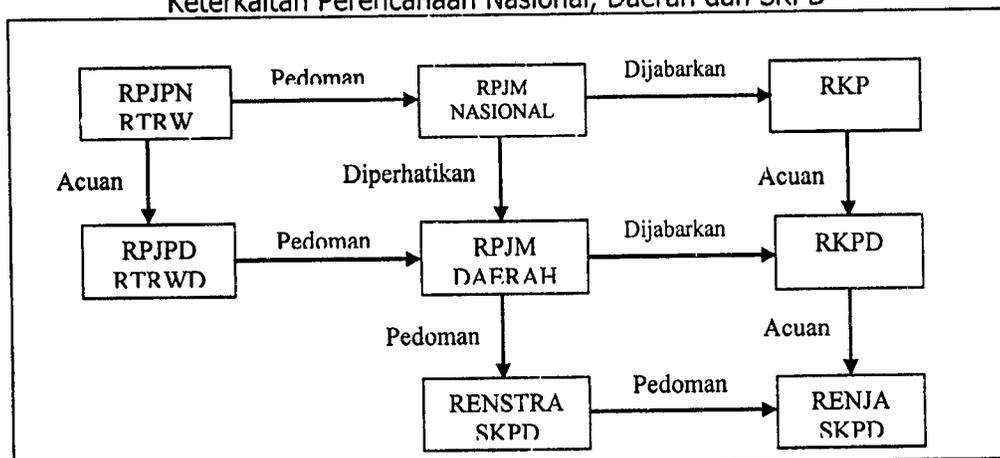
1. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Disamping itu, Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1.1
Keterkaitan Perencanaan Nasional, Daerah dan SKPD





1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah :

1. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2012 - 2017;
2. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan.

1.5 Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjelasan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017

2.3 Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014-2015.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2017

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2017 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2017, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2017, SKPD pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menurut sejarah, jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare - Pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama islam di Indonesia Timur yaitu dari ternate, Gorontalo dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat disekitar wilayah seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001, wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo sebagai provinsi yang ke 32 secara geografis terletak diantara antara $0^{\circ} 19' - 0^{\circ} 57'$ Lintang Utara dan $121^{\circ} 23' - 125^{\circ} 14'$ Bujur Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulut di sebelah Timur, Teluk Tomini di sebelah Selatan, dan Provinsi Sulteng di sebelah Barat.

Awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota.

Wilayah Gorontalo terletak di antara $0^{\circ}19' - 1^{\circ}15'$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23' - 123^{\circ}43'$ Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo



wilayah Provinsi Gorontalo dengan Luas 12.215,44 km², hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah administrasi pemerintahan, yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km².

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Sumber Data
01	Kabupaten Gorontalo	2.207,58	18,07	UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007
02	Kabupaten Boalemo	2.517,36	20,61	UU No. 50 Thn 1999 dan UU No. 6 Thn 2003
03	Kabupaten Pohuwato	4.244,31	34,75	UU No. 6 Thn 2003
04	Kabupaten Bonbol	1.889,04	15,46	UU No. 6 Thn 2003
05	Kabupaten Gorontalo Utara	1.676,15	13,72	UU No. 11 Thn 2007
06	Kota Gorontalo	66,25	0,54	UU No. 29 Thn 1959 dan UU No. 22 Thn 1999
Provinsi Gorontalo		12.215,44	100	UU No. 38 Thn 2000

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

Pernukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda.

Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung yang terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Provinsi Gorontalo hingga tahun 2015 berpenduduk sebanyak 1.183.285 jiwa. Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 35,03 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

Tabel. 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2011 - 2015

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
01	Kab. Gorontalo	363.763	368.053	365.781	368.149	370.441
02	Kab. Boalemo	132.076	136.269	141.547	145.580	149.832
03	Kab. Pohuwato	131.560	135.338	139.675	143.338	146.896
04	Kab. Bone Bolango	145.015	147.692	148.971	151.094	153.166
05	Kab. Gorontalo Utara	106.407	108.079	108.324	109.502	110.700
06	Kota Gorontalo	184.062	188.761	193.692	197.970	202.202
Provinsi Gorontalo		1.062.883	1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Provinsi Gorontalo yang seluas 12.215,44 km² memiliki kepadatan penduduk mencapai 92,77 jiwa/km². Wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo dengan kepadatan penduduk mencapai 3.052 jiwa/km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 34 jiwa/km² dengan luas wilayah 4.244,31 km²

Dan jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka Kota Gorontalo yang hanya punya wilayah seluas 65,96 Km² memiliki penduduk yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,09 %, sedangkan sex ratio sebesar 96,38 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96,38 penduduk laki-laki.

Tabel 2.3
Kondisi Demografi Provinsi Gorontalo 2011 - 2015

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.062.883	1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237
- Laki - Laki	Jiwa	534.027	543.086	550.004	558.862	567.695
- Perempuan	Jiwa	528.856	541.106	547.986	556.771	565.542
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,18	2,09	1,27	2,89	1,55
Kepadatan Penduduk	Org/Km ²	85	87	88	90	92
Sex Ratio	%	100,98	100,36	100,37	100,38	100,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dengan menggunakan metode terbaru. Metode tersebut mengadopsi teknik perhitungan IPM yang telah digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (Human Development Report) sejak tahun 2010.

Seperti diketahui, IPM merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup. Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup.

Beberapa perubahan tersebut menjadikan IPM dengan metode baru memiliki sejumlah keunggulan dibanding IPM yang dihitung dengan metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Dengan metode perhitungan baru tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo mengalami perubahan dimana pada tahun 2013 dengan metode lama IPM Gorontalo mencapai 71,77 point dan ketika dihitung menggunakan

metode baru berubah menjadi 64,70 point. Hasil perhitungan IPM se-Provinsi Gorontalo diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo
Tahun 2013 - 2014

Provinsi/ Kab/Kota	Angka Harapan Hidup		Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		2013	2014
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
Boalemo	67.12	67.29	11.60	11.89	6.12	6.15	7566	7598	61.71	62.18
Gorontalo	66.51	66.53	11.60	11.89	6.31	6.53	7973	8032	62.22	62.90
Pokuwato	62.09	62.33	11.48	11.68	6.53	6.54	8889	8925	61.38	61.74
Bone Bolango	67.45	67.50	12.26	12.33	7.67	7.70	8601	8669	65.82	66.03
Gorontalo Utara	64.76	64.79	11.52	11.68	6.53	6.59	7948	7999	61.60	61.92
Kota Gorontalo	71.62	71.68	13.34	13.76	10.24	10.28	10965	11019	74.43	74.97
PROVINSI GORONTALO	66.92	67.00	12.13	12.49	6.96	6.97	8719	8762	64.70	65.17

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Dari Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Gorontalo terlihat bahwa pada tahun 2014 IPM tertinggi adalah kota Gorontalo dengan nilai IPM sebesar 74.97, disusul kabupaten Bone Bolango dengan nilai IPM sebesar 66.03, kemudian Kabupaten Gorontalo dengan nilai IPM sebesar 62.90, kabupaten Boalemo dengan nilai IPM sebesar 62.18, kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai IPM sebesar 61.92, sedangkan kabupaten Pokuwato menjadi kabupaten yang paling rendah capaian IPM-nya yaitu sebesar 61.74 point.

Dari sisi capaian ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 mencapai 517.788 orang, berkurang 16.224 orang dari keadaan Februari Tahun 2015 sebesar 534.012 orang, atau bertambah 17.732 orang dari keadaan Agustus 2014 sebesar 500.056 orang. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari Agustus 2014 – Agustus 2015 ini disebabkan proporsi penduduk usia kerja yang masuk pasar kerja mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan TPAK ini belum cukup diimbangi penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2015 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 493.687 orang, berkurang 24.000 orang dari keadaan Februari 2015 sebesar 517.687 orang, namun bertambah 14.550 orang dari keadaan Agustus 2014 yang sebesar 479.137 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Agustus 2015 sebesar 24.101 orang, bertambah 7.776 orang dari keadaan Februari 2015 yang sebesar 16.325 orang, dan juga meningkat 1.036 orang dari keadaan Agustus 2014 sebesar 3.182 orang.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada Agustus 2015 mencapai 4,65 persen (dari angkatan kerja), mengalami kenaikan dibandingkan TPT Februari 2015 sebesar 3,06 persen atau TPT Agustus 2014 sebesar 4,18

persen. Sementara jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada Agustus 2015 sebesar 813.506 orang, meningkat sebesar 8.875 orang dari keadaan Februari 2015 sebesar 804.631, dan juga mengalami peningkatan sebesar 17.689 orang dari Agustus 2014 yang berjumlah 795.817. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan

Kegiatan Utama	2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Angkatan Kerja	520.643	500.056	534.012	517.788
Bekerja	507.939	479.137	517.687	493.687
Pengangguran	12.704	20.919	16.325	24.101
Bukan Angkatan Kerja	265.280	295.761	270.619	295.718
Sekolah	80.375	84.448	70.311	78.825
Mengurus Rmah Tangga	148.680	174.438	166.751	185.526
Lainnya	36.225	36.875	33.557	31.367
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas	785.923	795.817	804.631	813.506
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,44	4,18	3,06	4,65
Tingkat Kesempatan Kerja	97,56	95,82	96,94	95,35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,25	62,84	66,37	63,65

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Jika dilihat dari lapangan usaha, maka sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2015, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 34,65 persen atau 171.104 jiwa dari total penduduk yang bekerja, Sedangkan sektor industri sebesar 7,22 persen atau 35.684 jiwa, di sektor perdagangan 19,74 persen atau sebesar 97.500 jiwa, sektor jasa kemasyarakatan 20,83 persen 102.859 jiwa dan sektor lainnya 17,52 persen atau 86.540 jiwa, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel. 2.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2013-2015

Lapangan Pekerjaan Utama	2013		2014		Februari 2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	165,694	169,416	169,345	188,033	174,931	171,104
Industri	24,665	35,129	19,196	41,165	40,789	35,684
Perdagangan	82,781	78,174	104,106	84,147	108,775	97,500
Jasa Kemasyarakatan	108,842	90,725	104,443	85,080	115,787	102,859
Lainnya	91,771	85,486	110,849	80,712	77,405	86,540
Total	473,753	458,930	507,939	479,137	517,687	493,687

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal, Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2015 tercatat 183.333 orang atau 37,13 persen



pekerja di Gorontalo bekerja pada kegiatan formal dan 310.354 orang atau 62,87 persen bekerja pada kegiatan informal.

Tabel 2.7
**Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal-
Informal Provinsi Gorontalo, 2013-2015**

Sektor Formal- Informal	2013		2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Formal	179,465	162,944	190,698	160,122	176,523	183,333
Informal	294,288	295,986	317,241	319,015	341,164	310,354
Jumlah	473,753	458,930	507,939	479,137	517,687	493,687

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Dari orang yang bekerja pada Agustus 2015, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah buruh/karyawan/pegawai yaitu 164.178 orang atau 33,25 persen, diikuti berusaha sendiri sejumlah 124.472 orang atau 25,21 persen, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 70.515 orang atau 14,28 persen, sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 19.1556.316 orang atau 3,87 persen.

Tabel 2.8
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Status Pekerjaan Utama 2013-2015**

Status Pekerjaan Utama	2013		2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	110,921	120,921	133,799	114,649	121,900	124,472
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	83,337	74,299	73,686	79,911	88,285	70,515
Berusaha dibantu Buruh Tetap	21,362	15,509	15,205	16,316	19,333	19,155
Buruh/Karyawan/Pegawai	158,103	147,435	175,493	143,806	157,190	164,178
Pekerja Bebas di Pertanian	18,149	23,972	23,821	31,366	22,470	59,657
Pekerja Bebas di Non Pertanian	25,760	18,695	25,366	27,389	25,038	-
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	56,121	58,099	60,569	65,700	83,471	55,710
Jumlah	473,753	458,930	507,939	479,137	517,687	493,687

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Pada Agustus 2015, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.462 orang atau 57,01 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 158.284 orang atau 32,06 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 53.941 atau 10,92 persen.

Tabel 2.9
Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013-2015

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2013		2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<= SD	287,635	281,336	311,270	300,343	297,908	281,462
SMP - SMA	138,409	134,075	142,556	132,851	157,060	158,284
Universitas	47,709	43,519	54,113	45,943	62,719	53,941
Jumlah	473,753	458,930	507,939	479,137	517,687	493,687

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September tahun 2015 sebesar 18,16 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2015 sebesar 18,32 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,16 persen. Jumlah penduduk miskin September 2015 di Provinsi Gorontalo sebanyak **206.513** jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2015 sebanyak **206.843** jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2015-September 2015 berkurang sebanyak 330 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 1.642 jiwa, sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 1.972 jiwa.

Namun angka capaian pada September 2015 tersebut lebih tinggi dari capaian pada September tahun 2014 sebesar 17,41 persen. Kecenderungan peningkatan persentase penduduk miskin dalam kurun satu tahun terakhir akibat dampak kenaikan BBM serta kondisi perekonomian nasional yang belum terlalu baik. Akan tetapi, terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukup berhasilnya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pada periode Maret 2015-September 2015 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 18,32 persen menjadi 18,16 persen, yang juga diikuti dengan turunnya jumlah penduduk miskin. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjadi 3,076 pada September 2015, yang sebelumnya pada Maret 2015 sebesar 3,967. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,243 pada Maret 2015 menjadi 0,877 pada September 2015. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2015 sebesar Rp263.652 per kapita per bulan dan pada September 2015 menjadi Rp274.961 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp11.309 per kapita per bulan atau naik sebesar 4,29 persen.

Pada September 2015, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp201.515 dan perdesaan sebesar Rp216.687. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp73.066 dan perdesaan sebesar Rp58.476 maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih dibandingkan wilayah perdesaan.

Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2015 sebesar Rp274.581 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp275.163 per kapita per bulan.

Tabel 2.10
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah
Tahun 2015

Rincian	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2015	191.995	71.293	263.288
September 2015	201.515	73.066	274.581
Perubahan (%)	4,96	2,49	4,29
Perdesaan			
Maret 2015	207.980	55.866	263.846
September 2015	216.687	58.476	275.163
Perubahan (%)	4,19	4,67	4,29
Kota+Desa			
Maret 2015	202.433	61.220	263.652
September 2015	211.422	63.539	274.961
	4,44	3,79	4,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

b. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian Gorontalo tahun 2015 tumbuh sebesar 6,23 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,64 persen, diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,15 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,08 persen. Struktur perekonomian Gorontalo menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,09 persen); Konstruksi (12,35



persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,51 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2015, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,58 persen, diikuti Konstruksi sebesar 1,16 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,60 persen.

Pada triwulan IV-2015 Gorontalo tumbuh 7,67 persen bila dibandingkan triwulan IV-20134 (*y-on-y*). Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh lapangan usaha. Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,04 persen.

Struktur perekonomian Gorontalo pada triwulan IV-2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (34,21 persen); Konstruksi (13,46 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,90 persen). Sumber utama pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan IV-2015 adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,06 persen, diikuti Konstruksi sebesar 1,48 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor 1,12 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2015 mengalami kontraksi -3,38 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Hal ini didorong oleh efek musiman beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seperti padi yang memasuki musim tanam serta beberapa komoditi perkebunan lain yang telah melewati musim panen, menjadikan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kontraksi 14,05 persen. Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor juga mengalami kontraksi sebesar 0,13 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 6,23 persen terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali perubahan inventori. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,85 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,77 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 6,30 persen.

Struktur Ekonomi Gorontalo tahun 2015 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (61,26 persen), diikuti Impor (43,13 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (31,45 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2015, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,82 persen, diikuti PMTB sebesar 2,86 persen.



Tabel 2.11
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		Triw IV-2014	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw IV-2014	Triw III-2015	Triw IV-2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 206,10	2 865,75	2 516,73	1 743,22	2 151,40	1 849,04
B	Pertambangan dan Penggalian	87,66	98,18	98,17	70,85	75,77	77,08
C	Industri Pengolahan	276,17	304,46	313,31	215,72	220,93	225,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,77	2,40	2,85	4,47	3,79	3,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,27	3,54	3,82	2,51	2,65	2,77
F	Konstruksi	828,80	898,09	990,10	669,53	686,91	745,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	649,59	786,26	801,59	526,91	585,51	584,76
H	Transportasi dan Pergudangan	418,35	464,01	472,50	322,90	339,38	340,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140,97	166,45	170,71	113,24	123,90	125,74
J	Informasi dan Komunikasi	161,11	186,89	191,43	151,79	164,17	166,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	248,19	273,00	282,88	195,43	205,27	212,09
L	Real Estate	120,80	138,09	144,75	102,07	107,45	112,07
M,N	Jasa Perusahaan	6,35	7,18	7,38	5,14	5,39	5,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	586,28	636,94	640,05	505,99	516,77	526,77
P	Jasa Pendidikan	275,74	305,44	322,46	230,70	244,46	253,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233,36	257,21	271,79	191,50	201,89	209,42
R,S, T,U	Jasa lainnya	109,76	123,30	126,82	95,06	99,91	101,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6.355,27	7.517,18	7.357,32	5.147,04	5.735,56	5.541,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013-2015 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8 271,86	9 511,57	10 585,72	7 232,59	7 698,32	8 026,19
B	Pertambangan dan Penggalian	305,45	331,42	375,72	273,91	283,11	294,31
C	Industri Pengolahan	887,84	1 051,50	1 191,60	796,02	843,70	883,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,72	11,71	10,08	13,70	15,29	15,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,00	12,76	14,01	9,54	10,25	10,50
F	Konstruksi	2 608,11	2 971,32	3 525,79	2 290,42	2 470,12	2 711,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 271,11	2 624,85	2 998,18	1 991,51	2 151,87	2 275,61
H	Transportasi dan Pergudangan	1 327,83	1 535,45	1 790,68	1 112,50	1 207,88	1 324,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	484,25	540,44	639,59	417,94	446,92	482,90
J	Informasi dan Komunikasi	570,28	631,10	721,78	538,65	587,23	644,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	847,09	930,75	1 077,03	710,31	742,57	817,90
L	Real Estate	413,05	463,94	541,92	367,40	396,25	428,83
M,N	Jasa Perusahaan	21,59	24,30	28,07	19,05	20,19	21,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 035,69	2 214,14	2 358,85	1 783,31	1 906,73	1 978,49
P	Jasa Pendidikan	907,52	1 051,89	1 186,51	787,96	894,72	958,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	769,34	862,82	1 014,32	667,36	726,38	803,68
R,S, T,U	Jasa lainnya	386,55	423,69	478,63	355,40	374,18	392,59
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		22 129,28	25 193,65	28 538,48	19 367,57	20 775,70	22 070,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Pada triwulan IV-2015 Ekonomi Gorontalo tumbuh 7,67 persen bila dibandingkan triwulan IV-2014 (*y-on-y*). Komponen Ekspor merupakan komponen yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 52,50 persen, diikuti Impor sebesar 24,50 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2015 mengalami kontraksi 3,38 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Hal ini disebabkan oleh penurunan Perubahan Inventori sebesar 50,48 persen dan Ekspor sebesar 3,51 persen. Sementara Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan perlambatan dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2014-2015 (persen)

Lapangan Usaha		Triw III- 2015 Terhadap Triw II-2015	Triw IV-2015 Terhadap Triw III-2015	Triw IV-2015 Terhadap Triw IV-2014
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,02	- 14,05	6,07
B	Pertambangan dan Penggalian	3,59	1,73	8,80
C	Industri Pengolahan	- 0,58	1,88	4,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	- 4,77	3,89	- 11,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,47	4,24	10,01
F	Konstruksi	4,89	8,54	11,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,11	- 0,13	10,98
H	Transportasi dan Pergudangan	3,91	0,36	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	1,48	11,04
J	Informasi dan Komunikasi	3,15	1,46	9,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	3,33	8,53
L	Real Estate	1,99	4,29	9,80
M,N	Jasa Perusahaan	2,07	0,95	5,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,78	1,93	4,11
P	Jasa Pendidikan	5,03	3,71	9,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,03	3,73	9,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,11	1,18	6,34
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,70	- 3,38	7,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut
Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2013-2015 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,93	6,44	4,26	2,61	2,40	1,58
B	Pertambangan dan Penggalian	2,98	3,36	3,95	0,04	0,05	0,05
C	Industri Pengolahan	7,99	5,99	4,66	0,33	0,25	0,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,70	11,61	1,72	0,01	0,01	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,78	7,34	2,46	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	7,20	7,85	9,77	0,86	0,93	1,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,26	8,05	5,75	1,03	0,83	0,60
H	Transportasi dan Pergudangan	8,76	8,57	9,67	0,50	0,49	0,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,96	6,93	8,05	0,19	0,15	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	8,67	9,02	9,80	0,24	0,25	0,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,09	4,54	10,15	0,19	0,17	0,36
L	Real Estate	8,84	7,85	8,22	0,17	0,15	0,16
M,N	Jasa Perusahaan	7,48	5,96	5,57	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,83	6,92	3,76	0,55	0,64	0,35
P	Jasa Pendidikan	13,73	13,55	7,14	0,53	0,55	0,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,27	8,84	10,64	0,31	0,30	0,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,48	5,28	4,92	0,12	0,10	0,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,67	7,27	6,23	7,67	7,27	6,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016



c. Kesejahteraan Sosial

Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT, melakukan penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Penanganan dilakukan melalui pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Di tahun 2015 penanganan Masyarakat Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan terhadap 293 orang PMKS yang dibagi menjadi masing-masing kegiatan yaitu pemberian pelayanan kepada penyandang cacat, perlindungan sosial kepada anak terlantar, pemberian pelayanan bagi lansia, rehabilitasi sosial kepada penyandang tuna sosial. Pemberian layanan terhadap masyarakat miskin untuk 170 KK (KUBE) serta pemberian bantuan 5 unit sarana dan Prasarana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), disamping itu, dilakukan layanan dan pembinaan terhadap pilar - pilar kesejahteraan sosial masyarakat bagi 41 lembaga sosial masyarakat.

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi berupaya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, kesehatan gratis, perlindungan sosial bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya serta program-program lainnya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan sosial, beasiswa miskin dan lain sebagainya.

d. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisan program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Hingga tahun 2015, jumlah organisasi pemuda yang terdapat di Provinsi Gorontalo masih sebanyak 28 kelompok, sedangkan organisasi olahraga berjumlah 23 kelompok. Berbagai prestasi berhasil diraih oleh putra dan putri Gorontalo melalui berbagai event, yaitu pada tahun 2014 untuk Cabang Tenis Meja Putri meraih Medali Emas dan Cabang Pencak Silat meraih medali perak pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta, Untuk cabang Sepak Takraw Juara II Kejuaraan Nasional PPLP di Palu, Asean Beach Games di Thailand, Asian University Games di Palembang, dan Asean School Games di Vietnam, dan meraih medali perunggu pada kejuaraan Asean School Games di Philipina, Asean Games di Korea, dan Kejurnas Super Series di

Myanmar. Sementara untuk bidang olahraga Karate memperoleh 3 Medali Perak dan 5 Medali Perunggu pada Kejuaraan Nasional PPLP di Medan, Untuk Bidang Olahraga Renang memperoleh 2 Medali Perak dan 1 Medali Perunggu pada Kejuaraan Nasional PPLP di Musi Banyuasin dan untuk Tenis Lapangan meraih 1 Medali Perunggu.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan terus dipacu peningkatannya melalui program pendidikan formal maupun non formal diantaranya adalah: Program PAUD, program pendidikan dasar, program pendidikan menengah, program pendidikan untuk kesetaraan, masyarakat, kursus dan kelembagaan dan program pendidikan khusus serta pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin. Kemudian melalui program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mempercepat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.

Dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan tersebut capaian sektor pendidikan hingga tahun 2015 relatif cukup baik. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2015, untuk SD/MI sebesar 114,23 persen, SMP/MTs sebesar 102,27 persen, dan SMA/MA/SMK sebesar 89,92 persen. Jika dibandingkan tahun 2014, APK SD/MI sebesar 113,64, APK SMP/MTs sebesar 97,82 dan SMA/MA/SMK sebesar 88,19. Hal ini menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar mengalami peningkatan untuk SMP/MTs sebesar 4.45 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 1.73 persen.

Angka Partisipasi Murni pada tahun 2015 untuk SD/MI sebesar 101,66 persen, SMP/ MTs sebesar 77,10 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 71,34 persen. Pencapaian tersebut cukup baik dibandingkan dengan capaian Angka Partisipasi Murni tahun 2014 yaitu untuk SD/MI sebesar 100,97 persen, SMP/ MTs sebesar 73,06 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 65,87 persen. Pencapaian APM telah memenuhi target RPJMD (2012-2017) untuk tahun 2015.

Sementara itu, melalui program peningkatan pendidikan non formal diperoleh capaian peningkatan angka melek huruf pada tahun 2015 menjadi 99,71 persen,



capaian tersebut lebih baik dari tahun 2014 yang mencapai 99,68 persen. Dalam kebijakan penerapan pendidikan gratis atau lebih dikenal dengan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) di tahun 2015 telah mengakomodir siswa SMA/MA/SMK sederajat sebanyak 47.124 siswa yang memperoleh bantuan operasional sekolah, jumlah tersebut terdiri dari SMA Negeri dan Swasta sebanyak 26.893 siswa, untuk SMK Negeri dan Swasta sebanyak 18.287 siswa, untuk MA Negeri sebanyak 1.784 siswa dan untuk SMALB sebanyak 160 siswa. Disamping itu melalui program yang sama diberikan insentif untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, untuk tenaga pendidik PKLK, insentif tenaga kependidikan PKLK, insentif guru daerah terpencil dan insentif untuk guru kontrak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.793 orang guru se Provinsi Gorontalo telah mendapat insentif.

Untuk pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan, terus dilakukan melalui Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat, Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan, Melaksanakan sosialisasi/ pemasyarakatan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan, Peningkatan pelayanan perpustakaan dan arsip, Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, restorasi, Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak. Dari upaya - upaya tersebut pada tahun 2015 jumlah pengunjung mencapai 10.069 orang telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 5.000 orang, untuk jumlah buku ditahun 2015 sebanyak 4.300 Eksemplar dengan judul sebanyak 2.150 judul, sedangkan koleksi buku dan judul terbitan daerah sebanyak 20 judul. Pada tahun 2015 jumlah pustakawan berjumlah 2 orang dan tenaga teknis perpustakaan berjumlah 15 orang yang bertugas dalam pengolahan buku, pemegang klas bahan pustaka dan IT perpustakaan. Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam hal kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo telah menganggarkan kegiatan peningkatan SDM khususnya pelatihan dan diklat pustakawan/tenaga teknis perpustakaan kepada 50 orang tenaga pengelola kearsipan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap pemustaka (masyarakat) dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan. Melalui upaya tersebut status

kesehatan dan gizi masyarakat terus membaik, yang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja urusan kesehatan, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang mengalami peningkatan, yang semula 66,92 tahun pada Tahun 2013 menjadi 67 tahun pada Tahun 2014. Sementara untuk capaian indikator kinerja kesehatan juga telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik, bisa dilihat dari capaian Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2015 menurun menjadi sebesar 11,5 per 1.000 kelahiran hidup dibanding tahun 2014 sebesar 13,9 per 1.000 kelahiran hidup. Pencapaian ini telah melampaui capaian target RPJMD 2012-2017 di 2015 yaitu 15 per 1.000 kelahiran hidup, dan target MDGs yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015. Untuk capaian Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2015 sebesar 12,7 per 1.000 kelahiran hidup, menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 15,3 per 1.000 kelahiran hidup, capaian ini juga telah melampaui target RPJMD 2012-2017 untuk tahun 2015 sebesar 17,40 persen per 1.000 kelahiran hidup dan juga target MDGs sudah terlampaui yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015. Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) tahun 2015 yang mencapai 253,4 dan prevalensi gizi kurang yang mencapai 24,5 point ditahun 2015.

Pemanfaatan akses air bersih dan kelayakan sanitasi untuk meningkatkan hidup bersih dan layak nya kehidupan masyarakat juga terus dikembangkan, dimana untuk melihat tingkat kelayakan hidup penduduk yang sehat dapat dilihat dari rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air bersih hingga tahun 2015 sebesar 57 persen. Untuk penduduk yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 54,96 persen di tahun 2015, meningkat dibanding tahun 2014 sebelumnya sebesar 54,07 persen, namun capaian tersebut belum mencapai target tahun 2015 sebesar 65 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang dengan sumber air minum yang layak sebesar 66,47 persen di tahun 2015, capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 63,30 persen, hasil tersebut telah melampaui target RPJMD tahun 2015.

Untuk membantu peningkatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi melalui program Jamkesda telah membantu pelayanan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Untuk tahun 2015, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan jamkes kepada 235.058 jiwa. Jumlah ini berkurang dibanding tahun 2014, yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada 253.058 jiwa warga miskin.

Untuk ketersediaan tenaga medis per 1000 penduduk Tahun 2015 rasionya untuk dokter spesialis baru mencapai 0,08 dari yang ditargetkan sebesar 0,06, dokter gigi 0,02 dari target sebesar 0,03 dokter umum 0,16 dari target yang ingin dicapai sebesar 0,28, perawat sebesar 1,06 dari target sebesar 1,40, bidan 0,49 dari yang

ditargetkan sebesar 0,83, apoteker sebanyak 0,02 dari target sebesar 0,07. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa Gorontalo masih sangat kekurangan Tenaga kesehatan.

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2015 terdiri dari RSUD sebanyak 9, RS Swasta 4, Puskesmas 93, Puskesmas pembantu 242, Puskesmas keliling 86, Posyandu sebanyak 1304, Desa Siaga aktif sebanyak 525. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi Gorontalo terus dipacu sejak beroperasi tahun 2014, maka tahun 2015 mulai dibangun sarana prasarana penunjang pelayanannya dan menjadi salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo.

c. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo dari tahun 2013 dan 2014 sebesar 98.73 menunjukkan trend perbaikan/peningkatan yang cukup signifikan, namun nilai IKLH tahun 2015 menurun IKLH = 72.09 di bawah dari target yang telah ditetapkan IKLH = 84. Hal ini disebabkan terdapat penambahan jumlah parameter dan perubahan formula perhitungan nilai IKLH oleh kementerian, disamping itu tekanan lingkungan pada tahun ini juga relative meningkat setiap tahunnya. Pencapaian nilai IKLH tersebut akan terus ditingkatkan dengan tingkat capaian sampai akhir RPJMD (2017) sebesar 90.

Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup di tahun 2015 dilakukan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melalui penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH serta salah satu program pengembangan riset daerah melalui kegiatan penelitian Evaluasi Status Capaian & Implementasi CTI di Provinsi Gorontalo, Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan hasil tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Gorontalo (SLHD) tahun 2015, Laporan Environment Quality Index (EQI) dan tersusunnya laporan SPM bidang LH tahun 2015, kondisi kualitas udara ambiet di Kab/Kota masih baik, gambaran Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone: Cemar Ringan – sedang, sungai, Biyonga: cemar ringan-sedang, sungai Paguyaman: cemar ringan-sedang, sungai Buladu: cemar sedang-berat, sungai Taluduyunu: cemar ringan-sedang, sungai Andagile Atinggola: cemar ringan-sedang, sungai Randangan pohuwato: cemar ringan-sedang. Disamping itu dilakukan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir, pembinaan kegiatan atau usaha untuk peningkatan penilaian kinerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan pada kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan.

Selain itu, juga telah dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan data dan informasi lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten dan kota dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Tahun 2014 mulai diupayakan revitalisasi danau limboto, untuk tahap awal



dilakukan pengerukan danau limboto, pembersihan enceng gondok, dan pembangunan tanggul pencegah banjir yang kemudian dilanjutkan di tahun 2015 untuk pekerjaan pengerukan dan pembangunan tanggul pembatas.

Isu - isu yang menjadi perhatian dalam bidang lingkungan hidup di provinsi Gorontalo untuk kedepan adalah kerusakan Danau Limboto, penurunan kualitas air Danau Limboto, pencemaran air sungai, kerusakan mangrove dan terumbu karang, tingkat ketaataan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan, KUMKM dan pariwisata merupakan sektor yang strategis untuk membangun dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.

a. Sektor Pertanian

Prioritas Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan luas panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usahatani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2015 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo antara lain bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan TNI. juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usahatani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip *zero waste* melalui *reduce, re-use dan re-cycle*.

Dari prioritas pengembangan tersebut, pencapaian kinerja sektor pertanian di tahun 2015 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara (ASEM) sebesar 331.220 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sebesar 16.517 ton atau 4,98 persen dibandingkan angka tetap tahun 2014 sebesar 314.703 ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian produksi padi untuk tahun 2015 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 318.614 ton. Peningkatan produksi

utamanya juga disebabkan adanya bantuan benih Padi Sawah seluas 49.050 ha yang terdiri dari : APBD I seluas 17.000 ha (realisasi tanam supround I dan II), GP2TT 8.500 ha realisasi tanam subround II) , optimasi lahan seluas 10.900 ha yang sudah terealisasi tanam pada subround II 2015 , sedangkan bantuan benih untuk APBD-P 1.200 ha dan APBNP 9.250 ha. Bantuan 200 ha dari program 1000 Desa Mandiri Benih belum ada produksi karena adanya musim kemarau selama 6 bulan sehingga terjadi pergeseran tanam ke bulan November-Desember 2015 yang realisasi produksinya masuk di tahun 2016. Peningkatan produksi ini diikuti oleh peningkatan produktivitas padi dari yang hanya sebesar 50,20 Ku/Ha di tahun 2014 meningkat menjadi 55,51 Ku/Ha pada tahun 2015.

Produksi jagung tahun 2015 (ASEM) hanya mencapai 643.512 ton pipilan kering agak menurun dibanding produksi tahun 2014 sebesar 719.780 ton pipilan kering. Penurunan produksi tersebut disebabkan terjadinya pergeseran tanam pada bulan September-Desember 2013 yang dipanen pada Januari-Maret 2014 menyebabkan tingginya luas panen pada ATAP 2014; Terjadinya musim kemarau dari bulan Juli – Oktober 2015 menyebabkan pertanaman pada bulan agustus mengalami kekeringan dan Puso seluas 2,337 ha; Bantuan benih dari anggaran APBN-P 2015 program Perluasan Areal Tanam (PAT) sebanyak 70.000 ha nanti ditanam pada bulan September-Desember 2014 dengan kondisi sebagian besar wilayah hujan tidak merata, dan hasilnya bisa dicapai nanti pada bulan Januari-Maret 2016.

Produksi kedelai tahun 2015 juga mengalami penurunan, yaitu hanya sebesar 3.203 ton, lebih tinggi produksi di tahun 2014 sebesar 4.273 ton biji kering, menurun sebesar 1.061 ha atau 24.83 persen. Penurunan produksi terjadi utamanya karena Terjadi pergeseran luas panen dimana LTA bulan desember 2013 sebesar 1058 ha lebih tinggi dibandingkan dengan LTA desember 2014 hanya 449 ha sehingga menyebabkan turunnya produksi pada ARAM I maupun ARAM II 2015 Bantuan Kedelei pada tahun 2014 hanya 60 ha, sedangkan tahun 2013 bantuan kedelei 2500 ha, untuk bantuan kedelei pada tahun 2015 sebesar 1090 Ha, namun pada bulan agustus mengalami gagal panen (puso) seluas 122 ha.

Kinerja produksi Cabe tahun 2015 sebesar 9.546 Ton lebih rendah dari capaian tahun 2014 yang mencapai 11.526 ton. Capaian ini juga belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 13.211 ton. Hal ini disebabkan bantuan benih cabe 350 ha, sebagian besar ditanam nanti pada bulan Oktober-November-Desember dan musim kering yang panjang sehingga menyebabkan banyak tanaman cabe yang mati kekeringan.

Ketahanan Pangan, Komoditi tanaman pangan dan hortikultura memiliki peranan pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan dan pokok masyarakat serta pakan dan industri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan



pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Berdasarkan hasil analisis pola produksi padi angka Sementara (ASEM) 2015 diperoleh angka produksi padi di provinsi Gorontalo mencapai 331.220 ton gabah kering giling (GKG) meningkat sebesar 16.517 ton atau 4,98 persen dibandingkan angka tetap tahun 2014.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usahatani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian.

Berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih dan Pupuk, Perbaikan Jaringan Irigasi, Pengembangan Optimasi Lahan, Bantuan Alsintan Pra Panen dan Pasca Panen, Bantuan Bangunan dan Revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan TNI. Khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi telah terbukti mengungkit pencapaian produksi, namun kedepan dengan berbagai tantangan yang lebih beragam maka diperlukan penyempurnaan dan atau peningkatan kualitas baik pada tatanan perencanaan dan operasionalisasi di lapangan.

Implikasi dari pencapaian kinerja sektor pertanian tersebut terlihat berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Gorontalo pada Desember 2015, NTP naik 0,33 persen dibandingkan NTP November 2015, yaitu dari 104,44 menjadi 104,77. Kenaikan NTP pada Desember 2015 disebabkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan indeks harga hasil produksi pertanian.

Pada periode Januari 2015 – Desember 2015, NTP Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada bulan Desember 2015 sebesar 104,77 dan terendah terjadi pada bulan April 2015 sebesar 100,28. Kenaikan NTP Desember 2015, disebabkan oleh naiknya subsektor tanaman pangan sebesar 0,55 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,87 persen, dan subsektor peternakan sebesar 0,12 persen, sedangkan 2 (dua) subsektor lainnya mengalami penurunan yaitu subsektor tanaman hortikultura sebesar 0,36 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,13 persen. Rata-rata NTP selama kurun waktu tahun 2015 sebesar 102,43.

Pengembangan pertanian juga dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi dan pemberdayaan penyuluh, di tahun 2015 masih dilakukan peningkatan mutu



penyelenggaraan penyuluh dengan penyediaan demplot Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebanyak 22 unit dan sebanyak 77 Unit lembaga penyuluh difasilitasi dan dikembangkan, serta peningkatan kelas kemampuan kelompok sebanyak 146 kelompok. Kemudian dilakukan juga peningkatan kapasitas penyuluh PPK melalui diklat fungsional sebanyak 30 orang dan diklat teknis bagi 30 penyuluh serta diklat teknis pelaku utama dan pelaku usaha sebanyak 30 orang.

Dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) yang terbagi atas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Skor PPH Ketersediaan menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan di daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2015 mencapai 74,2 capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 62,81, namun angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yakni sebesar 88,5. Demikian halnya dengan skor PPH Konsumsi merupakan parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam. Hasil analisa yang ditunjukkan bahwa pola konsumsi pangan tahun 2015 mencapai 78,7 capaian ini lebih baik dibanding tahun 2014 sebesar 69,4. Skor PPH Konsumsi Gorontalo juga masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2015 sebesar 80,9 dan belum mencapai Standar Pelayanan Minimal 90 serta skor PPH ideal 100 point.

Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi. Dari upaya tersebut populasi ternak sapi mengalami peningkatan dari 190.832 ekor tahun 2014 menjadi 197.124 ekor ditahun 2015. artinya populasi sapi hanya mencapai 3,04% dari yang ditargetkan sebesar 4% pertahun yakni pada tahun 2015 target populasi sebanyak 215.100 ekor. Hal ini disebabkan karena pemotongan di tahun 2015 sebanyak 12.500 ekor dan pengeluaran ternak sebanyak keluar provinsi gorontalo 2.183 ekor pada tahun 2015.

Untuk populasi kambing pada tahun 2015 sebesar 84.868 ekor mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 83.127 ekor. Populasi ternak ayam buras di tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 1.850.163 ekor dibanding tahun 2014 yang populasinya sebesar 1.291.040 ekor.

Kinerja Sektor Peternakan lainnya ditunjukkan melalui produksi hasil peternakan. Untuk produksi daging sapi tahun 2015 sebesar 2.552.353 Kg mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2014 sebesar 3.011.474 Kg. Demikian halnya dengan produksi daging kambing juga mengalami penurunan dari 176.524



Kg tahun 2014 menjadi 68.708 Kg tahun 2015. Namun, untuk produksi daging ayam buras mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 1.397.921 Kg meningkat menjadi 2.037.214 Kilogram di tahun 2015. Penurunan produksi daging sapi maupun daging kambing disebabkan karena kenaikan harga daging yang cukup tinggi maupun dan harga-harga bahan pokok lainnya yang juga ikut naik.

Untuk menunjang peningkatan populasi ternak dan produksi daging tersebut dilakukan upaya Pemeriksaan Produk Hasil Pangan ASUH (PMSR-CM) di Laboratorium Kesmavet sebanyak 660 sampel, Pengendalian dan pengobatan penyakit hewan menular strategis (PMHS) tahun 2015 sebanyak 16.565 ekor dari yang ditargetkan 9.328 ekor. Pengembangan Kelompok Ternak Sapi sebanyak 4.126 kelompok, Pengembangan Kelompok Ternak Kambing sebanyak 29 kelompok serta Pengembangan Kelompok Ternak Ayam Buras sebanyak 402 kelompok ditahun 2015.

Peningkatan asupan protein hewani dari jumlah konsumsi daging ditahun 2015 juga meningkat menjadi 3,1 kg/kapita/thn, artinya hanya mengalami peningkatan tingkat konsumsi sebesar 0,19 % dari yang ditargetkan sebesar 2%/tahun. Hal ini disebabkan oleh tingkat konsumsi daging masyarakat di provinsi gorontalo masih rendah. Masyarakat lebih memilih ikan daripada daging.

Pengembangan bidang perkebunan juga terus di tingkatkan melalui Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Dari upaya tersebut kinerja perkebunan tahun 2015 untuk perluasan areal kelapa mencapai 68.129 Ha, melebihi target yang ditetapkan sebesar 67.156 dengan produksi kelapa dalam sebesar 22.093, untuk produksi kakao di tahun 2015 mencapai 2.948 ton sementara sebesar 604 ton, untuk produksi tebu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 32.521 ton menjadi 49.331 ton pada tahun 2015. Pencapaian sektor perkebunan ini di hasilkan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi perwilayahan di Provinsi Gorontalo yang meliputi kelapa, kakao, cengkeh dan tebu dan revitalisasi pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui pola sistem kebersamaan ekonomi. Dalam meningkatkan kinerjanya di sektor peternakan dan perkebunan serta membangun sinergi dengan pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat Dinas Peternakan dan Perkebunan menjadi leading sektor dalam pengembangan pertanian secara terpadu yang dilakukan dengan pembagian kluster pada wilayah-wilayah potensial.

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar yang dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan laut seram potensinya mencapai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun. Sedangkan untuk perikanan Budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun.



Berdasarkan hal tersebut sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pengembangannya hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang berada dan menetap diwilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan dan kelautan.

Dari program peningkatan produksi perikanan tangkap yang dilakukan, realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2014 yang hanya mencapai 103.017,80 Ton meningkat produksinya tahun 2015 hingga mencapai 105.715 Ton atau naik sebesar 2,55 persen, sedangkan untuk produksi perikanan Budidaya mengalami penurunan dari 57.392,30 Ton ditahun 2014 turun menjadi 30.156 ton di tahun 2015, jumlah tersebut terdiri dari produksi ikan budidaya dengan capaian 25.885 Ton, dan rumput laut dengan jumlah produksi 4.272 ton.

Tabel 2.15
Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo
Tahun 2007 – 2015

No.	Uraian	Produksi Hasil Perikanan (Ton)								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perikanan Tangkap	49.962	62.921	66.717	72.325	76.369	85.815	92.171,3	103.017,80	105.715
2.	Perikanan Budidaya	71.000	78.800	85.653	93.659	129.858	133.340	115.300,9	57.392,30	30.156
Jumlah (Ton)		120.962	141.721	152.370	165.984	206.227	219.155	207.472,2	160.410,10	135.871

Sumber : Dinas Perikanan kelautan provinsi Gorontalo, 2016

Sedangkan dilihat dari hubungan target dan realisasi pada tahun 2015, produksi perikanan tangkap mencapai 100,57 persen telah melebihi target tahun 2015 sebesar 105.118 ton. Untuk Produksi Perikanan Budidaya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan tahun 2015 sebesar 170.310 ton, realisasi produksi hanya mencapai 30.156 Ton atau persentase capaiannya hanya sebesar 17,71 persen. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang sulit diprediksi.

Tabel 2.16
Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo
Tahun 2007 - 2015

No.	Tahun	Perikanan Tangkap (Ton)			Perikanan Budidaya (Ton)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2007	53.035	49.962	94,21	75.565	71.000	93,96
2	2008	58.334	62.921	107,86	80.000	78.800	98,50
3	2009	64.166	66.717	103,98	86.295	85.653	99,26
4	2010	70.597	72.325	102,45	101.775	93.659	92,03
5	2011	77.648	76.369	98,35	151.845	129.858	85,52
6	2012	85.815	85.816	100,00	133.340	133.340	100,00
7	2013	90.964	92.171	101,33	144.007	115.301	80,07
8	2014	97.331	103.017,8	105,84	156.248	57.392,3	36,73
9	2015	105.118	105.715	100,57	170.310	30.156	17,71

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2016



Sementara itu produksi perikanan oleh kelompok nelayan dan pembudidaya pada tahun 2015 adalah sebesar 21.109 ton, hasil ini tidak mencapai target yang ingin dicapai sebesar 99.379 ton. Produksi perikanan ini adalah terdiri dari produksi perikanan laut dan produksi perikanan budidaya.

Dari capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tahun 2015 ini memberikan kontribusi pendapatan rata-rata bagi nelayan sebesar Rp. 2.500.000 per bulannya dan bagi pembudidaya rata-rata sebesar 2.470.000 per bulannya. Capaian rata-rata pendapatan pembudidaya pada tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp. 2.076.650 pada tahun 2015 atau sebesar 118,94 persen. Sedangkan untuk realisasi rata-rata pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 2.413.693 capaiannya sebesar 103,58 persen. Selain itu, tingkat capaian konsumsi ikan pada tahun 2015 mencapai 54,8 kg/kapita/thn, Capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 53 kg/kapita/thn di tahun 2015.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan dan peningkatan kehidupan dilakukan beberapa strategi yaitu, dengan melakukan Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan Sarana Produksi Perikanan Tangkap berupa Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat tangkapnya. Langkah ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 persen) armada tangkap di Provinsi Gorontalo masih berstatus dibawah > 30 GT (perahu tanpa motor dan motor tempel) dan kesemuanya dimiliki oleh nelayan kecil (nelayan tradisional). Dengan kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan mampu menghasilkan produksi yang optimal. Apalagi para nelayan juga masih tergantung pada kondisi musim, dan cuaca, yang artinya bisa dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal yang memadai dan modern, maka sulit bagi nelayan untuk bisa meningkatkan hasil produksinya, dan produktivitas.

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2015 tetap diarahkan untuk membangun kesiapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menghadapi tantangan, mengatasi permasalahan pembangunan perikanan budidaya dan mendayagunakan potensi sumberdaya lahan budidaya untuk mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi perikanan berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pembudidaya di pedesaan.

Intervensi anggaran diarahkan untuk melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan diimplementasikan kedalam tiga kegiatan yang mengacu pada pengembangan tiga kawasan perikanan budidaya yaitu (1). Pengembangan



kawasan budidaya air tawar ; (2). Pengembangan Kawasan budidaya air payau dan : (3). Pengembangan kawasan budidaya air payau.

Dari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan budidaya yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu (1). Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Laut/Payau dan Operasional UPTD Balai Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau (BPBLP) melalui Penyediaan Benih ikan, bibit rumput laut dan pakan ikan) bagi Pembudidaya kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR); (2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standart CBIB.

Sampai dengan tahun 2014 Provinsi Gorontalo telah ditargetkan oleh pusat sebanyak 100 kelompok pembudidaya yang disertifikasi. Target ini berhasil dilampaui dengan capaian 105 % atau 105 usaha budidaya yang telah disertifikasi.; (3). Melaksanakan program PUMP perikanan budidaya. Program ini bertujuan untuk Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya yaitu terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri.

Disamping kegiatan tersebut, pemerintah provinsi juga mendesain Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT) yang merupakan Prigram Inovasi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir. Program PDNT ini merupakan salah satu program yang sangat penting, sehingga pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 program ini sudah menyentuh 40 Desa nelayan dari 77 desa yang ditargetkan. Pada pelaksanaan program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo selain memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin katinting, perahu, alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Waserda (warung serba ada) bagi kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan. Kegiatan ini juga mengakomodir bahwa program perikanan dan kelautan juga diharapkan berbasis pada pemenuhan kebutuhan gender. Pada tahun 2015 realisasi cakupan bina kelompok mencapai 680 kelompok meningkat sebesar 120,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar 565 kelompok.

Selain Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), Pemerintah Provinsi Gorontalo pada program kelautan dan pesisir juga mengalokasikan anggaran pada kegiatan program usaha garam rakyat (PUGAR) yang berlokasi di kec, Wonggarasi Kab. Pohuwato.



b. Sektor Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan pada tahun 2015 dilakukan dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk mengurangi isu pemanasan global seluas dengan metode areal model usaha tani melalui penanaman tanaman hutan dengan tanaman produktif seluas 300 Ha, juga dilakukan bantuan bibit secara gratis kepada masyarakat umum dan kelompok tani sejumlah 55.000 bibit. Sedangkan untuk menjaga kelestarian kondisi hutan dilakukan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melakukan penataan 4 KPH di tahun 2013 serta melaksanakan operasi pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dalam rangka menurunkan tingkat pencurian kayu, illegal logging dan perambahan hutan sebanyak 20 kali.

Dalam rangka mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan lindung dengan Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi melakukan penanaman pohon maupun memberikan bantuan bibit kepada masyarakat dan kelompok tani berupa bibit tanaman kehutanan, bibit tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS), bibit tanaman produktif dan bibit tanaman serbaguna selain itu dilakukan perumusan rancangan dan peta detail lokasi Tanaman Hutan Rakyat (TAHURA) atau Kebun Raya.

Untuk hasil produksi hutan terdiri dari kayu log dengan nilai produksi pada tahun 2015 mencapai 57.750 M³ lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 60.764,61 M³, sedangkan untuk kayu gergajian produksinya di tahun 2015 mencapai 17.850 M³ lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 21.267,61 M³.

c. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan.

Dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetap dilakukan pengembangan koperasi dan UMKM yang pada tahun 2015 dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan strategis dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi baik kepada koperasi aktif maupun tidak aktif, juga terhadap kelompok masyarakat atau badan usaha yang hendak membentuk koperasi baru dan pembentukan koperasi. Dari upaya tersebut, maka tahun 2015 diperoleh capaian; koperasi yang berkualitas sebanyak 15 koperasi, yang tersebar di 6 kabupaten/kota, jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 1.131 koperasi menjadi sebanyak 1.183 di tahun 2015.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan fasilitasi permodalan kepada masyarakat baik melalui KUR maupun skim kredit lainnya, juga dilakukan pemberian modal dari pemerintah. Kemudian disediakan juga informasi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional, sehingga di tahun 2015 melalui upaya tersebut jumlah UMKM meningkat menjadi 96.124 UMKM dari target yang ditetapkan sebesar 67.413 UMKM, lebih baik dibanding tahun 2014 yang sejumlah 70.000 UMKM. Selain itu tahun 2015 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga

memberikan modal usaha bagi Wira Usaha Baru (WUB) yang terdiri dari WUB keluarga miskin, WUB mahasiswa dan WUB Potensial sebanyak 1.240 UMKM dari target yang ditetapkan sebanyak 750 UMKM.

d. Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk pengembangan perdagangan di tahun 2015 masih telah dilakukan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan ekspor, melakukan upaya efisiensi perdagangan dalam negeri dan melakukan upaya dalam meningkatkan standarisasi mutu barang. Sehingga dari upaya tersebut di tahun 2015 beberapa hasil pencapaiannya dapat ditunjukkan dari perkembangan ekspor menjadi 144.291 ton di tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 83.528,53 ton, namun untuk perdagangan antar pulau di tahun 2015 mengalami pelemahan menjadi sebesar 620.902 ton dari capaian tahun 2014 yang mencapai 810.617 ton. Selain itu untuk menjamin kualitas komoditi yang akan diperdagangkan dilakukan pengujian komoditi oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang mencapai 243 kali pengujian serta penerbitan sertifikat mutu sebanyak 12 sertifikat.

Dalam meningkatkan distribusi Barang/Jasa di tahun 2015 telah dilakukan revitalisasi pasar sebanyak 4 unit pasar tradisional. Disamping itu dari sisi pelayanan Pemerintah provinsi di tahun 2015 juga membantu penanganan kasus pengaduan konsumen, yang diindikasikan dengan pemberkasan dan penanganan kasus pengaduan konsumen terhadap seluruh kasus yang diadukan. Kemudian dilaksanakan tera dan tera ulang alat Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) sebanyak 12.887 UTTP. Dalam rangka perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan dilaksanakan Pasar Tertib Ukur, yang diindikasikan dengan tercapainya 3 Pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo, sehingga total pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo berjumlah 15 Pasar.

Untuk mengembangkan sektor perindustrian pada tahun 2015 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah diupayakan melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, fasilitasi wirausaha baru IKM, disamping itu pengembangan kompetensi inti One Village One Product (OVOP) dan kluster industri juga dilakukan dalam meningkatkan produktivitas produk IKM. Dari upaya yang dilakukan tersebut telah meningkatkan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi sebanyak 14.084 unit di tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah IKM di tahun 2014 yang hanya sebesar 13.688 unit dan jumlah sentra IKM sebanyak 297 di tahun 2015. Selain pencapaian tersebut di tahun 2014 juga dilakukan pembentukan Desa Industri Mandiri (DIM) sebanyak 1 (satu) kluster yang berpusat di Ayula Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dengan kegiatan Agro Industri Pupuk Pelengkap Cair (PPC).



e. Pariwisata dan Budaya

Dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di tahun 2015 dilakukan pengembangannya melalui upaya pemasaran dan promosi pariwisata dan melaksanakan Festival Bahari, Festival Budaya, Audisi gita bahasa, Festival Bedug. Upaya lainnya adalah melalui pengembangan seni dan budaya daerah dengan melaksanakan pemilihan "Nou dan Uti", pelaksanaan semarak Tumbilatohe, pelaksanaan semarak ketupat, karapan sapi dan pacuan kuda. Dalam meningkatkan fasilitas objek wisata di tahun 2015 dilakukan penataan obyek wisata Olele, Botutonuo, Monano dan Minanga. Dari upaya - upaya tersebut diperoleh capaian dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Gorontalo sebanyak 368.000 wisatawan di tahun 2015, capaian ini telah melebihi capaian ditahun 2014 sebesar 356.799, untuk rata - rata lama tinggal telah mencapai 4 (empat) hari. Sementara itu untuk pengembangan obyek wisata Pantai Botutonuo dan Olele, telah disusun masterplan pengembangan kawasan tersebut.

f. Pertambangan

Potensi pertambangan di provinsi Gorontalo cukup tinggi, baik itu komoditas logam maupun batuan dan non logam yang tersebar hampir di semua wilayah Gorontalo. Potensi komoditas logam terdiri dari emas yang tereka sebesar 218.133.132.151,07 ton yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi perak tereka sebesar 217.463.591.225,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi tembaga tereka sebesar 217.976.091224,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Kemudian untuk potensi pertambangan dengan komoditi batuan dan non logam terdiri atas batuan andesit sebesar 2.506.000.000 ton, granit sebesar 888.500.000 ton, Dasit sebesar 1.776.125.000 ton, Basal sebesar 1.000.000.000 ton, batu gamping sebesar 19.948.748.500 ton, felspar sebesar 2.500.000 ton, lempung 750.000.000 ton, pasir batu & sirtu sebesar 282.250.000 ton, marmer 18.869,96 ton dan toseki sebesar 51.247.568,62 ton. Dari potensi yang ada tersebut, maka di tahun 2015 dalam rangka peningkatan pengamanan dan perlindungan terhadap sumberdaya hutan, sumberdaya mineral dan energi, peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, mineral dan energi serta memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan dan areal pertambangan di Provinsi Gorontalo dilakukan survey pendahuluan potensi calon lokasi wilayah pertambangan rakyat, pengeboran 2 unit sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air serta Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina mencapai 34,16 di tahun 2015, capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2014 sebesar 21,52 persen.

2.1.4.2. Infrastruktur Wilayah

a. Infrastruktur Transportasi

Dalam bidang transportasi pembangunan dilakukan melalui pengelolaan Jalan Provinsi hingga tahun 2015 sepanjang 432,51 km dan jembatan di ruas jalan Provinsi sejumlah 51 buah dengan panjang 551,80 M. Pada tahun 2015 untuk menjaga kemantapan jalan dan jembatan telah dilakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi sepanjang 22,99. Panjang jalan provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 9,97 kilometer, sedangkan panjang jalan strategis provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 10,12 kilometer. Disamping itu pembangunan jembatan diruas jalan strategis Provinsi sebanyak 1 (satu) buah.

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan/dipelihara secara berkala dalam meningkatkan kondisi mantap di tahun 2015 mencapai 22,99 Km dan pemeliharaan rutin jalan Provinsi mencapai 194,07 Km.

Dari pengembangan tersebut, hingga tahun 2015 kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 177,97 Km, kondisi sedang 21,42 Km, kondisi rusak ringan 38,20 Km, kondisi rusak berat 84,98 Km, dan jalan yang belum tembus/terbuka masih sepanjang 109,95 Km, kondisi tersebut meningkat dibanding tahun 2014 dimana kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 190,45 Km, kondisi sedang 21,18 Km, kondisi rusak ringan 32,96 Km, kondisi rusak berat 77,97 Km.

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi melalui dinas Perhubungan semenjak tahun 2014 disediakan 2 terminal yang sudah memenuhi kriteria tipe B dan pada tahun 2015 dilakukan pembangunan fasilitas penunjang terminal tipe B pada 1 terminal. Kemudian melalui subsidi APBN dilakukan pelayanan angkutan darat perintis yang melayani 4 lintasan (Gorontalo-Bondawuna, Gorontalo-Bubaa, Gorontalo-Pangea, Terminal Isimu-Mulyonegoro-Satria), serta pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ yang hingga tahun 2015 sudah ada 4 (empat) ruas jalan provinsi, yaitu ruas jalan Kabila-Toto dan ruas jalan Gorontalo-Suwawa, ruas jalan Suwawa-Tulabolo, ruas jalan Raja Eyaro-Isimu .

Pengembangan transportasi laut terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan kepala kantor pelabuhan Gorontalo yang secara administratif menjalankan operasionalnya. Provinsi Gorontalo memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek yang di khususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-Toli Sulawesi Tengah. Sedangkan dipesisir selatan terdapat pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan



pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Kelima pelabuhan tersebut terus dilakukan upaya pengembangannya baik melalui APBN maupun APBD. Capaian peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo tahun 2014 telah mencapai rata - rata 3.526 ton/hari sudah melebihi target RPJMD sebesar 2.700 ton/hari dan di tahun 2015 meningkat menjadi 4.419 ton/hari sedangkan kapasitas layanan kapal di pelabuhan sudah mencapai 12.000 DWT.

Pengembangan transportasi udara di Provinsi Gorontalo terus diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Djalaluddin yang menjadi satu - satunya bandar udara di Gorontalo dengan status bandara Nasional kelas II C, kapasitas landasan dapat didarati Boeing 737, Run Way panjang 2.500 m x 45 m, Taxiway 2 buah ukuran 115 m x 23 m, Apron ukuran 231,5 m x 80 m untuk kapasitas parkir 2 (dua) buah pesawat. Untuk tahun 2014 juga telah dilaksanakan pembangunan tahap awal Terminal Baru Bandara Djalaludin seluas 4.896 m² dan telah selesai dibangun pada tahun 2015. Disamping itu untuk mewujudkan pembangunan Infrastruktur Kereta Api, maka tahun 2014 telah disusun 1 dokumen untuk Pra-FS/FS jalur Kereta Api.

b. Sumberdaya Air dan Irigasi

Pada tahun 2015 Indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : "*Terwujudnya Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan irigasi*". Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi, serta jaringan Lainnya.

Berdasarkan Hasil Survey dan perencanaan umum SDA serta memperhatikan Renstra Dinas PU Provinsi Gorontalo maka hingga tahun 2015 diprioritaskan pada 7 Daerah Irigasi yang bersumber dari APBD yang terdiri dari Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Bulia, Huludupitango, Tolinggula, Tabulo/Latula, Taluduyunu, Pilohayanga, dan Irigasi Bongo.

Pada tahun 2015 dilakukan rehabilitasi dan peningkatan luas areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 11.792 meter, dan juga dilakukan operasi dan pemeliharaan areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 17.131 Ha.

Untuk menjaga dampak erosi, longsor dan sedimentasi yang akan masuk ke areal pertanian, persawahan dan pemukiman dilakukan pembangunan tebing - tebing di badan sungai sepanjang 1.366 Meter. Juga dibangun tanggul pengaman pantai bagi pemukiman masyarakat pesisir sepanjang 150 Meter. Pembangunan Penahan tebing sungai tersebut dilakukan pada 24 lokasi masing-masing pada Sungai Taluduyun, Padengo, Bone, Mohiyolo, Luwohu, Timbuolo, Juria, Molotabu, Wapo, Panca Karsa, Boliyohuto, Bakti, Alo, Tilamuta, Pentadu, Keramat, Telaga Biru, Botutonuo, Bolihutuo (2 paket), Leboto, Bone-padebuolo, Dembe, Bongopini; Normalisasi Sungai pada 4 lokasiyaitu Sungai Menggelomo, Lonuo, Latula dan serdadu dan Galian endapan lanjutan pada cekdam Buliide; sedangkan Untuk



pengaman abrasi pantai diprioritaskan pada 3 kawasan (Pantai Selatan bagian Timur, Tengah dan Barat) yaitu Pengaman Abrasi Pantai Desa Taludaa, Pelita Jaya, Molamahu, Leato, Bilato dan Tutulo.

c. Pemukiman

Dalam urusan pemukiman Pemerintah Provinsi telah melakukan penanganan kawasan pemukiman melalui pembangunan jalan lingkungan di kawasan RSH, kawasan pemukiman kumuh nelayan, kawasan kumuh perkotaan yang telah mencapai lebih kurang 30.822 meter. Juga telah di bangun jalan pada kawasan agropolitan dan jalan pada Desa-Desa potensial sepanjang 19,64 km, diatas target yang ditetapkan sepanjang 17 Km, serta penyediaan air bersih dan sanitasi untuk pencapaian target MDGs. Untuk tahun 2014 telah dilakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak kurang lebih 800 unit Mahyani dan tahun 2015 sebanyak 711 unit dari target yang ditetapkan 1.000 unit yang tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Disamping itu untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi membangun infrastruktur dasar untuk 59 desa tertinggal. Dari upaya yang dilakukan tersebut, capaian indikator dalam mewujudkan desa maju dan mandiri dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 3 desa dan 3 kelurahan.

d. Persampahan dan Sanitasi

Pada tahun 2015 dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, sementara itu upaya pembangunan pengelolaan persampahan secara terpadu telah dimulai dari tahun 2011 yaitu, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) 3R sebanyak 4 unit. Disamping itu juga telah dibangun tempat pembuangan akhir (TPA) Talumelito yang diperuntukkan untuk melayani 2 (dua) wilayah yaitu kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan kapasitas tampung kurang lebih 355.670 m³. TPA tersebut telah mulai di fungsikan sejak bulan September 2011 dengan sistem sanitari landfill dan juga berfungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah (KIPS). Sampai saat ini di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan sistem *sanitari landfill* yang konstruksinya dibiayai oleh dana APBN, sedangkan pembebasan lahan dan fasilitas pelengkap lainnya dibiayai oleh APBD kabupaten.

Adapun kebutuhan untuk layanan daya tampung TPA 5 (lima) tahun kedepan adalah + 4.745.000 m³, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang ramah lingkungan + 4.089.849 m³. Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA tersebut maka dibutuhkan pembangunan baru di Kab. Bone Bolango serta pengembangan sarana prasarana TPA yang ada saat ini. Khusus TPA Talumelito diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.



Dalam peningkatan sanitasi dasar dari tahun 2011 telah dibangun septiktank komunal 1 lokasi, air limbah komunal 4 lokasi dan pembangunan MCK dari tahun 2012 hingga tahun 2015 mencapai 294 unit dan pembangunan TPST 3R Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 4 unit.

Pada tahun 2014 dilaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo Utara. Program PPSP dimaksudkan sebagai program pembangunan sanitasi menyeluruh yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, dimana pembangunan dan pengelolaan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah diseluruh tingkatan masyarakat. Dari upaya yang dilaksanakan tersebut diperoleh capaian jumlah bangunan penyediaan sanitasi yang terbangun sebanyak 64 unit ditahun 2014, capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 120 unit.

e. Air Minum dan Air Bersih

Pada tahun 2014 jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan sebanyak 8.370 SR / 1.674 KK, capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebanyak 25.000 SR dan kemudian pada tahun 2015 dilakukan pemasangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan sepanjang 1.296 Meter dan dan untuk penyediaan sanitasi dilakukan pembangunan sarana sebanyak 28 unit.

Target pencapaian pelayanan air minum sesuai dengan target MDG's Nasional sampai tahun 2015 yaitu 70% untuk air bersih dan target untuk Sanitasi 75 % dari total jumlah penduduk pada suatu daerah. Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2015, pencapaian target air minum baru mencapai 66,47 persen dan untuk sanitasi layak tahun 2015 cakupan yang terlayani baru mencapai 54,96 persen.

f. Sumber Daya Energi

Hingga tahun 2015 sistem jaringan energi listrik di Provinsi Gorontalo terdiri dari 10 (sepuluh) PLTD, 1 (satu) PLTM dan 2 (dua) PLTU masing-masing PLTU Molotabu dan PLTU Anggrek 2 x 25 Watt yang masih dalam proses pembangunan serta ketambahan 1 (satu) PLTG yang berlokasi di Paguat. Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi di tahun 2015 dilakukan upaya pemeliharaan 70 unit PLTS, pemeliharaan 1 unit PLTMH dan menggalakkan program "Listrik Pintar" bekerjasama dengan PLN yang melakukan penyambungan listrik terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo dan pada tahun 2015 juga dilakukan sambungan baru listrik untuk rumah tangga miskin sebanyak 506 RTM. Dari upaya yang dilakukan tersebut capaian



peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 77,58 persen ditahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar 74,50 persen. Dan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas kehutanan dan pertambangan melakukan fasilitasi demi terselenggaranya konversi minyak tanah ke elpiji dan melakukan pengawasan distribusi BBM dan elpiji di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air \pm 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan yang baru dimanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3,5 MW, sedangkan Potensi panas bumi Suwawa 110 MW telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panas bumi pentadio dengan temperature 70°C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperature 50° C, Kecamatan Botumoito dengan temperature 42° C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperature 62° C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65° C. Dengan total sumberdaya diperkirakan sebesar 160° (MWe).

g. Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan efisien sejak tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 04 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo tahun 2010 - 2030 dan untuk tahun 2016 dilakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam operasionalisasi amanat Perda RTRW tersebut diupayakan dalam meningkatkan kinerja BKPRD dalam memfasilitasi penyusunan Perda RTRW kabupaten dan kota.

h. Pemerintahan Umum

Dalam urusan pemerintahan umum, beberapa capaian yang telah dilakukan hingga tahun 2014 adalah :

■ Dalam rangka pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dilakukan dengan pemberian bantuan tugas belajar S-2 dan PNS provinsi, bantuan akhir studi, perbaikan sistem promosi dan analisa jabatan, penyelenggaraan diklat formal dan non formal, penataan sistem administrasi kepegawaian secara elektronik dan penerapan SIMPEG. Hingga tahun 2015 Pemerintah provinsi dapat menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat PIM IV dan Diklat PIM III yang terakreditasi masing - masing "B" untuk Prajabatan, "B" untuk diklat PIM IV



dan "B" untuk diklat PIM III, juga mendiklatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-A) pada diklat LEMHANNAS sebanyak 2 orang, Diklatpim II sebanyak 3 Orang.

- b. Dalam hal Pengadaan Barang dan jasa dilakukan penguatan kelembagaan dengan meningkatkan level organisasi yang menjalankan fungsinya, dari UPTD menjadi Biro Pengadaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 12 Februari 2015. Disamping itu, untuk peningkatan kompetensi SDM aparat dilakukan Bimtek Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan Barang dan jasa. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perbendaharaan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam Meningkatkan kinerja pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa serta guna meminimalisir praktek KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2012 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 tahun 2012 tanggal 27 november 2012. Pembentukan ini dimaksudkan untuk efisiensi pengadaan barang/jasa dari sebelumnya ditangani secara terpisah-pisah atau menyebar dimasing-masing SKPD menjadi lebih terintegrasi dalam suatu unit organisasi yang bertugas khusus untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang di dilakukan melalui pemberlakuan sistem LPSE.
- c. Peningkatan kesejahteraan aparatur, dilakukan dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan azas berkeadilan yaitu adanya perubahan metode perhitungan TKD berdasarkan beban kerja. Pemberian tunjangan kinerja daerah dimaksudkan untuk untuk mendorong spirit dan motivasinya dalam meningkatkan kinerja, yang berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan aparatur.
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur. Pada obyek ini disediakan prasarana penunjang kegiatan perkantoran, pemberian Kendaraan Dinas Operasional (KDO) bagi pejabat eselon III serta pembangunan gedung kantor pemerintah daerah di lokasi blok plan perkantoran yang terletak di desa ayula kabupaten bone bolango yang tahun 2015 ini sudah terbangun 8 gedung dan telah digunakan.
- e. Reformasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan melalui implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis IPM, pelaksanaan kualitas Musrenbangda dengan melakukan revitalisasi mekanisme pelaksanaannya,



evaluasi kecamatan IPM dibawah rata-rata Provinsi, mengadvokasi pengembangan dan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Atas kinerja tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2014 memperoleh penghargaan berupa penganugerahan Pangripta Nusantara peringkat III untuk kategori B Daerah dengan kriteria sumber daya belum optimal namun mempunyai potensi untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pada tahun 2015 masuk menjadi salah satu nominator untuk Provinsi dengan kualitas perencanaan terbaik, selain itu dari pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan seluruh Kabupaten kota yang ada memperoleh penghargaan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2015.

- f. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media komunikasi dan cetak dengan mencantumkan nomor telpon Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh kepala SKPD dalam media cetak lokal dan melalui Radio Rakyat Hulondhalo yang menjadi wadah menjangkau aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat.
- g. Pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan penguatan kapasitas SDM dilaksanakan Bimtek Penguatan Kapabilitas APiP Kab/Kota dalam rangka reu RKA SKPD, laporan hasil evaluasi lakip SKPD, laporan hasil pemeriksaan dana hibah dan bantuan sosial. Sementara itu di tahun 2014 telah dilakukan penguatan kapasitas SDM pengawas dan pemeriksa bagi Auditor sebanyak 18 Orang dan aparat pengawas yang kompeten dalam pelaksanaan teknis pemeriksaan berjumlah 19 orang, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD secara berkala sebanyak 77 laporan hasil pemeriksaan, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah sebanyak 38 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, peningkatan koordinasi pengawasan ditingkat Provinsi, Regional dan Nasional, identifikasi dini jenis pelanggaran dan tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (SOP).
- h. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta E-Report. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset diupayakan melalui penerapan aplikasi SIMDA dan SIMBADA.
Berbagai upaya penerapan teknologi informasi disegala bidang mulai digagas pemerintah Provinsi Gorontalo dari tahun 2012. Untuk tahun 2012 Biro P2E



menggagas penggunaan format penyerapan anggaran APBD pada seluruh SKPD Provinsi Gorontalo yang diadopsi dari Format Kendali dari Hulu ke Hilir TEPPA APBD Provinsi Aceh, pembentukan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Gorontalo sebagai penghubung dalam sistem pelaporan ke Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), melaksanakan Rapat Pimpinan SKPD Provinsi untuk evaluasi percepatan penyerapan anggaran, dan melakukan desk proyek perkus (perhatian khusus) untuk percepatan pelaksanaan proyek yang mengalami kendala. Sedangkan pada Tahun 2013, Biro P2E telah berinovasi menciptakan format secara sistemik berbasis jaringan melalui aplikasi e-Monev (*electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan*) untuk percepatan penyerapan anggaran dan pengendalian pembangunan dana APBD Provinsi Gorontalo. Dengan penggunaan e-Monev, Provinsi Gorontalo mendapat penghargaan rangking 3 (tiga) nasional berdasarkan penilaian UKP4 dalam hal percepatan penyerapan APBD, dan menghantarkan Wakil Gubernur Gorontalo menjadi pemateri nasional bidang percepatan pembangunan di Istana Kepresidenan Jogjakarta pada bulan Agustus 2013. Provinsi Gorontalo menjadi rujukan nasional dan beberapa daerah telah melakukan studi banding seperti Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Kota Bandung; dan beberapa daerah lainnya telah mengkonfirmasi kunjungannya pada Tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2014, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Bappeda Provinsi juga telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran berbasis Elektronik melalui aplikasi e-Renggar. Penerapan aplikasi e-renggar dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Kedepan diupayakan akan dilakukan pengintegrasian ketiga aplikasi yaitu aplikasi SIMDA, e-Renggar dan e-Monev dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik. Semenjak tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menggagas aplikasi SIMPEDE untuk manajemen perjalanan dinas berbasis elektronik, dan aplikasi SIDAHA yaitu Sistem Informasi Daftar harga Satuan barang yang telah dilaunching Gubernur pada bulan Desember 2014. Disamping itu, beberapa SKPD juga telah menerapkan aplikasi berbasis TI dalam pengelolaan data di masing-masing SKPD dan untuk memusatkan pengumpulan dan analisis data kinerja pembangunan dibuatlah Aplikasi E-Data di tahun 2015.

- i. Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan, dilakukan dengan memfasilitasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Gorontalo dan pelaksanaan program "Gerbang Desa" yang difokuskan pada pengembangan potensi di Desa dan penyediaan infrastruktur yang menunjang



peningkatan perekonomian di Desa, atas kinerja tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh penghargaan SIKOMPAK Award pada tahun 2014.

- j. Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, di tahun 2015 Sekretariat DPRD dalam hal memfasilitasi Legislatif telah menyelesaikan 14 (empat belas) buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah.
- k. Keberhasilan dan penghargaan ditingkat Nasional yang diperoleh pada tahun 2014 - 2015 adalah :
 1. Penghargaan dalam pengelolaan keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI;
 2. Terbaik I Nasional dari Menkopolkam dalam bidang Keamanan;
 3. Terbaik I Nasional dari UKP4 tentang Pengelolaan dan Penyerapan Keuangan;
 4. Penghargaan kategori Award Akselerasi Penerapan e-Procurement dari LKPP
 5. Penghargaan Kesatria Bakti Husada pada acara puncak Hari Kesehatan Nasional
 6. Penghargaan SIKOMPAK Award pada tahun 2014 atas keberhasilan memfasilitasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Gorontalo.
 7. Penghargaan School and Madrasah Accreditation dari Badan Akreditasi nasional
 8. Pangripta Nusantara peringkat III untuk kategori B Daerah dengan kriteria sumber daya belum optimal namun mempunyai potensi untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas. Atas penilaian dokumen perencanaan tahun 2013 (RPJMD dan RKPD).
 9. Penghargaan Anugerah Aksara Madya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 10. Penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas keberhasilan Provinsi Gorontalo meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.
 11. Penghargaan Satria Bakti Husada dari BPJS atas kontribusi dalam penjaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2.1.4.3. Investasi

Realisasi investasi di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah nilai investasi berskala nasional dan internasional terus meningkat, dimana pada tahun 2015 telah mencapai 4,112 trilyun dengan jumlah investor

berskala nasional PMA dan PMDN yang telah mencapai 43 PMA/PMDN dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 18.547. Capaian tersebut lebih baik dibanding tahun 2014 yang capaian nilai investasinya baru mencapai 3,244 trilyun yang diperoleh dari investor berskala nasional dan internasional sebanyak 15 PMA/PMDN dan dari investasi tersebut tenaga kerja yang terserap rasionya masih sejumlah 18.003. Berbagai capaian tersebut tidak lepas dari semakin meningkatnya iklim investasi yang kondusif disertai dengan peningkatan penanganan permasalahan yang dihadapi PMA/PMDN, dan penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk penanaman modal dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan SIPD serta penyelenggaraan promosi dan peningkatan kerjasama investasi.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2015 Secara umum, komposisi umur penduduk Provinsi Gorontalo adalah 28,43 persen penduduk usia muda (0-14 tahun), 67,30 persen usia produktif 15-64 tahun dan 4,25 persen penduduk usia tua (65 tahun lebih). Dengan demikian, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 48,57 persen yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo menanggung sekitar 48 orang penduduk usia belum/tidak produktif.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif, untuk itu pada tahun 2014 melalui kegiatan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta tanpa secara langsung mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan keterampilan bagi para pencari kerja dengan tingkat pendidikan rendah terutama dikecamatan dengan IPM rendah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1) pelatihan kejuruan otomotif sepeda motor di Kota Gorontalo dan Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango; 2) pelatihan budidaya ikan air tawar di desa Barakati Kab. Gorontalo; 3) pelatihan processing hasil perikanan laut di desa BUbaa Kab. Boalemo; 4) pelatihan kejuruan menjahit di desa Popayato Kab. Pohuwato; 5) pelatihan pengolahan pakan ternak kambing di Kec. Bulango Ulu Kab. Bone Bolango; 6) pelatihan budidaya rumput laut di Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara; 7) pelatihan pembuatan pakan ternak sapi di Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara.

2.1.5 Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Hasil capaian kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari Indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat



mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 2.17
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015
Misi Pertama, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat			
1.	Pertumbuhan Ekonomi %	7,7 – 8,1	6,23
2.	IPM	72,76	-
3.	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	11.709.103	25.183.152,21
4.	Indeks Gini	0,38	0,32
5.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.)	3,255 Trilyun	4,112 Trilyun
6.	Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang dibangun & yang ditingkatkan	10 Km	9,97 Km
7.	Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Strategis provinsi	2 Buah	1 Buah
8.	Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan	5 Km	10,12 Km
9.	Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi & Pemeliharaan)	17.131 Ha	17.131 Ha
13.	Ratio Elektrifikasi	75,75%	77,58%
Misi Kedua, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.			
1.	Angka Melek Huruf	96,50%	99,71%
2.	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	8,80	9,04
3.	Angka Kematian Ibu/100.000	128,9	253,4
4.	Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup	15	11,5
7.	Angka usia harapan hidup	68,24	68,24
8.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,00	4,65
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,40%	63,65%
Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat.			
1.	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	84	72,09
2.	Meningkatnya nilai tukar petani (NTP)		
	- Subsektor tanaman pangan	91,89	98,30
	- Subsektor Hortikultura	110,43	123,60
3.	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	107,42	106,73
4.	Nilai Tukar Petani Kebun	128,04	95,99
5.	Jumlah Populasi Ternak Besar (sapi/Ekor)	215.100	197.124
6.	Jumlah Konsumsi Daging (Sapi)(kg/kapita/th)	3,4	3,1
Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya, Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan.			



No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	58,08	-
2.	Indeks Pembangunan Gender	65,10	-
Misi Kelima, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.			
1.	Persentase penduduk miskin (%)	15,5-14	18,16
2.	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan

Berdasarkan evaluasi program pembangunan terhadap indikator RPJMD 2012 dan 2017 dan data BPS Provinsi Gorontalo berdasarkan capaian Misi sebagai berikut :

Misi Pertama, Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kewilayahari, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. Urusan yang terkait dengan misi pertama tersebut adalah hampir seluruh urusan pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi, Urusan pekerjaan umum, Perhubungan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, industri, perdagangan, Ketenagakerjaan dan Energi Sumberdaya mineral.

Sasaran Misi pertama adalah Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat yang berkeadilan, Peningkatan Laju Investasi, Peningkatan pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM, Peningkatan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diservikasi Komoditi lainnya. Peningkatan Infrastruktur Daerah, Peningkatan Jalan Akses ke pusat-pusat produksi, Terwujudnya Kemandirian Desa dan Peningkatan Infrastruktur Desa.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator Misi Satu sebagian besar telah mencapai target, namun pada pencapaian pertumbuhan ekonomi agak melemah disebabkan adanya elnino yang melanda Provinsi Gorontalo dan menyebabkan beberapa wilayah pertanian mengalami kekeringan dan pencapaian IPM berubah akibat adanya perubahan metode perhitungan, seperti pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.18
Evaluasi Capaian Misi Satu RPJMD Tahun 2015

No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi blm tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Pertumbuhan Ekonomi %	7,6 – 8	7,74	7,7 – 8,1	6,23	<
2.	IPM	72,26	65,17	72,76	-	<
3.	Laju Inflasi provinsi (%)	4 – 7	6,14	4 - 7	4,30	>
4.	PDRB per kapita AHB (juta Rp)	10.909.103	11.991.349 (PDRB tahun dasar 2000)	11.709.103	25.183.152,21	>



No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi blm tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
5.	Indeks Gini	0,40	0,40	0,38	0,32	=
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.)	2,604 Trilyun	3,023 trilyun	3,255 Trilyun	4,112 Trilyun	>
7.	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan	100.000 orang	356.799 orang	105.000 orang	368.000	>
8.	Peningkatan lama tinggal	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	=
9.	Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan	33 Km	27,86 Km	10 Km	9,97 Km	<
10.	Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yg dibangun & yang ditingkatkan	5 Km	5,7 Km	5 Km	10,12 Km	>
11.	Jumlah jembatan yang dibangun diruas jalan provinsi	2 Bh	1 Bh	2 Bh	-	<
12.	Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Stategis provinsi	2 Bh	2 Buah	2 Bh	-	<
13.	Jumlah Panjang pemeliharaan berkala jalan Provinsi	10 Km	8,14 Km	10 Km	22,99	>
14.	Jumlah Luas Areal Jaringan & bangunan irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi dan Pemeliharaan)	17.131 Ha	17.905 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	=
13.	Jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitas & sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan	25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)	8.370 SR	25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)	1.296 SR	<
14.	Jumlah Bangunan penyediaan Sanitasi yang terbangun	120 Unit	64 Unit	120 Unit	28 Unit	<
15.	Jumlah Panjang penanganan erosi, longsor & sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal Pertanian, persawahan, & permukiman masyarakat	1.120 M	838,29 M	1.580 M	1.367 M	<
16.	Jumlah panjang Tanggul pengaman pantai yg dibangun bagi permukiman masyarakat	200 M	98 M	300 M	150 M	<
17.	Meningkatnya layanan angkutan transportasi	4 terminal memenuhi kriteria tipe B	4 terminal memenuhi kriteria tipe B	6 terminal memenuhi kriteria tipe B	5 terminal memenuhi kriteria tipe B	<
		2 unit (subsidi) layanan angkutan pemadu moda	-	1 unit subsidi layanan angkutan pemadu moda	3 Unit subsidi layanan angkutan pemadu moda	>
		4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)	=
18.	Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo	2.700 ton/hr	3.526 ton/hari	2.800 ton/hr	4.419 ton/hari	>
19.	Jumlah koperasi (unit)	1.060	1.131	1.080	1.183	>
20.	Jumlah koperasi berkualitas (Unit)	15	15	20	15	<
21.	Jumlah UMKM (Unit)	65.705	70.590	67.413	96.124	>
22.	Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (UMKM)	650	859	750	1.240	>
23.	Berkembangnya kluster industri	1 kluster	1 kluster	2 kluster	1 Kluster	<
24.	Jumlah IKM (unit)	13.075	13.688	13.323	14.084	>
25.	Jumlah Sentra IKM (unit)	289 sentra	289 sentra	297 sentra	287	<
26.	Perkembangan ekspor (ton)	102.070	72.608	142.897	144.291	>
27.	Jumlah perdagangan antar pulau	810.617	66.126 ton	844.663	620.902	<



No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi blm tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	(ton)					
29	Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun	4 pasar traditional	4 pasar traditional	4 pasar traditional	5 Pasar traditional	>
30.	Pengujian komoditi	200 kali	243 kali	200 kali		>
31.	Penerbitan sertifikat mutu	12 sertifikat	12 sertifikat	12 sertifikat		=
32.	Ratio Elektrifikasi	75.75 %	74,48 %	76.75 %	77,58%	>

Misi kedua, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. Misi kedua ini ditargetkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan "gratis" terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan universal total coverage. Hal ini sangat strategis untuk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (*pro-poor*). Urusan yang terkait dengan misi kedua tersebut adalah urusan pendidikan, kesehatan, urusan perumahan dan ketenagakerjaan.

Sasaran Misi kedua adalah Peningkatan kualitas pendidikan, Perluasan Akses PAUD, Perluasan Akses Wajar 12 Tahun dan Paket A, B dan C, Perluasan Pendidikan Non Formal, Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Terbangunnya infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat desa dan Terwujudnya akses layanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda dan Jamkesmas.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi kedua, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.19
Evaluasi Capaian Misi Dua RPJMD Tahun 2015

No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Angka Melek Huruf	96,00%	99,68%	96,50%	99,71%	>
2.	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	8,70	9	8,80	9,04	>
3.	Angka partisipasi kasar :					
	- TK/PAUD	51,88	43,77	54,47	83,51	>
	- SD/MI	111,15	114,64	111,20	114,23	>
	- SMP/MTs	99,75	97,82	99,80	102,27	>
	- SMA/MA/SMK	83,04	88,19	88,09	89,92	>
4.	Angka Partisipasi Murni :					
	- SD/MI/Paket A	97,50	100,97	98,00	100,81	>
	- SMP/MTs/Paket B	90,50	73,06	92,25	77,10	<
	- SMA/MA/SMK/Paket C	64,00	65,87	70,05	71,34	>
5.	Angka Kematian Ibu/100.000	159,1	194,8	128,9	253,4	<
6.	Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup	16	13,9	15	11,5	>
7.	Angka kematian neonatal/1.000	10,30	9,8	9,40	8,0	>



No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	kelahiran hidup					
8.	Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup	18,50	15,3	17,40	12,7	>
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	=
10.	Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	14,00	10,86	13,78	24,5	<
11.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	81,25	65	87,50	67,9	<
12.	Rasio puskesmas. per satuan penduduk	0,09	0,08	0,09	0,08	<
13.	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS/Jlh Pddk x 1000)	0,007	0,011	0,007	0,011	>
14.	Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk	1,00	0,71	1,00	0,85	<
15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	110%	100%	129%	>
16.	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis	154.698	235.058	138.199	235.058	>
17.	Jumlah Posyandu	1.384	1.304	1.440	1537	>
18.	Rasio posyandu per 100 balita	11,85	14,58	12,06	11,28	<
19.	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,25	0,21	0,25	0,21	<
20.	Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat	67	42,50	68,78	57	<
21.	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0,27	0,24	0,28	0,16	<
22.	Rasio Dokter gigi per satuan penduduk	0,02	0,04	0,03	0,02	<
23.	Rasio Dokter spesialis per 1000 penduduk	0,05	0,05	0,06	0,08	>
24.	Rasio tenaga medis (perawat) per 1000 penduduk	1,32	1,45	1,40	1,06	<
25.	Rasio tenaga medis (bidan) per 1000 penduduk	0,74	0,89	0,83	0,49	<
26.	Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk	0,29	0,22	0,31	0,15	<
27.	Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk	0,07	0,06	0,07	0,02	<
28.	Angka usia harapan hidup	67,88	67,54	68,24		<
29.	Persentase balita gizi buruk	3,80	2,32	3,57		>
30.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :					
	- SD/MI	72,50	75,24	73,00	73,92	>
	- SMP/MTs	60,00	68,46	60,50	67,18	>
	- SMA/SMK/MA/MK	15,20	27,39	15,50	22,12	>
31.	Angka Putus Sekolah :					
	- Angka Putus Sekolah SD/MI	0,50	0,01	0,04	0,00	>
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,06	0,10	0,05	0,04	>
	- Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,35	0,14	0,25	0,01	>
32.	Angka Kelulusan:					
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,50	99,96	99,65	100,00	>
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	98,05	99,88	98,50	100,00	>
33.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata					
	- SD/MI	632,80	659,11	628,38	622,62	<
	- SMP/MTs	752,04	759,30	736,24	765,52	>
	- SMA/SMK/MA/MK	784,05	885,06	766,45	703,06	<
34.	Persentase Sekolah pendidikan kondisi bangunan baik					



No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	- SD/MI	84,00	92,30	85,00		>
	- SMP/MTs	83,00	96,13	84,00	90,50	>
	- SMA/MA	89,00	90,28	90,00	91,22	>
	- SMK	85,00	93,73	86,00	94,52	>
35.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,25	4,18	4,00	4,65	<
36.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,10	62,84	65,40	63,65	<

Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau limboto sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan das sebagai wujud memelihara lingkungan (pro green). Misi ketiga ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai, waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (das) serta waduk harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungannya (pro-green). Urusan yang terkait dengan misi ketiga tersebut adalah urusan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan serta urusan kehutanan, perencanaan dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Sasaran Misi Ketiga Adalah Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan, Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perikanan, Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup, Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (*Zero Waste*) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, Peningkatan pemeliharaan obyek-obyek wisata.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi ketiga, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Evaluasi Capaian Misi Ketiga RPJMD Tahun 2015

No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	81	97,43	84	72,09	>
2.	Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (352 perusahaan)	20 usaha/ kegiatan	29 usaha/ kegiatan	22 usaha/ kegiatan	22 usaha/ kegiatan	>



No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
3.	Komoditi tanaman pangan :					
	- Peningkatan produksi padi 3% /tahun (ton)	308.896	314.703	318.614	331.220	>
	- Peningkatan produktivitas padi 4,72%/tahun (ku/ha)	55,63	50,20	56,70	55,51	<
	- Peningkatan Produksi jagung sebesar 9,29%/tahun (ton)	789.512	719.780	850.269	643.512	<
	- Peningkatan Produktivitas jagung sebesar 2,66%/tahun (ku/ha)	51,89	48,37	52,87	50,41	<
	- Peningkatan Produksi Kedelai 3%/thn (ton)	2.407	4.273	2.454	3.203	>
	- Peningkatan produktivitas kedelai (ku/ha)	13,03	15,04	13,15	13,49	>
4.	Komoditi Hortikultura :					
	- Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton)	17.559	15.098	18.086	752	<
	- Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn)	17.148	9.839	17.319	7.228,91	<
	- Peningkatan Produksi Buah - buahan 2 % per Tahun (Ton)	13.475	18.310	13.744	722,89	<
5.	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	82,8	66,81	88,5	74,2	<
6.	Meningkatnya skor Poia Pangan Harapan Konsumsi	77,4	72,8	80,9	78,7	<
7.	Meningkatnya ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan daerah	80,7	80,7	87	87	=
8.	Meningkatnya nilai tukar petani (NTP)					
	- Subsektor tanaman pangan	91,86	96,31	91,89	98,30	>
	- Subsektor Hortikultura	110,40	121,14	110,43	123,60	>
9.	Rehabilitasi hutan & lahan kritis (Ha)	15.350	13.450	15.750	13.800	<
10.	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	212,766	150,200	197,016	-	<
11.	Produksi hasil hutan (m3)					
	a. Kayu Bulat (m3)	57.000	60.764,61	58.000	57.750	>
	b. Kayu Gergajian (m3)	2.646,43	21.267,61	2.671,43	17.850	>
	c. Non Kayu (ton)	6.200	880	6.200	1200	>
12.	Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina	27,46%	23,14 %	34,16%	34,16%	=
13.	Nilai Tukar Petani Kebun	131.50	92,80	132.82	95,99	<
14.	Perluasan Areal Tebu (Ha)	1.864	1.031	1.864	1.249	<
15.	Produksi Tebu (Ton)	38.418	32.521	38.994	49.331	>
16.	Perluasan Areal Cengkih (Ha)	9.550	9.670	10.153	9.737	<
17.	Produksi Cengkih (Ton)	912	773	912	604	<
18.	perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha)	66.086	68.896	67.156	68.129	>
19.	Produksi Kelapa Dalam (Ton)	62.432	66.793	62.463	22.093	<
20.	Perluasan Areal Kakao (Ha)	14.123	14.205	14.631	14.932	>
21.	Produksi Kakao (Ton)	4.002	5.043	4.042	2.948	<
22.	Peningkatan Populasi Ternak Sapi (Ekor)	206.826	190.832	215.100	197.124	<
23.	Peningkatan Populasi Kambing (Ekor)	91.319	83.127	94.059	84.868	<
24.	Peningkatan Populasi Ayam Buras (Ekor)	1.461.176	1.291.040	1.680.353	1.850.163	>
25.	Peningkatan Produksi Daging Sapi (Kg)	4.228.909	3.011.474	4.313.487	2.552.353	<
26.	Peningkatan Produksi Daging Kambing (Kg)	206.458	176.524	218.845	68.708	<
27.	Peningkatan Produksi Daging Ayam Buras (Kg)	2.268.835	1.397.921	2.654.537	2.037.214	<
28.	Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th)	3,2	2,77	3,4	3,1	<
29.	Produksi perikanan Tangkap (ton)	97.331	103.017,80	105.118	105.715	>
30.	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	156.248	57.392,30	170.310	30.158	<
	- Produksi Ikan Budidaya (Ton)	31.250	32.457	34.062	25.885	>



No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	- Produksi rumput laut (Ton)	124.998	24.935,30	136.248	4.272	<
	Total Produksi (Tangkap + Budidaya) (Ton)	253.579	160.410,10	275.428	135.871	<
31.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)	89.935	90.847	99.379	21.109	>
32.	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	51	46,81	53	54,8	>
33.	Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)	511	731	565	680	>
34.	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	2.234.901	2.597.000	2.413.693	2.500.000	>
35.	Pendapatan pembudidaya (Rp/bln)	1.910.442	1.975.000	2.076.650	2.470.000	>
36.	Pendapatan pengolahan dan pemasaran perikanan (Rp./Bln)	2.916.000	3.830.166	3.149.280	3.830.166	>
37.	Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDINT (Desa Nelayan/Pesisir)	12	12	14	14	>
38.	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	106.45	106,89 (BPS-Des 2014)	107.42	106,73	<
39.	Tersedianya sarana dan prasarana pada kawasan strategis dan cepat tumbuh	6 unit	3 Unit, 3 Dok	6 unit	3 Unit	<

Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan adat istiadat. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan. Misi keempat diarahkan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuhkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai adat istiadat, serta melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan gender. Urusan yang terkait dengan misi keempat tersebut adalah urusan sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan perempuan dan anak serta urusan perpustakaan dan kearsipan.

Sasaran Misi Keempat adalah Peningkatan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, Peningkatan pembangunan yang responsip terhadap PMKS Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan, Peningkatan kerukunan beragama, Peningkatan pelestarian budaya daerah Peningkatan indikator kualitas hidup perempuan, Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi dan Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi keempat, seperti pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.21
Evaluasi Capaian Misi Keempat RPJMD tahun 2015

No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat	39 KK	61 KK	60 KK	99 KK	>
2.	Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT	100 KK	175 KK	120 KK	170 KK	>
3.	Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza & LKS	165 org	211 Org	145 org	293 org	>
4.	Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial	10 lembaga/ 64 org	23 lembaga/ 46 org	10 lembaga/ 64 org	41 lembaga/77 org	>
5.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	=
6.	Jumlah Pagelaran Budaya	5	5	5	35	>
7.	Indeks Pemberdayaan Gender	57,55%	57,55 %	58,08%	-	<
8.	Indeks Pembangunan Gender	64,35%	85,09 %	65,10%	-	>
9.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	40,97%	52,10%	41,20%	-	>
10.	Implementasi Perencanaan Penganggaran yang responsip Gender	50%	65%	60%	68%	>
11.	Jumlah organisasi pemuda	28	28	29	29	=
12.	Jumlah organisasi olahraga	23	23	23	23	=
13.	Tertaksananya LSM/Ormas yang mendapat penguatan dan pendataan LSM/Ormas	75 LSM/Ormas & 1 Database	60 LSM/Ormas & 1 Database	75 LSM/Ormas & 1 Database	60 LSM/Ormas & 1 Database	<
14.	Tertaksananya penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik baik PILEG, PILPRES maupun PILKADA	15.500 Org	790 Org	15.300 Orang	300 orang	<
15.	Tertaksananya penguatan kerukunan umat beragama masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama	100 Orang	100 Orang	100 Orang	125 orang	>
16.	Peningkatan SDM & pengelola kearsipan (orang)	65	105	70	120	>
17.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5.000 Org	39.000 Org	6.000 Org	59.621 org	>
18.	Meningkatnya jumlah buku dan judul bacaan	900	1.580	900	2.150	>
19.	Ketersediaan jenis buku dan judul terbitan daerah	15	30 Judul	20	20	=
20.	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan	30	17 org	35	17 org	<

Misi Kelima, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Misi kelima diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif otonomi daerah dan good governance termasuk mendorong penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah. Urusan terkait misi kelima adalah Urusan



wajib otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, penataan ruang, perencanaan pembangunan, serta urusan lingkungan hidup, komunikasi dan informasi dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Sasaran misi kelima adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat, terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, tercapainya reformasi birokrasi di provinsi gorontalo, berkurangnya persentase masyarakat miskin dan terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi kelima, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.22
Evaluasi Capaian Misi Kelima RPJMD tahun 2015

No	Indikator	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Terjadinya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian	5 kajian	5 Kajian	6 kajian	2 Kajian	=
2.	Tersusunnya produk hukum daerah	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 15 Pergub/SK 603	Perda 10 Pergub / SK 300		>
3.	Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (IKPK)	60	72,03	70	87,84	>
4.	Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap SKPD	55%	55%	70%		=
5.	Persentase PNS yang menempati Jabatan sesuai Standar Kompetensi Jabatan	55%	91 %	70%	85,6%	>
6.	Desa Nelayan/pesisir yang menjadi Desa Tangguh/PDNT	12 Desa	12 Desa	14 Desa	14 Desa	=
7.	Persentase penduduk miskin (%)	16 - 15	17,41 (September 2014)	15,5 - 14	18,16	>
8.	Lembaga diklat terakreditasi	Prajabatan "B"	Prajabatan "B"	Prajabtan "B"	Prajabtan "B"	=
		Diklatpim IV "C"	Diklatpim IV "B"	Diklatpim IV "C"	Diklatpim IV "B"	>
		Diklatpim III "C"	Diklatpim III "B"	Diklatpim III "C"	Diklatpim III "B"	>
9.	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	=
10.	Rumah Layak huni yang dibangun	1.000 Unit	800 Unit	1.000 Unit	711 Unit	<
11.	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	=

2.3. Realisasi Anggaran tahun 2015

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi keuangan untuk masing-masing instansi. Hal ini perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum hasil evaluasi realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-



masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2015

NO	SKPD	PAGU	REALISASI SIMDA 2015	
			JUMLAH REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	92,982,879,698.11	88,944,419,258.00	95.66
2	DINAS KESEHATAN	73,813,111,919.09	72,350,750,323.00	98.02
3	RSUD HASRI AINUN HABIBIE	53,710,325,000.00	33,277,272,172.00	61.96
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	196,300,735,364.00	189,279,462,400.00	96.42
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10,600,000,000.00	9,879,250,923.00	93.20
6	DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMINFO	14,665,000,000.00	13,258,675,285.00	90.41
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH	4,470,000,000.00	4,302,805,471.00	96.26
8	DINAS SOSIAL	6,700,126,000.00	6,577,180,768.00	98.17
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,200,000,000.00	4,116,557,869.00	98.01
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8,827,500,000.00	8,024,087,402.00	90.90
11	DINAS KOPERASI UMKM PERINDAG	14,120,000,000.00	13,404,891,830.00	94.94
12	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP	4,885,000,000.00	4,776,061,049.00	97.77
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,650,000,000.00	4,431,167,724.00	95.29
14	PIMPINAN SETDA	31,100,000,000.00	26,189,616,280.00	84.21
15	BIRO PEMERINTAHAN	116,364,828,700.00	85,663,749,929.00	73.62
16	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	2,950,000,000.00	2,875,286,485.00	97.47
17	BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI	3,236,719,780.00	3,159,248,938.00	97.61
18	BIRO PP DAN KESRA	8,829,941,000.00	8,412,762,880.00	95.28
19	BIRO UMUM	16,880,000,000.00	16,132,275,224.00	95.57
20	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	9,088,649,790.00	8,889,441,114.00	97.81
21	SEKRETARIAT DPRD	40,000,000,000.00	33,959,897,969.00	84.90
22	DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,850,000,000.00	12,360,949,184.00	96.19
23	INSPEKTORAT	5,850,000,000.00	5,792,242,471.00	99.01
24	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	8,832,250,000.00	8,563,438,412.00	96.96
25	KANTOR PERWAKILAN JAKARTA	3,820,000,000.00	3,636,897,833.00	95.21
26	KANTOR SATPOL PP DAN LINMAS	4,000,000,000.00	3,947,406,995.00	98.69
27	SEKRETARIAT DP KORPRI	2,775,000,000.00	2,617,129,082.00	94.31
28	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PIJ	4,150,000,000.00	3,953,317,694.00	95.26
29	BPM-PDT	22,066,454,750.00	21,685,565,927.00	98.27
30	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ASET DAERAH	2,700,000,000.00	2,482,117,593.00	91.93
31	DINAS PERTANIAN TPH	34,677,765,250.00	32,800,874,889.00	94.59
32	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	19,399,027,430.00	18,226,583,461.00	93.96
33	BADAN KOORDINASI PENYULUHAN	4,980,442,900.00	4,751,480,184.00	95.40
34	DINAS KEHUTANAN DAN ESDM	8,847,286,000.00	8,420,834,171.00	95.18
35	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	22,261,788,000.00	20,682,830,566.00	92.91

2.4. Masalah dan Tantangan Pokok 2017

Masalah utama pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang yang perlu menjadi perhatian adalah mengupayakan pencapaian target dari Indikator pembangunan yang masih rendah atau belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Sementara untuk masalah dan tantangan pada tiap Misi yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut :

Permasalahan pada Misi Pertama adalah:

Perekonomian, Perekonomian Provinsi Gorontalo dinilai sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan Provinsi Gorontalo hingga tahun 2015 masih berada di angka 6,23 persen, masih diatas rata-rata nasional. Namun pencapaian pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan pemerataan pertumbuhan antar sektor. Sumber pertumbuhan sebagian besar masih berasal dari belanja pemerintah daerah, sedangkan sektor strategis seperti industri pengolahan, jasa perusahaan dan pertambangan masih perlu menjadi perhatian, pembangunan sudah harus mendorong meningkatnya kinerja sektor-sektor sekunder, sebab sektor primer sangat terpengaruh pada kondisi cuaca dan alam. Untuk itu tantangan kedepan dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan pemerataan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Ekonomi Gorontalo yang masih bertumpu pada sektor primer pertanian, walaupun pertumbuhannya tinggi namun relative belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung dan berkeadilan, kondisi tersebut ditunjukkan melalui Indeks Gini Provinsi Gorontalo tahun 2015 yang berada di angka 0,32. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan relatif membaik, walaupun belum bisa tercapai sepenuhnya, kesenjangannya masih cukup moderat dan tidak terlalu berubah dibandingkan tahun 2014 yang nilai koefisien Gini berada pada angka 0,40 sehingga pertumbuhan ekonomi belum bermanfaat positif buat sebgaiian besar masyarakat. Untuk itu kedepan diharapkan berangsur – angsur pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam mengembangkan perekonomian Gorontalo, adalah rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang dan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.

Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komoditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota belum dioptimalkan secara konkrit.

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena belum dimanfaatkan secara memadai untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah.

Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh.

Salah satu terobosan daerah dalam pengembangan perekonomian adalah mengembangkan Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (Gopandang). Pertimbangan dalam mengembangkan KEK adalah menyediakan suatu kawasan yang memiliki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi ekonomi tersebut adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas ekspor. Arah kebijakan ini diambil karena juga sesuai dengan arah kebijakan industri nasional yang mengarahkan pembangunan ke wilayah timur Indonesia. Disamping itu, untuk menggerakkan kembali sektor-sektor primer, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggagas program pertanian terpadu untuk 5 (lima) lokasi, yaitu Kabupaten Boalemo yang berpusat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Pohuwato berlokasi di Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Sumalata dan Kabupaten Bone Bolango yang dipusatkan di Kecamatan Suwawa. Rancang bangun program pertanian terpadu telah di gagas tahun 2014 dengan melibatkan beberapa SKPD teknis, dan mulai dilaksanakan pada tahun 2015.

Infrastruktur, pengembangan infrastruktur dilakukan dengan terus meningkatkan penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan social dan ekonomi masyarakat, yaitu :

Transportasi. masalah dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara. Kondisi jalan provinsi hingga tahun 2015 sepanjang 432,51 dimana dari panjang jalan tersebut yang kondisinya baik sepanjang 177,97 Km, dalam kondisi sedang sepanjang 21,42 Km, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 38,20 Km dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 84,98. dan masih banyak akses jalan provinsi yang belum terbuka seperti ruas Tapa-atinggola 12 Km, Marisa-Tolinggola 59,75 Km, Aladi-Tulabolo 22 Km, Tangkobu-Pentadu 16,20 Km) pembukaan akses jalan baru tersebut untuk meningkatkan



percepatan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar. Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pelabuhan - pelabuhan yang ada juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan rendahnya kontribusi sektor transportasi laut terhadap ekonomi daerah. Meningkatkan kapasitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo, keterbatasan sarana pelabuhan Anggrek, pelabuhan Marisa, serta pelabuhan Talamuta, merupakan beberapa bagian yang menjadi tantangan untuk bisa diwujudkan. Pelabuhan Gorontalo merupakan pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di kawasan teluk tomini, sedangkan Pelabuhan Talamuta dan Bumbulan sebagai pengumpan ke pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek terletak di kawasan utara gorontalo yang saat ini melayani aktifitas bongkar/muat barang cargo dan peti kemas termasuk ekspor jagung. Keunggulan pelabuhan ini memiliki jarak yang relatif dekat dengan negara-negara tetangga dibandingkan dengan pelabuhan Bitung seperti Malaysia, Philipina, Korea dan Jepang Sedangkan Pelabuhan Kwandang melayani antar pulau utamanya angkutan ternak sapi. Bandar udara Djalaluddin, juga menjadi prioritas daerah dalam meningkatkan sarana prasarana bandara dan fasilitas pendukung bandara menuju bandara International menjadi tantangan yang perlu direalisasikan kedepan.

Infrastruktur Pertanian. Rencana pembangunan waduk Bone Hulu dan Bendung Bolango Hulu menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja sektor pertanian, hal ini dikarenakan ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan serta lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan teknologi tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian yang sulit air.

Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan produksi perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah.

Energy Ketenagalistrikan. Sejak berdirinya Provinsi Gorontalo telah dihadapkan pada masalah keterbatasan kapasitas pembangkit listrik, namun di tahun 2015 setelah beroperasinya PLTU Molotabu, PLTG Paguat dan adanya pengoperasian kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) dengan kapasitas 120 MW untuk memenuhi kekurangan listrik di wilayah Gorontalo-Sulawesi Utara dan hasilnya saat ini Gorontalo surplus energi listrik 20 MW. Terpenuhinya kebutuhan



listrik tersebut melum mengindikasikan kemandirian industry ketenagalistrikan di Gorontalo, sebab tambahan energi tersebut masih berasal dari suplai energy listrik interkoneksi Suluttenggo dan pengoperasian kapal MVPP tidaklah permanen, untuk itu diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan sumber penggunaan listrik di perdesaan dan mempercepat pembangunan PLTU Anggrek agar dapat segera beroperasi, serta mendorong percepatan pembangunan PLTG Gorontalo 2 untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi listrik akibat meningkatnya investasi di daerah.

Perumahan dan Pemukiman. Belum adanya regulasi pengaturan penataan perumahan dan pemukiman, terbatasnya kemampuan dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar perumahan seperti lingkungan yang sehat, drainase dan persampahan, menurunnya kualitas pemukiman dan belum optimalnya kelembagaan yang bergerak dalam bidang pembangunan pemukiman dan perumahan adalah hal-hal yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Kedepan prioritas pembangunan perumahan diarahkan pada pembangunan perumahan swadaya baik melalui APBD maupun APBN dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan.

Akses Layanan Sanitasi dan Air Bersih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Hingga tahun 2015, persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak baru mencapai 54,96 persen dan persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat baru mencapai 66,47 persen. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya rumah tangga yang menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah tangganya sehari-hari di Gorontalo dan masih ada sekitar separuh rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik, hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan untuk terus ditingkatkan ditingkatkan.

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Saat ini metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia mengalami perubahan, dimana pada tahun 2013 IPM Gorontalo mencapai 71,77 namun dengan metode baru berubah menjadi 64,70 point dan pada tahun 2014 IPM Gorontalo mencapai 65,17. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan, indeks ini menjadi indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tantangan terbesar Gorontalo dalam meningkatkan IPM daerah antara lain bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kinerja sektor riil agar bisa memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat secara luas. Pendapatan masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam

menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, kelancaran akses lalu lintas barang/jasa, sehingga beban ekonomi masyarakat menjadi lebih rendah. Hal lain yang cukup penting adalah akses masyarakat terhadap permodalan. Masih terbatasnya kredit bagi usaha kecil menengah dan tingginya tingkat bunga bank masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.

Pariwisata, Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata yang cukup memadai, namun pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa masalah antara lain adalah daya saing pariwisata yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif, dan terbatasnya sumber daya manusia bidang pariwisata. Dari permasalahan tersebut, maka tantangan bidang kepariwisataan adalah menciptakan iklim usaha di bidang pariwisata, meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis informasi dan teknologi. Disamping itu pengembangan kawasan pariwisata strategis difokuskan pada pengembangan objek wisata unggulan sebagai Prime Mover Pembangunan pariwisata. Untuk tahun 2014 telah disusun masterplan kawasan Olele dan Botutonuo.

Pengembangan UMKM dan Koperasi, Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri Kecil Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi struktural & kultural para pelaku pasar di daerah dari *pseudo-entrepreneur* menjadi *pure entrepreneur*; memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda tentang Kemudahan Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); peningkatan peran Perbankan selaku *Agent of Development* guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional.

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan koperasi hingga tahun 2015 masih bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM KUMKM. Disamping itu optimalisasi fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM masih berlaku. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat.

Investasi Daerah, Secara makro, perkembangan ekonomi Gorontalo telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Ekonomi Gorontalo masih cukup tinggi, tumbuh 6,23 persen pada tahun 2015. Namun, struktur perekonomian tersebut dibentuk oleh investasi Pemerintah melalui konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Kendala dalam meningkatkan iklim investasi adalah belum harmonisnya peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat

dan daerah serta masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha disamping itu juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran pelaku usaha dalam penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi, meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan penyediaan energi dan infrastruktur adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan investasi di Gorontalo kedepan.

Permasalahan Pada Misi Kedua

Pendidikan, Prodira merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan sektor Pendidikan di Provinsi Gorontalo yaitu dengan pemberian subsidi pendidikan. Namun sektor pendidikan ini masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor pendidikan antara lain yaitu: Masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, meningkatkan pemerataan distribusi guru, meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara umum untuk meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga atas. Disamping itu perluasan akses pendidikan tidak hanya dari pendidikan formal, namun juga diupayakan melalui peningkatan akses pendidikan informal, pemberian soft skill untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan, permasalahan di sektor kesehatan adalah masih terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih



terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan angka kematian bayi, gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dari anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sektor kesehatan.

Permasalahan Pada Misi Ketiga

Pertanian secara luas, Sektor pertanian Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya produktivitas disektor pertanian yang berimplikasi pada rendahnya pendapatan petani. Pendapatan petani sangat fluktuatif dan cenderung rendah, selama empat tahun terakhir pendapatan riil petani bila dilihat dari NTP tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Jika pada tahun 2012 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo sebesar 102,34, turun menjadi 101,07 ditahun 2013 dan terus merosot menjadi 100,62 ditahun 2014 dan kembali naik ditahun 2015 menjadi 102,43. Hal ini menunjukkan pendapatan yang diterima petani dari sektor pertanian hanya sedikit lebih tinggi dibanding pengeluarannya dan dari tahun ketahun perubahannya tidak terlalu signifikan.

Tidak ada surplus usaha yang berarti bagi petani mengakibatkan sektor pertanian semakin terpinggirkan. Hasil dari sensus pertanian menyatakan bahwa selama 10 tahun terakhir terjadi pengurangan RTUP dari 133.083 RTUP tahun 2003 menjadi 122.515 ditahun 2013. Penurunan tersebut terjadi di hampir seluruh sub sektor pertanian. Potret ini mengisyaratkan bahwa sektor primer akan semakin terpuruk seiring berkembangnya sektor industry dan jasa. Permasalahan lainnya disektor pertanian adalah alih fungsi lahan menjadi lahan industry dan perumahan. Hal ini menyebabkan produksi pangan berfluktuasi. Oleh karenanya, optimalisasi usaha pertanian wajib dilakukan. Namun pada kenyataannya, upaya optimalisasi usaha pertanian masih terkendala berbagai persoalan diantaranya adalah rendahnya kualitas keterampilan SDM, kecilnya skala usaha, serta lahan pertanian yang makin menyempit.



Tantangan kedepan dari pengembangan sektor pertanian secara luas adalah meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang nantinya akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Kedepan masih terus dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana prasarana produksi; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani; meningkatkan pemanfaatan teknologi; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam, dampak perubahan iklim merupakan persoalan yang menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana alam di Gorontalo. Hingga saat ini Permasalahan mendasar yang ada ialah masih rendahnya usaha preventif didalam memperkecil kemungkinan timbulnya bencana, masih maraknya penebangan liar (illegal logging) untuk membuka lahan baru dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan serta pencemaran air, belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase perlu diperbaiki, sehingga potensi banjir bisa diperkecil. Demikian halnya dengan kapasitas kelembagaan bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota, yang harus terus ditingkatkan, peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi

spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (iv) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (v) pengawasan pemanfaatan ruang.

Permasalahan Pada Misi Keempat

Sosial, Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, dll), Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) dan Kurangnya lembaga masyarakat yang peduli pada masalah kerawanan sosial merupakan persoalan - persoalan yang menjadi perhatian dalam urusan sosial.

Kebudayaan, Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi, Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah, Masih kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kebudayaan daerah.

Pemuda dan olahraga, pembangunan pemuda dan olahraga masih akan dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi olahraga. Berdasarkan itu, maka tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun mendatang adalah meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS, meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga, meningkatkan jumlah dan kualitas SDM keolahragaan, meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan dan meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.



Permasalahan Pada Misi Kelima

Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan adalah program prioritas lintas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah yang didukung oleh para pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, tingkat kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensi non pendapatan dari kemiskinan, merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten dan kontinyu. Secara garis besar, jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 206.513 jiwa atau 18,16 persen penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam, disamping itu program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin.

Disamping itu sesuai data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 24,17 persen sedangkan perkotaan sebesar 6,44 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada dipedesaan. Oleh karenanya tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pemerataan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya dipedesaan. Untuk mempercepat tingkat penurunan kemiskinan, maka perlu diintensifkan upaya-upaya prefentif dan kuratif yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Umum, upaya meningkatkan capaian dalam hal otonomi daerah, dan peningkatan pelayanan pada masyarakat persoalan yang masih mengemuka adalah:

1. Efisiensi kelembagaan perangkat pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan;
2. Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih perlu diperbaiki dengan Revolusi Mental;
3. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal;
4. Masih rendahnya kualitas penyusunan Peraturan Daerah;
5. Pengelolaan aset daerah belum tertata dengan baik;
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;



7. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi pada pembangunan daerah;
8. Kualitas aparatur daerah belum memadai;
9. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah;
10. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal;
11. Jumlah peneliti belum memadai;
12. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai;
13. Tenaga fungsional belum ada;
14. Standar pelayanan minimal bidang riset belum tersedia;
15. Perubahan political will pemerintah terhadap penelitian;
16. Hasil-hasil penelitian yang lebih berkualitas dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian lainnya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Perekonomian Gorontalo tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp28.538,48 miliar dan PDRB perkapita mencapai Rp25,18 juta atau US\$1.882,57.

Ekonomi Gorontalo tahun 2015 tumbuh 6,23 persen melambat dibanding tahun 2014 sebesar 7,27 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,64 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,85 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 7,67 persen, lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,09 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2015 mengalami kontraksi -3,38 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh minus 14,05 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen Ekspor.

Struktur perekonomian Gorontalo menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,09 persen); Konstruksi (12,35 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,51 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2015, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,58 persen, diikuti Konstruksi sebesar 1,16 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,60 persen.

Tabel 3.1
Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014 & 2015 (Tahun Dasar 2010)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	Triw IV-2014	Triw III-2015	Triw IV-2015	Triw IV-2014	Triw III-2015	Triw IV-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 206,10	2 865,75	2 516,73	1 743,22	2 151,40	1 849,04
B Pertambangan dan Penggalian	87,66	98,18	98,17	70,85	75,77	77,08
C Industri Pengolahan	276,17	304,46	313,31	215,72	220,93	225,08
D Pengadaan Listrik dan Gas	2,77	2,40	2,85	4,47	3,79	3,93
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	3,27	3,54	3,82	2,51	2,65	2,77



	Ulang						
F	Konstruksi	828,80	898,09	990,10	669,53	686,91	745,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	649,59	786,26	801,59	526,91	585,51	584,76
H	Transportasi dan Pergudangan	418,35	464,01	472,50	322,90	339,38	340,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140,97	166,45	170,71	113,24	123,90	125,74
J	Informasi dan Komunikasi	161,11	186,89	191,43	151,79	164,17	166,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	248,19	273,00	282,88	195,43	205,27	212,09
L	Real Estate	120,80	138,09	144,75	102,07	107,45	112,07
M,N	Jasa Perusahaan	6,35	7,18	7,38	5,14	5,39	5,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	586,28	636,94	640,05	505,99	516,77	526,77
P	Jasa Pendidikan	275,74	305,44	322,46	230,70	244,46	253,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233,36	257,21	271,79	191,50	201,89	209,42
R,S, T,U	Jasa lainnya	109,76	123,30	126,82	95,06	99,91	101,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6.355,27	7.517,18	7.357,32	5.147,04	5.735,56	5.541,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2015 (persen)

Lapangan Usaha		Triw III- 2015 Terhadap Triw II-2015	Triw IV-2015 Terhadap Triw III-2015	Triw IV-2015 Terhadap Triw IV-2014
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,02	- 14,05	6,07
B	Pertambangan dan Penggalian	3,59	1,73	8,80
C	Industri Pengolahan	- 0,58	1,88	4,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	- 4,77	3,89	- 11,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,47	4,24	10,01
F	Konstruksi	4,89	8,54	11,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,11	- 0,13	10,98
H	Transportasi dan Pergudangan	3,91	0,36	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	1,48	11,04
J	Informasi dan Komunikasi	3,15	1,46	9,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	3,33	8,53
L	Real Estate	1,99	4,29	9,80
M,N	Jasa Perusahaan	2,07	0,95	5,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,78	1,93	4,11
P	Jasa Pendidikan	5,03	3,71	9,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,03	3,73	9,35
R,S, T,U	Jasa lainnya	3,11	1,18	6,34
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,70	- 3,38	7,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau *percapita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan



PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.3 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Gorontalo Tahun Dasar 2010
Tahun 2014 - 2015

PDRB Perkapita	2014	2015
Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)	22.582.378,74	25.183.152,21

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo

Inflasi, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2015 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan harga paling besar terjadi di ikan segar, hal ini dikarenakan adanya musim angin barat di Teluk Tomini yang menyebabkan penurunan dalam penangkapan ikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Gorontalo, pada bulan Desember 2015 terjadi inflasi sebesar 1,89 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 117,99 pada bulan November 2015 menjadi 120,22 pada bulan Desember 2015. Laju inflasi tahun kalender 2015 sebesar 4,30 persen dan inflasi "year on year" (Desember 2015 terhadap Desember 2014) sebesar 4,30 persen.

Inflasi Kota Gorontalo menjadi barometer inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Inflasi di kota Gorontalo pada tahun 2015 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 7,22 persen, kelompok makanan jadi sebesar 0,2 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,44 persen, kelompok sandang sebesar 0,14 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,34 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,06 persen, dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,33 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami **kenaikan harga** selama bulan Desember 2015 antara lain: beras, ayam hidup, daging ayam ras, bubara, cakalang/sisik, cumi-cumi, deho, ekor kuning, kakap merah, kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso, layang/benggol, malalugis/sohiri, selar/tude, tuna, udang basah, nike, telur ayam kampung, telur ayam ras, daun bawang, kacang panjang, ketimun, tomat sayur, wortel, apel, pepaya, pisang, bawang merah, bawang putih, gula merah, kemiri, lada/merica, cabai merah, cabai rawit, jahe, margarine, bahan agar-agar, kerupuk udang, capcai, gula pasir, cat kayu/cat besi, cat tembok, semen, kusem, tarif listrik, kipas, angin, dispenser, magic com, kompr, sabun cair/cuci piring, sabun detergen bubuk, baju muslim laki-laki, baju muslim wanita, blus, sandal karet wanita, sepatu anak-anak, obat dengan resep, obat batuk, tarif gunting rambut pria,



tarif gunting rambut wanita, parfum, sabun mandi cair, sabun wajah, personal komputer/dekstop, laptop/notebook, angkutan udara, dan mobil.

Tabel 3.4
Laju Inflasi Kota Gorontalo Desember 2015, Tahun Kalender 2015 dan Desember 2015 Terhadap Desember 2014 menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

No	Kelompok / Sub kelompok	IHK Desember	IHK November	IHK Desember	Inflasi Desember '15 (P to P)	Laju Inflasi Thn kalender	Y o Y
		2014	2015	2015	1)	2)	3)
1	2	3	4	5	6	7	8
UMUM		115,26	117,99	120,22	1,89	4,30	4,30
1	Bahan Makanan	112,27	116,59	125,01	7,22	11,35	11,35
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	116,65	124,19	124,44	0,20	6,68	6,68
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	112,21	114,36	114,86	0,44	2,36	2,36
4	Sandang	108,11	110,70	110,85	0,14	2,53	2,53
5	Kesehatan	112,11	114,91	115,30	0,34	2,85	2,85
6	Pendidikan Rekreasi dan Olahraga	104,96	108,03	108,10	0,06	2,99	2,99
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	128,30	125,90	126,32	0,33	-1,54	-1,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

1) Inflasi Point to Point (P to P) - Perubahan Indeks Desember 2015 terhadap Indeks November 2015

2) Laju Inflasi / Inflasi Tahun kalender - Perubahan Indeks Desember 2015 terhadap Indeks Desember 2014

3) Inflasi Year on Year (Y on Y) - Perubahan Indeks Desember 2015 terhadap Indeks Desember 2014

Beberapa komoditas yang mengalami **penurunan harga** selama bulan Desember 2015 antara lain: ketela pohon, tepung terigu, bandeng/bolu, cacalang asap, susu bubuk, susu kental manis, susu untuk balita, susu untuk bayi, bayam, kangkung, kol putih/kubis, sawi hijau, terong panjang, kacang tanah, jeruk, nanas, jeruk nipis/limau, kunyit, kelapa, minyak goreng, kayu lapis, seng, emas perhiasaan, hand body lotion, dan bensin. Pada bulan Desember 2015 masing-masing kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah sebagai berikut: kelompok bahan makanan sebesar 1,6473 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,0321 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,1215 persen, kelompok sandang sebesar 0,0069 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,0138 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,0034 persen, dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0656 persen.

Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau **Gini Ratio** telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Gorontalo yang ditahun tahun 2013 berdasarkan perhitungan BPS berada di angka 0,43 bisa ditekan hingga turun pada angka 0,40 di tahun 2014 dan membaik di tahun 2015 di angka 0,32.



Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara lapisan penduduk di Gorontalo sudah mulai dapat diminimalisir.

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pengangguran, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada Agustus 2015 mencapai 4,65 persen (dari angkatan kerja), mengalami kenaikan dibandingkan TPT Februari 2015 sebesar 3,06 persen atau TPT Agustus 2014 sebesar 4,18 persen. Sementara jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada Agustus 2015 sebesar 813.506 orang, meningkat sebesar 8.875 orang dari keadaan Februari 2015 sebesar 804.631, dan juga mengalami peningkatan sebesar 17.689 orang dari Agustus 2014 yang berjumlah 795.817. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan

Kegiatan Utama	2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Angkatan Kerja	520.643	500.056	534.012	517.788
Bekerja	507.939	479.137	517.687	493.687
Pengangguran	12.704	20.919	16.325	24.101
Bukan Angkatan Kerja	265.280	295.761	270.619	295.718
Sekolah	80.375	84.448	70.311	78.825
Mengurus Rmah Tangga	148.680	174.438	166.751	185.526
Lainnya	36.225	36.875	33.557	31.367
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas	785.923	795.817	804.631	813.506
Tingkat Pengangguran Terbuka	2.44	4.18	3.06	4.65
Tingkat Kesempatan Kerja	97.56	95.82	96.94	95.35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,25	62,84	66.37	63.65

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September tahun 2015 sebesar 18,16 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2015 sebesar 18,32 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,16 persen. Jumlah penduduk miskin September 2015 di Provinsi Gorontalo sebanyak **206.513** jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2015 sebanyak **206.843** jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2015-September 2015 berkurang sebanyak 330 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 1.642 jiwa, sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 1.972 iwa.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pada periode Maret 2015-September 2015 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 18,32 persen menjadi 18,16 persen, yang juga diikuti dengan turunnya jumlah penduduk miskin. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjadi 3,076 pada September 2015, yang



sebelumnya pada Maret 2015 sebesar 3,967. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,243 pada Maret 2015 menjadi 0,877 pada September 2015. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2015 sebesar Rp263.652 per kapita per bulan dan pada September 2015 menjadi Rp274.961 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp11.309 per kapita per bulan atau naik sebesar 4,29 persen.

Pada September 2015, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp201.515 dan perdesaan sebesar Rp216.687. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp73.066 dan perdesaan sebesar Rp58.476 maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih dibandingkan wilayah perdesaan.

Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2015 sebesar Rp274.581 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp275.163 per kapita per bulan.

Tabel 3.6
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah
Tahun 2015

Rincian	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2015	191.995	71.293	263.288
September 2015	201.515	73.066	274.581
Perubahan (%)	4,96	2,49	4,29
Perdesaan			
Maret 2015	207.980	55.866	263.846
September 2015	216.687	58.476	275.163
Perubahan (%)	4,19	4,67	4,29
Kota+Desa			
Maret 2015	202.433	61.220	263.652
September 2015	211.422	63.539	274.961
	4,44	3,79	4,29

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Selain indikator kemiskinan dalam bentuk persentase dan jumlah penduduk miskin yang dijadikan sebagai dasar pengukuran kemiskinan, sebenarnya terdapat dimensi



lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks. Periode Maret 2015-September 2015 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 18,32 persen menjadi 18,16 persen, yang juga diikuti dengan turunnya jumlah penduduk miskin. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjadi 3,076 pada September 2015, yang sebelumnya pada Maret 2015 sebesar 3,967. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan.

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,243 pada Maret 2015 menjadi 0,877 pada September 2015. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Tabel 3.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Indikator	Maret 2015	September 2015	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,967	3,076	-0,891
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,243	0,877	-0,366

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2015 yang masih menunjukkan peningkatan yang baik, walaupun agak melemah dibanding tahun 2014 namun masih berada diatas capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka perkiraan kondisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2016 diuraikan dalam tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2016

No	Indikator	Perkiraan capaian tahun 2016
1.	Pertumbuhan Ekonomi	7.8 – 8.3 %
2.	Inflasi	4 -7 %
3.	Penduduk miskin	14,5 - 12%
4.	Tingkat pengangguran terbuka	3,75 %
5.	PDRB per kapita ADHB (Rp)	12.509.103

Sumber : RPJMD 2012 - 2017 Provinsi Gorontalo

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2017 DAN TAHUN 2018

Global, Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia yang implikasi lanjutannya sampai ke daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah mengalami krisis yang cukup berat, perekonomian



Amerika Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2014 mulai membaik. Namun demikian perekonomian beberapa negara maju lainnya belum menunjukkan perbaikan secara memadai. Pemulihan Kawasan Eropa masih lambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalami resesi. Dalam periode yang sama penurunan permintaan dunia diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam. Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sejalan dengan kebijakan pengurangan/penghentian pembelian obligasi (*tapering off*) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS.

Setelah melewati masa yang sulit pada 2014, negara-negara berkembang akan mulai tumbuh tahun 2015 karena rendahnya harga minyak, menguatnya ekonomi Amerika, suku bunga global yang rendah dan berkurangnya tekanan domestik di sebagian negara-negara berkembang, berdasarkan prediksi *Global Economic Prospect* (GEP) dari Kelompok Bank Dunia, bahwa setelah tumbuh sebanyak 2,6 persen pada 2014, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3 persen tahun 2015, 3,3 persen di tahun 2016 dan 3,2 persen di tahun 2017. Negara-negara berkembang akan tumbuh sekitar 4,4 persen pada 2014 dan bisa naik ke angka 4,8 persen pada 2015, kemudian menguat ke angka 5,3 persen dan 5,4 persen pada 2016 dan 2017.

Di balik perbaikan ekonomi dunia yang berlangsung secara perlahan, ada beberapa tren berbeda yang memiliki berbagai implikasi terhadap pertumbuhan global. Aktivitas di Amerika Serikat dan Inggris mulai meraih momentum bersamaan dengan pasar tenaga kerja yang mulai membaik dan kebijakan moneter yang masih sangat akomodatif. Tapi belum ada perbaikan yang cukup berarti di Eropa dan Jepang, karena kerusakan akibat krisis ekonomi yang lalu. Di sisi lain, Cina kini sangat berhati-hati mengawal pelemahan pertumbuhan ekonominya, yakni sebesar 7,1 persen tahun ini (7,4 persen pada 2014), 7 persen pada 2016 dan 6,9 persen pada 2017. Ini semua masih ditambah dengan jatuhnya harga minyak yang sudah pasti akan merugikan sekaligus menguntungkan sejumlah pihak.

Risiko-risiko yang ada membuat proyeksi ke depan masih cenderung menurun, akibat empat faktor. Pertama adalah perdagangan global yang masih lemah. Kedua, kemungkinan guncangan pada pasar finansial seiring dengan naiknya suku bunga pada beberapa negara maju di waktu yang berbeda-beda. Ketiga adalah seberapa jauh harga minyak yang rendah menggoyang keseimbangan finansial negara-negara produsen minyak. Keempat, risiko dari periode stagnan atau deflasi di wilayah Eropa atau Jepang yang berlangsung lama. *"Yang mencemaskan, adalah macetnya pertumbuhan di beberapa negara maju dan beberapa negara berpendapatan menengah bisa jadi adalah gejala dari krisis ekonomi yang lebih terstruktur dan lebih dalam, Seiring dengan melambatnya pertumbuhan penduduk di banyak negara, jumlah tenaga kerja muda berkurang, yang berdampak pada menurunnya produktivitas. Tapi harapan masih ada. Rendahnya harga minyak,*



mengurangi tingkat inflasi di seluruh dunia dan diperkirakan akan menunda kenaikan suku bunga di negara-negara maju. Ini menciptakan peluang bagi negara-negara pengimpor minyak seperti Cina dan India; pertumbuhan India diperkirakan bisa mencapai 7 persen pada 2016. Penting sekali bagi sejumlah negara untuk memanfaatkan kesempatan dengan melakukan reformasi fiskal dan struktural, yang bisa mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang dan pembangunan yang inklusif."

Arus perdagangan masih lemah di tahun 2015. Sejak krisis finansial global, perdagangan global telah menurun secara signifikan, hanya tumbuh kurang dari 4 persen pada 2013 dan 2014, jauh di bawah pertumbuhan rata-rata sebelum krisis yaitu sebesar 7 persen per tahun, pertumbuhan yang lemah ini disebabkan oleh rendahnya permintaan dan berkurangnya sensitivitas perdagangan dunia dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktivitas global. Perubahan dalam rantai nilai global (*global value chains*) dan perubahan komposisi permintaan impor bisa jadi telah berkontribusi pada rendahnya pertumbuhan perdagangan global. Harga komoditas tetap rendah sepanjang 2015. Jatuhnya harga minyak yang di luar kebiasaan pada paruh kedua tahun 2014 bisa mengurangi tekanan inflasi secara signifikan dan memperbaiki transaksi berjalan dan perimbangan fiskal di negara-negara berkembang pengimpor minyak. *"Harga minyak yang rendah akan menyebabkan perpindahan pendapatan yang signifikan dari negara pengekspor minyak kepada negara pengimpor minyak. Bagi eksportir dan importir, harga minyak yang rendah memberikan kesempatan untuk mengambil langkah-langkah reformasi yang bisa meningkatkan sumber daya fiskal dan membantu tujuan-tujuan lingkungan hidup yang lebih luas.*

Negara-negara berpendapatan menengah yang bisa mendapat keuntungan dari jatuhnya harga minyak adalah India, dimana pertumbuhan diharapkan mencapai 6,4 persen pada tahun 2015 (dari 5,6 persen pada 2014) dan menanjak ke 7 persen untuk 2016 dan 2017. Di Brazil, Indonesia, Afrika Selatan dan Turki, jatuhnya harga minyak akan membantu mengurangi inflasi dan mengurangi defisit transaksi berjalan yang biasanya menjadi sumber kelemahan bagi negara-negara tersebut.

Bagaimana pun, rendahnya harga minyak akan memperlemah aktivitas di negara-negara eksportir. Sebagai contoh, ekonomi Rusia akan tumbuh sekitar 2,9 persen pada 2015, kemudian kembali ke zona positif pada 2016 dengan proyeksi pertumbuhan 0,1 persen.

Kontras dengan negara-negara berpendapatan menengah, aktivitas ekonomi di negara berpendapatan rendah justru menguat pada 2014 didukung oleh peningkatan investasi sektor publik, perluasan sektor jasa secara signifikan, panen yang baik dan banyaknya dana yang masuk. Pertumbuhan di negara berpendapatan rendah diharapkan tetap kuat sebesar 6 persen pada 2015 sampai 2017, meskipun rendahnya harga minyak dan komoditas akan menahan laju pertumbuhan ini khususnya bagi negara-negara berpendapatan rendah pengekspor komoditas. *"Risiko terhadap ekonomi global tetap ada. Negara dengan kerangka kebijakan yang*



lebih kredibel dan pemerintah yang berorientasi pada reformasi akan lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan 2015.

Ekonomi Nasional, Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 melambat menjadi 5,1 persen di tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,8 persen. Dari sisi eksternal perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan anggaran pengeluaran pemerintah. Namun demikian, meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi dibanding beberapa negara lainnya, yang terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi.

Perekonomian Indonesia tumbuh 4,79 persen di tahun 2015. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian yang berkontraksi 5,08 persen. Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,06 persen, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,53 persen dan jasa lainnya sebesar 8,08 persen. Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri pengolahan (20,84 persen); pertanian, kehutanan dan perikanan (13,52 persen) dan perdagangan besar eceran, reparasi mobil-sepeda motor (13,29 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015, Industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi, sebesar 0,92 persen, diikuti konstruksi sebesar 0,64 persen, dan pertanian sebesar 0,53 persen.

Ekonomi Gorontalo, Perekonomian Gorontalo pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibanding tahun 2014. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pada lapangan usaha pertanian yang merupakan lapangan usaha utama kontributor PDRB Provinsi Gorontalo.

Dari sisi penggunaan, perlambatan penggunaan ekonomi disebabkan adanya penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dari perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga seiring adanya perlambatan kinerja lapangan usaha utama di Gorontalo. Di sisi lain, konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPR) mengalami percepatan pertumbuhan sesuai dengan upaya percepatan realisasi anggaran pemerintah dan terkait dengan peningkatan aktifitas menjelang pemilukada bersama yang direncanakan akan dilangsungkan pada akhir tahun 2015. Sedangkan dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi salah satu sumber pertumbuhan di Provinsi Gorontalo. Akselerasi dari sisi



investasi tersebut mendorong percepatan kinerja impor barang dan jasa terutama komoditas penunjang investasi.

Berdasarkan berbagai prediksi dan capaian perekonomian global, nasional dan Gorontalo, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo kedepan akan tetap tumbuh positif atas implikasi dari efek musiman seperti Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, menjelang tahun baru, serta even tahunan Provinsi antara lain Festival Karawo 2016, perayaan hari ulang tahun provinsi Gorontalo, hari patriotik 23 Januari serta akan dilaksanakannya hajatan pemilihan kepala daerah untuk Gubernur dan Bupati Boalemo diperkirakan memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga. Selain itu, faktor peningkatan dari sisi konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran (APBD) Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota serta kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan didaerah yang jika diupayakan dapat memenuhi target realisasi anggaran menjelang hingga berakhirnya tahun 2016 diyakini memberikan dampak yang besar terhadap pembentukan ekonomi Gorontalo. Disamping itu, dengan kondisi dan dinamika nasional yang diyakini makin kuat serta mulai membaiknya perekonomian global beberapa tahun terakhir ini, secara makro pada tahun 2016 - 2017 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di prediksi masih dalam kondisi baik, berdasarkan hal tersebut, maka indikator makro ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel. 3.9
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2016 - 2017

Indikator	Proyeksi	
	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	7.8 - 8.3%	7.8 - 8.5
Kemiskinan	14,5 - 12%	13-10
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,75%	3.5%
PDRB Perkapita	12.509.103	13.309.103
Inflasi	5 - 6,5 %	5 - 8%

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 - 2017

Kedepan Provinsi Gorontalo akan fokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkualitas dengan melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan terutama pada sektor sekunder dan tersier dan pada upaya untuk mencapai proyeksi perkonomian tersebut, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan kesempatan kerja yang banyak, terutama yang bersifat padat karya, lebih menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif dengan program "Membangun Desa Dari Gorontalo", mengimplementasikan lebih konkrit dan tepat sasaran untuk program-program pengentasan kemiskinan diantaranya program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan



dasar (seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan sebagainya) serta upaya penciptaan program pembangunan yang inklusif, yang dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment) yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan atau anggaran daerah didasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Gorontalo dititik beratkan pada:

1. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
2. Kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added).
3. Arah pembiayaan Provinsi Gorontalo diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah Di Provinsi Gorontalo proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kenaikan rata-rata 18.46% selama kurun waktu 2012-2016 (tabel 3.11), maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu-waktu mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 adalah dengan terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menghitung potensinya secara sistematis dan rasional yang minimal mendekati angka riil, disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Gorontalo seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, income perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan fiskal. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping hal tersebut diatas, kebijakan anggaran pendapatan tahun 2017 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 adalah "Mendorong Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan Indikator Kinerja yaitu pengelolaan/penatausahaan penerimaan PAD yang akuntabel, tersedianya Perda tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta prosentase peningkatan PAD yang signifikan.

Terkait dengan hal tersebut, maka pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi khususnya oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) yang didasarkan antara lain pada RPJMD, RKPD, realisasi semester I tahun anggaran 2016 (Tabel 3.10). Untuk pertumbuhan realisasi pendapatan selama kurun waktu 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.11.



Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Pendapatan
Semester I Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		Semester I 2016	LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN	1,682,037,855,814.69	928,189,087,632.35	(753,848,768,182.34)	55.18
PENDAPATAN ASLI DAERAH	349,144,605,814.69	146,081,926,836.35	(203,062,678,978.34)	41.84
Pendapatan Pajak Daerah	319,889,262,401.65	129,416,596,839.00	(190,472,665,562.65)	40.46
Hasil Retribusi Daerah	5,000,000,000.00	2,481,981,227.00	(2,518,018,773.00)	49.64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	0.00	(4,000,000,000.00)	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20,255,343,413.04	14,183,348,770.35	(6,071,994,642.69)	70.02
DANA PERIMBANGAN	1,292,589,010,000.00	761,929,770,683.00	(530,659,239,317.00)	58.95
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29,046,717,000.00	14,182,234,683.00	(14,864,482,317.00)	48.83
Dana Alokasi Umum	884,557,753,000.00	589,705,144,000.00	(294,852,609,000.00)	66.67
Dana Alokasi Khusus Fisik	152,985,140,000.00	45,895,542,000.00	(107,089,598,000.00)	30.00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	225,999,400,000.00	112,146,850,000.00	(113,852,550,000.00)	49.62
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40,304,240,000.00	20,177,390,113.00	(20,126,849,887.00)	50.06
Pendapatan Hibah	500,000,000.00	275,270,113.00	(224,729,887.00)	55.05
Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	39,804,240,000.00	19,902,120,000.00	(19,902,120,000.00)	50.00

Sumber: Dinas Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo

Tabel 3.11
Perkembangan Realisasi Pendapatan daerah
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	%		2014	%		2015	%		2016	%		Rata2
				±	±		±	±		±	±		±	±	
1	PENDAPATAN	933,169,936,467.63	1,062,666,928,696.13	12.79	1,209,049,489,262.54	14.87	1,389,324,242,789.95	14.91	1,682,037,855,814.69	21.07	15.91				
1.1	PAD	180,039,376,122.83	244,614,627,481.13	19.20	281,920,210,038.54	31.36	289,557,181,141.95	2.71	349,144,605,814.69	20.58	18.48				
1.1.1	Pajak Daerah	168,068,663,005.00	200,883,464,795.00	19.52	247,037,060,459.00	23.03	260,996,261,660.00	5.61	319,889,262,401.65	22.56	17.68				
1.1.2	Retribusi Daerah	88,420,000.00	57,121,007.00	100.00	1,967,050,52.00	244.36	4,072,217,710.00	107.02	5,000,000,000.00	22.78	18.54				
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg dipisahkan	-	-	-	1,946,292,810.00	-	3,812,76,405.00	100.00	4,000,000,000.00	25.74	314.3				
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	11,882,293,117.83	13,639,850,679.13	11.75	20,869,807,266.54	134.58	21,307,426,366.95	(30.98)	20,255,343,413.04	(4.94)	27.35				
1.2	Dana Perimbangan	837,007,089,338.00	722,098,488,898.00	13.36	800,313,828,654.00	10.83	934,046,394,149.00	16.71	1,292,589,010,000.00	38.39	19.82				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	30,858,457,335.00	26,800,697,898.00	(13.15)	23,660,330,654.00	(11.72)	20,766,783,149.00	(12.23)	29,046,717,000.00	39.87	0.69				
1.2.2	DAU	582,140,302,000.00	652,284,261,000.00	12.05	734,279,438,000.00	12.57	845,395,651,000.00	15.13	884,557,753,000.00	4.63	11.0				
1.2.3	DAK Fisik	24,008,330,000.00	43,013,530,000.00	79.16	42,374,060,000.00	(1.49)	67,883,960,000.00	60.20	152,985,140,000.00	125.36	65.51				
	DAK Non Fisik	-	-	-	-	-	-	-	225,999,400,000.00	-	-				
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	116,123,470,000.00	116,842,912,317.00	(0.24)	126,816,460,670.00	9.47	165,720,667,499.00	###	40,304,240,000.00	(75.88)	(8.94)				
1.3.1	Hibah	-	453,872,317.00	-	53,944,633.00	100.00	652,487,633.00	26.96	500,000,000.00	(23.37)	25.90				
1.3.2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	116,123,470,000.00	116,389,040,000.00	(0.63)	126,301,505,937.00	9.46	165,068,179,866.00	30.69	39,804,240,000.00	(75.89)	(9.09)				
1.3.3	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3.4	Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3.5	Dana tambahan penghasilan bagi GURU PNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3.6	Pendapatan dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Sumber: Dinas Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari sisi perkembangan/ pertumbuhan, pendapatan daerah selama periode 2012-2016 naik rata-rata 15,91% sedangkan PAD rata-rata naik 18,46%. Walaupun dari kenaikan rata2 relatif tinggi, namun dari sisi realisasi pendapatan per periode belum sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya dari sisi PAD. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi PAD pada semester I Tahun 2016 (tabel 3.10) yang baru mencapai Rp.146,081,926,836.35 atau 41,84% dari target anggaran PAD tahun 2016 sebesar Rp.349,144,605,814.69 sedangkan tahun 2015 sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI hanya mencapai Rp.289,557,151,141.95 atau 90.49% dari target anggaran PAD tahun 2015 sebesar Rp.319,972,267,527.25. Belum maksimalnya realisasi pendapatan khususnya dari PAD, dipengaruhi antara lain oleh situasi perekonomian nasional dan daerah, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor, kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif pajak kendaraan bermotor yang berbeda antara kendaraan umum dan kendaraan pribadi, kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi mobil murah, kebijakan uang muka kendaraan bermotor, fluktuasi harga BBM serta beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Provinsi Gorontalo.

Kebijakan perencanaan pendapatan juga disesuaikan dengan regulasi atau ketentuan perundang undangan yang berlaku (terbaru) yaitu Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, dengan beberapa hal penting seperti yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 31 Tahun 2016 oleh Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.

1. Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Pendapatan yang sudah ditetapkan peruntukkannya (earmarking) disesuaikan penggunaannya dalam belanja.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based).
4. Alokasi Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) antara lain memperhatikan realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir.

3.2.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam



masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan.

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya.

Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan unit satuan kerja terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilihat perbandingan antara target pendapatan daerah pada RPJMD dan target pendapatan daerah pada KU-APBD TA 2017, yang belum terlampaui karena penganggaran dana perimbangan masih didasarkan pada tahun 2016 diluar DAK Fisik. Target RPJMD dan KU-APBD TA 2017 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.12 dan tabel 3.13 berikut.



Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Berdasarkan RPJMD 2012-2017

No	Uraian	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pembayaran	123,169,935,47,83	140,484,478,035,48	115,514,193,009,56	127,556,316,203,66	140,315,291,454,31	537,101,549,971,56
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	52,968,778,645,91	41,656,621,715,94	33,325,297,372,75	26,660,237,898,20	21,328,190,318,56	17,062,552,254,85
	Total Penyelesaian	986,138,710,103,74	711,087,141,099,75,42	1,188,465,490,382,31	1,302,216,553,103,86	1,423,643,481,177,87	1,554,241,102,226,41
	Dikurangi						
	Realisasi Pencapaian Pembiayaan yang Tidak Dapat Membiayai Utang Daerah	492,159,936,78,250	525,665,73,47,114	577,558,788,905,09	640,958,156,293,77	711,369,766,635,79	782,631,104,217,22
4	Kapasitas Riil	493,978,777,321,24	556,475,361,280,23	610,906,701,477,22	661,258,396,810,09	712,273,715,137,07	761,562,994,009,19

Sumber : RPJMD 2013 - 2017

Tabel 3.13
Perbandingan Pendapatan Daerah
Pada APBD T.A 2016 dan KU-APBD T.A 2017

URAIAN	APBD 2016 (RP)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KU-APBD 2017	% THD TTL
PENDAPATAN	1,682,037,855,814.69	149,654,973,199.31	8.90	1,831,692,829,014.00	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	349,144,605,814.69	7,254,079,185.31	2.08	356,398,685,000.00	19.46
Pendapatan Pajak Daerah	319,889,262,401.65	6,209,422,598.35	1.94	326,098,685,000.00	
Hasil Retribusi Daerah	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	20.00	6,000,000,000.00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000,000.00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20,255,343,413.04	44,656,586.96	0.22	20,300,000,000.00	
DANA PERIMBANGAN	1,292,589,010,000.00	174,705,134,014.00	13.52	1,467,294,144,014.00	80.11
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29,046,717,000.00	4,644,460,000.00	15.99	33,691,177,000.00	
Dana Alokasi Umum	884,557,753,000.00	135,222,665,014.00	15.29	1,019,780,418,014.00	
Dana Alokasi Khusus Fisik	152,985,140,000.00	(46,776,140,000.00)	(30.58)	106,209,000,000.00	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	225,999,400,000.00	81,614,149,000.00	36.11	307,613,549,000.00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40,304,240,000.00	(32,304,240,000.00)	(80.15)	8,000,000,000.00	0.44
Pendapatan Hibah	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	
Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	39,804,240,000.00	(32,304,240,000.00)	(81.16)	7,500,000,000.00	

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel 3.13 tersebut, beberapa catatan penting pada kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2017 adalah:

1. Dalam proyeksi pendapatan sudah termasuk tambahan Dana Transfer Tahun 2017.
2. Pendapatan daerah pada RAPBD Tahun 2017 diprediksi mencapai **Rp.1,831,692,829,014.00**. Perencanaan pendapatan tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah pada TA 2017 apabila dibanding APBD 2016 mengalami kenaikan sebesar **Rp.149,654,973,199.31** atau naik **8.90%**,
3. Kenaikan PAD 2017 mempertimbangan realisasi PAD untuk tahun 2016 sampai dengan bulan Juni (semester I 2016) baru mencapai 41,84% atau sebesar



Rp.146,081,926,836.35, walaupun dari sisi perkembangan realisasi 2012-2015 dan target 2016 tumbuh rata rata 18,46%.

4. Karena seluruh belanja sudah maksimal dan kebijakan pemerintah pusat dalam menunda sebagian penyaluran DAU Provinsi Gorontalo Tahun 2016, maka tahun 2017 diperkirakan tidak akan terdapat SiLPA dengan jumlah yang signifikan yang bersumber dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU maupun belanja daerah.

3.2.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2017, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan Publik yang ditawarkan kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
- c. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;
- d. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama pendataan dan penagihan atas potensi dan objek pajak alat berat;
- e. Memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui pemberian insentif pembebasan BBN-KB dan denda pajak;
- f. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik;
- g. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
- h. Mengoptimalkan kinerja BUMD/perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- i. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi;
- j. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif;
- k. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan;



- l. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplier kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah;
- m. Mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif;
- n. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2017 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- 1) Penggalan potensi Pendapatan Daerah melalui penyusunan Database Potensi daerah;
- 2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
- 3) Peningkatan kualitas aparatur yang mengelola pendapatan daerah;
- 4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar SKPD penghasil;
- 5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
- 6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;
- 7) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai (SIPAMOR).
- 8) Pemantapan kelembagaan, dengan cara :
 - a) Mengintensifkan pendapatan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.



- b) Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan kepada pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk perikanan, pertanian dan perhubungan selain infrastruktur.
- c) Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah.
- d) Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

3.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.

Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan.



3.3.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai empat program utama pembangunan daerah yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan pada empat sektor yang menjadi fokus utama pembangunan daerah. Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai **belanja tidak langsung** berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada program prioritas yang direncanakan. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output dan outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2017 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang.



Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS dan honorarium non PNS.
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebagaimana RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017, mengacu kepada visi **"Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo"** dan program Kepala Daerah yang pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dititikberatkan pada sektor :
 - Pendidikan, diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar, menengah dan atas, serta memberikan subsidi pendidikan (pendidikan gratis) untuk memastikan anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh Desa dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai.
 - Kesehatan, diarahkan pada pemberian jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan di tingkat Desa.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur, diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi dan persampahan.
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
Program ini diprioritaskan pada pengembangan sektor pertanian secara menyeluruh, kehutanan, Industri dan perdagangan, pariwisata dan budaya serta



usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

Berdasarkan arah kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2016 tersebut serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2017, yaitu **"Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Serta Peningkatan SDM Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan"**.

Selain itu kebijakan perencanaan belanja, tidak terlepas dengan pengaruh perkembangan realisasi anggaran belanja selama lima tahun terakhir (TA 2012-2016), realisasi belanja semester I Tahun 2016 yang dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.14
Ringkasan Perkembangan Realisasi Belanja APBD
2012-2016

No	Uraian	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	% rata2
	Belanja	885,021,460,786.00	1,050,816,776,902.00	18.73	1,204,490,038,448.55	14.62	1,407,931,048,448.00	16.89	1,693,867,011,320.69	20.31	17.64
A	Belanja Tdk Lgag	465,099,947,678.00	506,042,855,233.00	8.80	558,125,329,827.55	10.29	620,104,488,393.00	11.10	805,470,914,260.82	29.89	16.02
1	Belanja Pegawai	209,009,424,239.00	224,332,889,461.00	7.20	239,795,986,650.55	6.89	269,685,979,652.00	12.46	305,120,707,005.50	13.14	9.95
2	Belanja Subsidi	1,506,680,000.00	-	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Hibah	162,889,988,167.00	174,421,289,750.00	(6.32)	181,553,544,216.00	5.91	204,002,311,020.00	12.36	325,973,400,000.00	59.79	17.94
4	Belanja Bantuan Sosial	39,250,000.00	556,000,000.00	1315.56	1,479,000,000.00	166.01	3,006,000,000.00	103.25	2,467,500,000.00	(7.25)	392.14
5	Belanja Bagi Hasil Kpd Pr	55,162,732,653.00	78,238,394,300.00	41.78	112,638,501,788.00	43.97	122,823,973,654.00	9.04	144,732,721,915.29	17.84	28.16
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota	16,088,905,599.00	31,681,408,722.00	93.66	2180,082,173.00	(30.68)	18,35,076,567.00	(16.04)	22,166,585,225.00	22.17	17.28
7	Belanja Tak Terduga	133,987,000.00	335,873,000.00	73.14	1058,215,000.00	215.06	2,451,047,500.00	131.62	5,000,000,000.00	103.99	130.96
B.	Belanja Langsung	419,921,213,108.00	544,773,921,669.00	29.73	646,364,708,321.00	18.65	787,826,559,755.00	21.89	888,396,097,059.87	12.77	20.76
	Belanja Pegawai	32,854,601,863.00	36,434,670,312.00	10.90	35,278,162,987.00	(3.17)	52,049,233,531.00	47.54	49,765,303,800.00	(4.39)	12.72
	Belanja Barang dan Jasa	248,669,037,594.00	323,378,711,754.00	30.04	378,661,812,137.00	17.10	59,533,251,205.00	3.40	459,814,290,450.87	17.46	17.00
	Belanja Modal	138,397,573,651.00	164,959,339,603.00	33.64	232,424,743,197.00	25.66	344,244,075,019.00	48.11	378,716,502,809.00	10.01	29.36

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah



Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Belanja Semester I Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		%
		SEMESTER I 2016	LEBIH / (KURANG)	
BELANJA	1,693,867,011,320.69	695,015,954,173.70	(998,851,057,146.99)	41.03
BELANJA TIDAK LANGSUNG	805,470,914,260.82	372,187,389,910.00	(433,283,524,350.82)	46.21
Belanja Pegawai	305,120,707,120.53	166,540,657,560.00	(138,580,049,560.53)	54.58
Belanja Hibah	325,973,400,000.00	152,709,118,625.00	(173,264,281,375.00)	46.85
Belanja Bantuan Sosial	2,487,500,000.00	926,500,000.00	(1,561,000,000.00)	37.25
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	144,732,721,915.29	47,340,013,823.00	(97,392,708,092.29)	32.71
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	22,156,585,225.00	3,230,197,402.00	(18,926,387,823.00)	14.58
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	1,440,902,500.00	(3,559,097,500.00)	28.82
BELANJA LANGSUNG	888,396,097,059.87	322,828,564,263.70	(565,567,532,796.17)	36.34
Belanja Pegawai	49,765,303,800.00	21,761,497,181.00	(28,003,806,619.00)	43.73
Belanja Barang dan Jasa	459,914,290,450.87	188,556,504,845.70	(271,357,785,605.17)	41.00
Belanja Modal	378,716,502,809.00	112,510,562,237.00	(266,205,940,572.00)	29.71

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan kebijakan belanja dan perkembangan realisasi belanja seperti dijelaskan diatas, dibawah ini dirumuskan ringkasan kebijakan umum belanja pada APBD TA 2017 disertai perbandingan dengan APBD TA 2016 disajikan pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16
Perbandingan Kebijakan Belanja Pada APBD TA. 2016 dan KU-APBD TA. 2017

URAIAN	APBD 2016 (RP)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KU-APBD 2017	% TTL BEL
BELANJA	1,693,867,011,320.69	137,825,817,693.31	8.14	1,831,692,829,014.00	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	805,470,914,260.82	235,057,469,968.05	29.18	1,040,528,384,228.87	56.81
Belanja Pegawai	305,120,707,120.53	272,311,239,039.54	89.25	577,431,946,160.07	
Belanja Hibah	325,973,400,000.00	(29,939,367,500.00)	(9.18)	296,034,032,500.00	
Belanja Bantuan Sosial	2,487,500,000.00	(384,500,000.00)	(15.46)	2,103,000,000.00	
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah	144,732,721,915.29	3,902,300,779.51	2.70	148,635,022,694.80	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	22,156,585,225.00	(10,832,202,351.00)	(48.89)	11,324,382,874.00	
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00	
BELANJA LANGSUNG	888,396,097,059.87	(97,231,652,274.74)	(10.94)	791,164,444,785.13	43.19
Belanja Pegawai	49,765,303,800.00	20,441,269,200.00	41.08	70,206,573,000.00	
Belanja Barang dan Jasa	459,914,290,450.87	(9,829,798,313.74)	(2.14)	450,084,492,137.13	
Belanja Modal	378,716,502,809.00	(107,843,123,161.00)	(28.48)	270,873,379,648.00	

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah

3.3.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga)

Kebijakan belanja tidak langsung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD TA. 2017. Beberapa hal penting terkait dengan penganggaran belanja tidak langsung



sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 31 Tahun 2016 oleh Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bagi pegawai ASN.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBN Tahun 2017 daerah dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.



10. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan setelah memenuhi belanja untuk urusan yang wajib dilaksanakan khususnya program prioritas daerah yang disinkronkan dengan program prioritas nasional.
11. Dukungan pendanaan operasional yang bersumber dari APBD kepada Ormas (termasuk organisasi keagamaan) melalui hibah.
12. Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi KDH/WKDH, DPRD dan PNSD.
13. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017.
14. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan setelah memenuhi belanja untuk urusan yang wajib dilaksanakan khususnya program prioritas daerah yang disinkronkan dengan program prioritas nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan belanja tidak langsung Provinsi Gorontalo pada KU-APBD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai terutama dipengaruhi oleh gaji PNS yang dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dan berdasar pada realisasi semester I 2016 dan kebijakan belanja pegawai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk Tahun 2017, khususnya untuk gaji guru SMA/SMK dan urusan lainnya. Berdasarkan hal tersebut bila dibandingkan dengan belanja pegawai pada APBD Tahun 2016 (induk) yang berjumlah Rp.305,120,707,120.53 maka, kenaikan belanja pegawai adalah sebesar Rp.272,311,239,039.54, sehingga pada KU-APBD 2017 belanja pegawai diprediksi sebesar Rp.577,431,946,160.07.
- b) Belanja Hibah, disesuaikan menjadi sebesar Rp.296,034,032,500.00 atau turun sebesar Rp.29,939,367,500.00 (9.18%) dari pagu yang dianggarkan dalam APBD tahun 2016 sebesar Rp.325,973,400,000.00. Penyesuaian tersebut berasal dari hibah dana BOS, Hibah kepada Masyarakat, hibah KPU dan BAWASLU sebagian telah dianggarkan tahun sebelumnya, hibah untuk KONI turun dibanding tahun sebelumnya karena pelaksanaan PON telah selesai (Tahun 2016), untuk Pengamanan PILKADA masih membutuhkan penambahan belanja, serta hibah untuk POLIGON.
- c) Belanja bantuan sosial didasarkan pada Permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012 dan Permendagri nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang mengatur antara lain mengenai kriteria penerimaan bantuan sosial yang lebih selektif dari pada peraturan sebelumnya.
Dalam R-APBD Tahun 2017 alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp.2,103,000,000.00. Kebijakan belanja bansos sesuai ketentuan akan dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan



menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- d) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/kota, menjadi sebesar Rp.148,635,022,694.80 yang disesuaikan dengan kenaikan PAD dari PKB sebagaimana telah dijelaskan diatas.
- e) Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, di dalam KU-APBD tahun anggaran 2017 menjadi sebesar Rp.11,324,382,874.00. Kebijakan belanja bantuan keuangan tetap didasarkan pada Permendagri No.31 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kebijakan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu untuk TKD Camat dan Lurah, bantuan parpol bantuan keuangan khusus serta bantuan keuangan desa tertinggal.
- f) Belanja Tidak Terduga, sama dengan APBD Tahun 2016 yaitu sebesar Rp.5,000,000,000.00. Kebijakan belanja tidak terduga akan diarahkan/terutama untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.3.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kebijakan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2017 untuk belanja langsung sebesar **Rp.791,164,444,785.13**, merupakan alokasi belanja program-program daerah berdasarkan hasil sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah tahun 2017.
- 2) Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan medical check up (1 orang istri/suami dan 2 orang anak).

Disamping hal tersebut kebijakan belanja SKPD juga mengacu pada kebijakan belanja langsung pada Permendagri No 31 Tahun 2016, dengan beberapa hal penting seperti yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 31 Tahun 2016 oleh Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.

1. Honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, serta benar-benar memiliki



- peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pemberian TP-PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri;
 3. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU 23/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 32/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14/2016, serta peraturan per-UU-an lain dibidang hibah dan bantuan sosial;
 4. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
 5. Pemda harus konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan 20%, kesehatan 10% dan belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat ;
 6. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reuiu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reuiu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
 7. Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah dan DPRD.
 8. Penguatan pembinaan SAMSAT Pusat dan Provinsi melalui dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan oleh pemerintah daerah.
 9. Penguatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh pemda.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan tahun 2016 sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2016, difokuskan pada upaya Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Serta Peningkatan SDM Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan. Pembangunan tahun 2017 sebagai tahun terakhir RPJMD 2012-2017 dirumuskan sebagai keberlanjutan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2016, hanya dilakukan penyesuaian terhadap SKPD pelaksana program kegiatan berdasarkan perubahan Organisasi Tata Kerja dan perubahan kewenangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012 - 2017 yang mengusung pencapaian Visi: *“Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo”*

Pernyataan visi di atas mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu :

Mewujudkan Percepatan Pembangunan di berbagai bidang

Aspek ini merupakan target kinerja aksi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam konteks pemerataan melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada. Artinya, semua pihak harus lebih berinovasi, sekaligus membangun sinkronisasi antar daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan

Merupakan suatu tindakan yang mengedepankan produktivitas dan nilai tambah bagi masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah, meningkatkan laju investasi, mengurangi pengangguran, serta peningkatan infrastruktur ekonomi. Semua ini diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Visi RPJMD 2012 - 2017 Perwujudan visi RPJMD adalah :

1. Peningkatan Angka IPM (HDI)
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
3. Pemerataan Pendapatan (Indeks Gini)
4. Penurunan Angka Kemiskinan
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

Untuk pencapaian visi tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan Misi sebagai berikut :

Misi I, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan,



sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.

Misi II, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan.

Misi III, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau limboto sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan DAS sebagai wujud memelihara lingkungan (pro Green).

Misi IV, mengembangkan nilai-nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan adat istiadat. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Misi V, Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi Pertama

Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan.

Misi pertama ini juga termasuk menindaklanjuti agenda sektor unggulan daerah berupa Konsep Agropolitan dimana jagung sebagai "Branding Gorontalo" yang di integrasikan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi, sekaligus meningkatkan manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola One Village One Production, serta pengembangan intergrate farming sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan dan kemudahan dalam akses permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit (*pro-poor*).



Misi Kedua

Ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan "Gratis" terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang di istilahkan Universal Total Coverage. Misi kedua ini memiliki peran strategis untuk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (*pro-poor*).

Misi Ketiga

Ditujukan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai, waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (DAS) serta waduk harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungannya (*pro-green*).

Misi Keempat

Ditujukan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai Agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai Adat Istiadat, serta melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Misi Kelima

Ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif otonomi daerah dan Good Governance termasuk mendorong penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah.

Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2012 - 2017 dan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2016, dengan demikian tema RKPD tahun 2017 dirancangan sebagai berikut:

"Terus Mendorong Peningkatan SDM dan Memacu Pembangunan Infrastruktur Daerah, Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan"

Unsur - unsur tema RKPD 2017 adalah :	
1. Peningkatan Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan dan menciptakan SDM yang berdaya saing.
2. Memacu Pembangunan Infrastruktur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur dasar dan strategis • Penyerapan tenaga kerja
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan • Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran • Peningkatan kesejahteraan sosial lainnya

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam percepatan pencapaian visi dan misi RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 - 2017

Visi : "Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo"		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Pertama : Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.2. Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya.3. Meningkatnya pendapatan perkapita yang berkeadilan.4. Terciptanya Laju Investasi.5. Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM.6. Meningkatnya kinerja ekspor komoditi unggulan daerah diversikasi Komoditi lainnya.7. Meningkatnya lapangan kerja.
	Menyediakan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Infrastruktur Daerah.2. Meningkatnya jalan akses ke pusat-pusat produksi.3. Membangun Kemandirian Desa.4. Meningkat & berkembangnya Infrastruktur Desa.
Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemeruan mutu kwalitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas pendidikan.2. Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini.3. Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C.4. Mengembangkan Pendidikan Non Formal.
	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular.3. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial



		<p>akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.</p> <p>4. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga.</p> <p>5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).</p> <p>6. Seluruh kabupaten/Kota melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM)</p>
<p>Misi Ketiga : Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat.</p>	<p>Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.</p> <p>2. Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan.</p> <p>3. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/KAPET Gopandang.</p> <p>4. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan.</p> <p>5. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>6. Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi.</p>
<p>Misi Keempat : Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan</p>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p>	<p>1. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.</p>
	<p>Memelihara keragaman Agama dan Budaya</p>	<p>1. Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan.</p> <p>2. Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah.</p>
	<p>Meningkatkan peran perempuan dan kualitas hidup anak</p>	<p>1. Meningkatnya nilai indikator kualitas hidup perempuan.</p> <p>2. Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi.</p> <p>3. Menurunnya angka tindak kekerasan & diskriminasi terhadap Perempuan & Anak.</p>



<p>Misi Kelima : Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.</p>	<p>Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat. 2. Terwujudnya sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo.
	<p>Pengentasan Kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya persentase masyarakat miskin 2. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dari tujuan dan sasaran tersebut, maka pembangunan daerah diprioritaskan pada :

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dititikberatkan pada sektor

Pendidikan, diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar, menengah dan atas, serta memberikan subsidi pendidikan (pendidikan gratis) untuk memastikan anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh Desa dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai.

Kesehatan, diarahkan pada pemberian jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan di tingkat Desa.

Percepatan pembangunan infrastruktur

Diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih, sanitasi dan persampahan.

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Diprioritaskan pada pengembangan sektor pertanian secara menyeluruh, kehutanan, Industri dan perdagangan, pariwisata dan budaya serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

4.2.1 Isu Strategis

Untuk lebih memperdalam fokus penjabaran pembangunan, maka berdasarkan prioritas pembangunan daerah dilakukan kajian dan analisa berdasarkan kondisi dan permasalahan daerah terkini yang kemudian ditetapkan sebagai Isu strategis dalam RKPD. Isu strategis



ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan yang berfungsi sebagai pengungkit sehingga penanganannya dapat tuntas. Terkait hal tersebut, maka langkah-langkah strategis yang didorong dalam pembangunan daerah adalah :

- | | |
|---|--|
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan, | Akan dicapai melalui peningkatan Kerjasama investasi, Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta murni, Perdagangan Antar Pulau, Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, Mengembangkan Pariwisata Daerah, Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi, Menurunkan angka pengangguran terbuka, Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja. |
| Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah | Akan dicapai melalui (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara, (b) Meningkatkan Pengembangan Kawasan Strategis, (c) Percepatan Pembangunan Daerah berbasis Desa dan (d) Pembangunan Infrastruktur Desa. |
| Meningkatkan kualitas Pendidikan | Akan diupayakan dengan (a) Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD, (b) Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik, (c) pendidikan gratis, (d) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, (e) mendorong peningkatan mutu Pendidikan, (f) Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal), (g) Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul, (h) Peningkatan sarana prasarana pendidikan, (i) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi, (j) Peningkatan status sekolah (SNP), dan (k) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesetaraan di semua kab./Kota serta. |
| Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat | Akan dilakukan dengan (a) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, (b) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan, (c) Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (d) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam |



pembangunan kesehatan, (e) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu, (f) Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh

diupayakan dengan (a) meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan (b) Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi.

Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam

Dilakukan dengan (a) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, (b) Rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis, (c) Perbaikan sistem drainase, (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota, Peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, dan pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana.

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya (PMKS)

Dilakukan dengan (a) Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara adil dan merata dan (b) Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengembangan Budaya daerah

Dicapai melalui peningkatan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Meningkatkan peran perempuan dan kualitas hidup anak

Diupayakan dengan cara (a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM perempuan, dan (b) Menurunkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pengembangan Pemuda dan Olahraga

Dilakukan dengan (a) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga, (b) Meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, (c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, (d) Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga, (e) Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM keolahragaan, (f) Meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan dan meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.



- Pengembangan Wisata** akan dicapai dengan (a) Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata, (b) Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata, (c) Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata.
- Pengembangan UMKM dan Koperasi** akan di lakukan dengan (a) Meningkatkan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, (b) Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UMKM, dan (c) Peningkatan fungsi lembaga pemberdayaan Koperasi UMKM.
- Mengembangkan Good Governance & Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah** akan diupayakan melalui Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan (a) Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah, (b) Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah (c) Peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, (d) Peningkatan kelembagaan perangkat pemerintahan daerah, (e) Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas, (f) Meningkatkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, (g) Peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, dan (h) Belum optimalnya Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- Penanggulangan Kemiskinan** akan diupayakan melalui, (a) pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin, dan (b) Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui pola bantuan sosial dan ekonomi.

Dengan memperhatikan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMD 2012 – 2017, kemudian penetapan tema pembangunan yang dituangkan lebih lanjut dalam 4 (empat) prioritas, maka untuk tahun 2017 arahan pembangunan Provinsi Gorontalo masih tetap ditekankan pada penanganan isu - isu strategis tersebut diatas.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi arahan dan fokus pembangunan dikelompokkan menjadi Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat SKPD. Program unggulan merupakan program Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat SKPD



berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan di tahun 2017 dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian utama adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Program Prioritas Provinsi Tahun 2017

Isu Strategis	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
Isu Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan		
1.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Badan Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
3.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
4.	Program Pengembangan KUKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
5.	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
6.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Badan Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi
7.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Badan Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi
8.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Badan Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Badan Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi
10.	Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah	Badan Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi
Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah		
1.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	DINAS PU & Tata Ruang
2.	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	DINAS PU & Tata Ruang
3.	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan jembatan	DINAS PU & Tata Ruang
4.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	DINAS PU & Tata Ruang
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DINAS PU & Tata Ruang
6.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
7.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
8.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan
9.	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan & Capil
10.	Program Pembangunan Desa Tertinggal	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan & Capil
11.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DINAS PU & Tata Ruang
12.	Program Pemanfaatan Ruang	DINAS PU & Tata Ruang



13.	Program Pembebasan Tanah	DINAS PU & Tata Ruang
Isu Peningkatan akses, mutu & sarana prasarana pendidikan		
1.	Program Perluasan Akses PAUDNI	Dinas DIKBUDPORA
2.	Program Peningkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD	Dinas DIKBUDPORA
3.	Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD	Dinas DIKBUDPORA
4.	Program Perluasan Akses Dikmen	Dinas DIKBUDPORA
5.	Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen	Dinas DIKBUDPORA
6.	Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikmen	Dinas DIKBUDPORA
7.	Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)	Dinas DIKBUDPORA
8.	Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK	Dinas DIKBUDPORA
9.	Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013	Dinas DIKBUDPORA
10.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK	Dinas DIKBUDPORA
11.	Program Kepengawasan Pendidikan	Dinas DIKBUDPORA
12.	Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Dinas DIKBUDPORA
13.	Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB)	Dinas DIKBUDPORA
14.	Program Penyelenggaraan Ujian Nasional	Dinas DIKBUDPORA
15.	Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB)	Dinas DIKBUDPORA
16.	Program Peningkatan Tata kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)	Dinas DIKBUDPORA
17.	Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal	Dinas DIKBUDPORA
18.	Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) / Pendidikan Gratis	Dinas DIKBUDPORA
19.	Program Pengembangan Politeknik Gorontalo	Dinas DIKBUDPORA
20.	Program Perluasan Akses Pendidikan dasar	Dinas DIKBUDPORA
21.	Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas	Dinas DIKBUDPORA
22.	Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikdas	Dinas DIKBUDPORA
Isu Peningkatan akses, layanan dan sarana prasarana kesehatan		
1.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
2.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Dinas Kesehatan
3.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
4.	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
7.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
8.	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	Dinas Kesehatan
9.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan
10.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
11.	Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESTA)	Dinas Kesehatan



12.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
13.	Program Penunjang Laboratorium Kesehatan Provinsi	UPTD Labkesda
14.	Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit	RSU Provinsi
15.	Program Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah sakit	RSU Provinsi
16.	Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	RSU Provinsi
Isu Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh dan Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi serta penguatan kedaulatan pangan		
1.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Dinas Pertanian
2.	Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian	Dinas Pertanian
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
4.	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura	UPTD BBTPH
5.	Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK)	UPTD BBTPH
6.	Program Perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura	UPTD BPTPH
7.	Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK)	UPTD BPTPH
8.	Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	UPTD BPSB-TPH
9.	Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
10.	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Dinas Pangan
11.	Program pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Dinas Pangan
12.	Program Pengkajian dan Informasi	Dinas Pangan
13.	Program Maize Centre	Dinas Pangan
14.	Program peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging	Dinas Pertanian
15.	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian
16.	Program Pengendalian OPT tanaman perkebunan	Dinas Pertanian
17.	Program penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan	Dinas Pertanian
18.	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Dinas Pertanian
19.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dinas Pertanian
20.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Dinas Pertanian
21.	Program Penerapan Teknologi Peternakan	UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu
22.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (DAK)	UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu
23.	Program Perbenihan dan Perlindungan tanaman perkebunan	UPTD Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan



24.	Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
25.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
26.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
27.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
28.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Kelautan
29.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Perikanan dan Kelautan
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
31.	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
32.	Program pelayanan sarana produksi Perikanan	UPTD Taksi Mina Bahari
33.	Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	UPTD – LPPMHP
34.	Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis	UPTD – BPBIAT
35.	Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis	UPTD – BPBILP
36.	Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan	Dinas Pertanian
37.	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Dinas Pertanian
38.	Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Dinas Pertanian
Isu Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam		
1.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
2.	Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dan masyarakat dim pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
4.	Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DINAS PU & Tata Ruang
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	UPTD TPA TALUMELITO
7.	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
8.	Program Pengendali Banjir	DINAS PU & Tata Ruang
9.	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	BPPD
10.	Program Kedaruratan Dan Logistik	BPPD
11.	Program Rehabilitasi & Rekonstruksi	BPPD
Isu Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan



		Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Isu Pengembangan budaya dan destinasi wisata		
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas DIKBUDPORA
2.	Program penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan	Dinas DIKBUDPORA
3.	Program Pemeliharaan Sejarah dan cagar budaya Gorontalo	Dinas DIKBUDPORA
4.	Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo	Dinas DIKBUDPORA
5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
7.	Program Pengembangan seni budaya daerah	Dinas Pariwisata
8.	Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat & Budaya	Biro Kesra
Isu Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
1.	Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Biro Kesra
2.	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Biro Kesra
Isu Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga		
1.	Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional	DIKBUDPORA
2.	Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	DIKBUDPORA
3.	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda	DIKBUDPORA
4.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DIKBUDPORA
Isu Pengembangan UMKM dan Koperasi		
1.	Program Pengembangan KUKM	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
2.	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
3.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
4.	Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang	UPTD – BPSMB
Isu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government)		
1.	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
2.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Badan Keuangan Daerah
3.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
4.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbangpol
5.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
6.	Peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat	Kesbangpol
7.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	Kesbangpol
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
9.	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	BAPPPEDA
10.	Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	BAPPPEDA



11.	Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup	BAPPEDA
12.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Biro Pemerintahan & Otda
13.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum & Organisasi
14.	Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biro Hukum & Organisasi
15.	Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan & Ketatalaksanaan	Biro Hukum & Organisasi
16.	Program Fasilitas Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biro Hukum & Organisasi
17.	Program Fasilitas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Biro Hukum & Organisasi
18.	Program Pengendalian Pembangunan	Biro P2 & Pengadaan
19.	Program Pengendalian Ekonomi	Biro P2 & Pengadaan
20.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
21.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	Sekretariat DPRD
22.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
23.	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan	Inspektorat
24.	Program Pendidikan Kedinasan	Badan Kepegawaian
25.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian
26.	Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian
27.	Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitas Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI	Badan Kepegawaian
28.	Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Satpol PP, Linmas & Kebakaran
29.	Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum	Satpol PP, Linmas & Kebakaran
30.	Program Riset Pengembangan Daerah	BAPPEDA
31.	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	BAPPEDA
32.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Biro Umum, Biro Pemerintahan, Badan Penghubung & Biro Humas Protokol
33.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Prov. Gorontalo	Biro Umum
34.	Program Penataan Wilayah Provinsi	Biro Pemerintahan & Otda
35.	Program Kerjasama Informasi dgn Mas Media	Biro Humas dan Protokol, 'Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
36.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	'Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
37.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Supremasi	'Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
38.	Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
39.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
40.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41.	Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
42.	Program Pengembangan Data dan Informasi	'Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Isu Penanggulangan Kemiskinan		
1.	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Capil &



		Dinas Perumahan dan Pemukiman
2.	Program Pembangunan Desa Tertinggal	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Capil
3.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kel	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Capil
4.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Capil
5.	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Capil
6.	Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
7.	Program pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Badan Penanaman Modal ESDM & Transmigrasi
8.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	UPTD Bapelkesman

Selain untuk mempercepat pencapaian sasaran utama pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017, program prioritas daerah Provinsi Gorontalo juga mendukung sasaran pembangunan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 juga mendukung prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Sebagaimana persandingan yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Program Prioritas Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi
1.	Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perluasan Akses PAUDNI 2. Program Peningkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD 3. Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD 4. Program Perluasan Akses Dikmen 5. Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen 6. Program Peningkatan Tata kelola/Manajemen Dikmen 7. Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) 8. Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK 9. Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 10. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK 11. Program Kepengawasan Pendidikan 12. Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 13. Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB) 14. Program Penyelenggaraan Ujian Nasional 15. Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) 16. Program Peningkatan Tata kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) 17. Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal 18. Program Pendidikan Untuk Rakyat



		(PRODIRA) / Pendidikan Gratis 19. Program Pengembangan Politeknik Gorontalo 20. Program Perluasan Akses Pendidikan dasar 21. Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas 22. Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikdas
2.	Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Program Pengawasan Obat dan Makanan 7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8. Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular 9. Program Pembinaan Upaya Kesehatan 10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 11. Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESTA) 12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13. Program Penunjang Laboratorium Kesehatan Provinsi 14. Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit 15. Program Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah sakit 16. Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
3.	Perumahan Rakyat	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat: Pembangunan Rumah Layak Huni
4.	Revolusi Karakter Bangsa	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.	Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat restorasi sosial	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan 3. Program Pemeliharaan Sejarah dan cagar budaya Gorontalo 4. Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6. Program Pengembangan seni budaya daerah 7. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat & Budaya 8. Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional 9. Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 10. Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda 11. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
6.	Revolusi Mental	1. Program Pendidikan Politik Masyarakat 2. Program Pengembangan Wawasan



		<p>Kebangsaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat 4. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 7. Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 8. Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan & Ketatalaksanaan 9. Program Fasilitasi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 11. Program Pembangunan Desa Tertinggal 12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kel 13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 14. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 15. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 16. Program pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi 17. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 18. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi: Penyelenggaraan PTSP 19. Program Pembangunan Desa Tertinggal 20. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kel 21. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 22. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 23. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 24. Program pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi 25. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 26. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 27. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 28. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 29. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan 30. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
7.	Kedaulatan Pangan	<p>Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian 2. Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian



		<ol style="list-style-type: none">3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian4. Program Pengelolaan Sistem Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura5. Program Perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura6. Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura7. Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan8. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan9. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan10. Program peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging11. Program penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan12. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan13. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap15. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir16. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
8.	Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
9.	Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan4. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan5. Program pelayanan sarana produksi Perikanan6. Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan7. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
10.	Industri	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
11.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

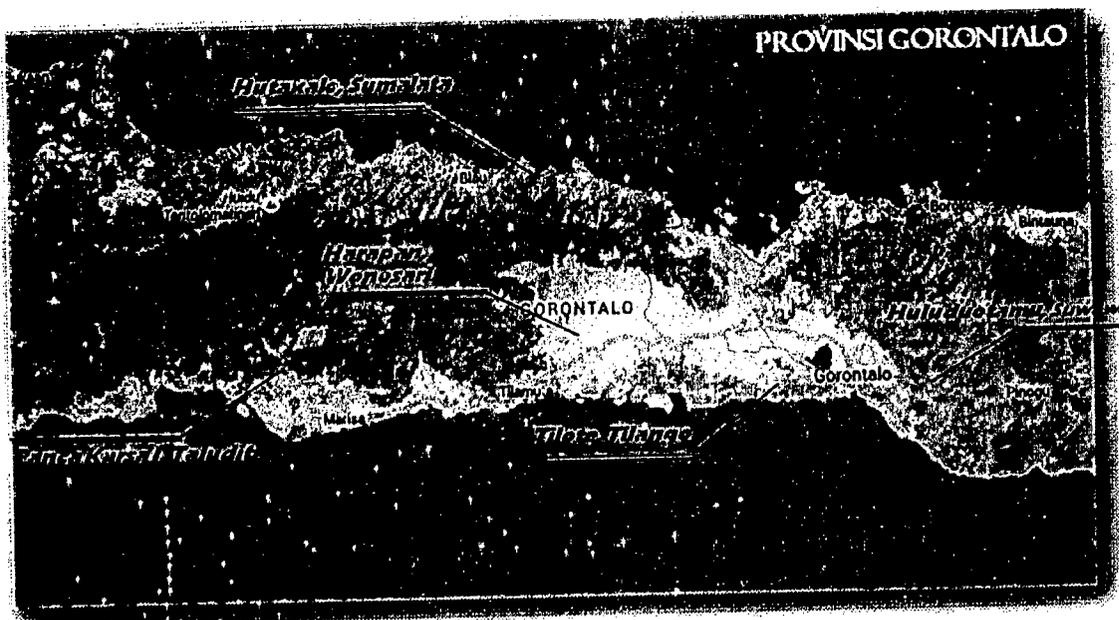
		<ol style="list-style-type: none">2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata3. Program Pengembangan seni budaya daerah4. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat & Budaya
12.	Inovasi dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Politeknik Gorontalo2. Program Pengkajian dan Informasi: Ketahanan pangan3. Program Penerapan Teknologi Peternakan4. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

4.2.3. Program Pembangunan Terintegrasi

Dalam percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan dirumuskan skema perencanaan pembangunan melalui program pengembangan kawasan terpadu yang dilakukan di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo. Program pengembangan kawasan pertanian terpadu tersebut ditujukan untuk membangun paradigma baru dari yang selama ini cenderung sektoral dirubah ke pembangunan secara terintegrasi berbasis potensi wilayah serta penguatan local resource and community development dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas dan pendapatan petani.

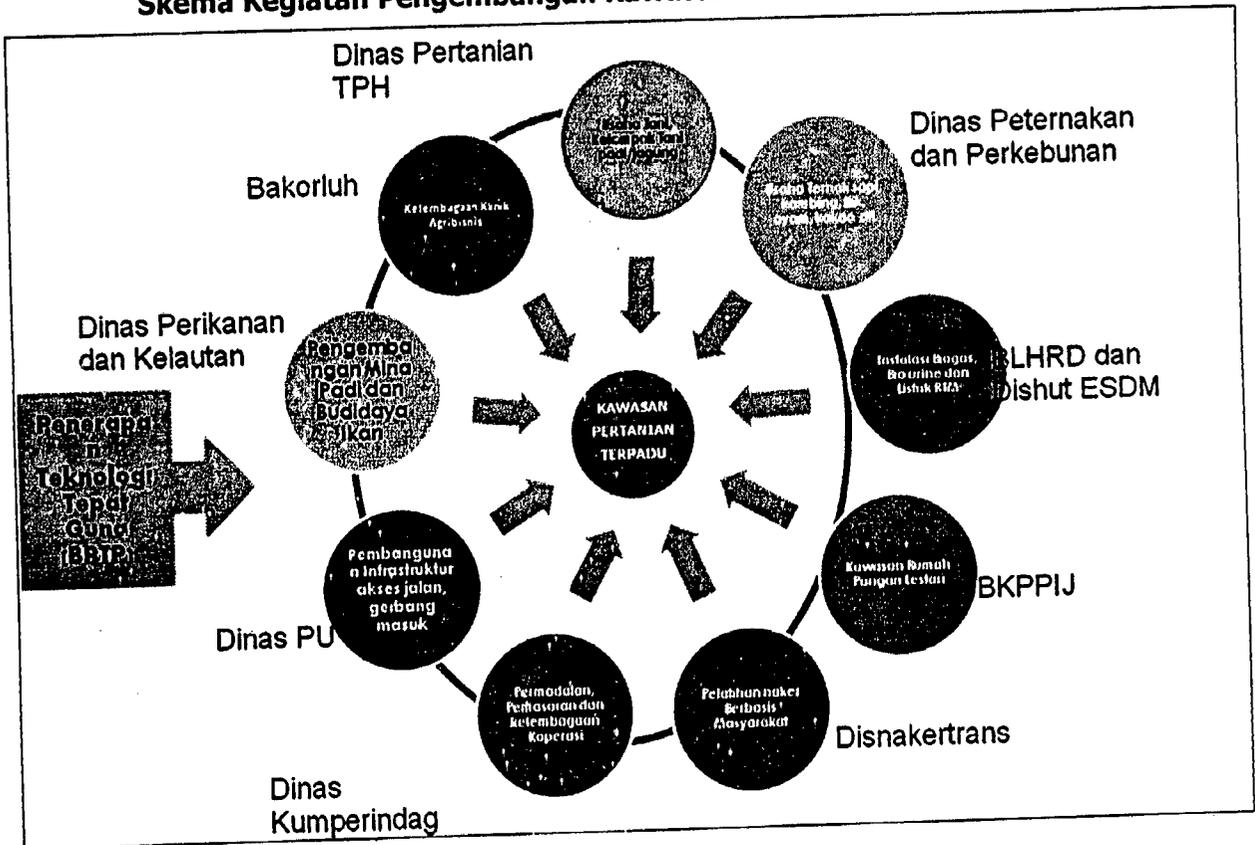
Gambar 4.1

Penetapan 5 Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu



Pengembangan kawasan pertanian terpadu diintervensi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo.

Gambar 4.2
Skema Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu



4.2.4. Sasaran Dan Arah Kebijakan Pembangunan 2017

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo di tahun 2017 adalah keberlanjutan tahun sebelumnya sebagaimana sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD 2012 - 2017, sebagai berikut :

Sasaran Pertama, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;

Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan; Terciptanya Laju Investasi; Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM; dan Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya.

Arah kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- Mengupayakan iklim investasi yang kondusif;
- Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan investasi;
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi;
- Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional;
- Menciptakan sistem kemudahan investasi;
- Mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa antar pulau dan ekspor;

- Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah;
- Mendorong peningkatan APBD;
- Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan serta diprioritaskan pada objek wisata Olele dan Botutonuo;
- Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi;
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pengembangan SDM.

Sasaran Kedua, Meningkatnya lapangan kerja.

- Arah kebijakan yang diterapkan**
- Dengan mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja; dan
 - Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru.

Sasaran Ketiga, Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah; Meningkat dan berkembangnya jalan akses ke pusat-pusat produksi pertanian; dan Meningkat dan berkembangnya infrastruktur Desa,

- arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah :**
- Membangun Jalan, Jembatan, Irigasi, Waduk;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - Mengupayakan pengembangan wilayah dan kawasan strategis cepat tumbuh;
 - Memfasilitasi percepatan pembangunan di desa;

Sasaran Keempat, Meningkatnya kualitas pendidikan; Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini; Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C; dan Mengembangkan Pendidikan Non Formal.

- arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah :**
- Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD;
 - Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik;
 - Mengupayakan pendidikan gratis;
 - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - Mendorong peningkatan mutu Pendidikan;
 - Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal);
 - Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.
 - Peningkatan sarana prasaran pendidikan;
 - Peningkatan status sekolah (SSN, SBI dan ISO 9000);



- Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi;
- Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan;
- Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain;
- Mendorong percepatan alih status penergian melalui pemenuhan sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan akademik;
- Memperluas akses pendidikan;
- Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar;
- Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesetaraan di semua kab./Kota;
- Mendorong pelaksanaan kompetisi/lomba secara berjenjang; dan
- Mengoptimalkan peran PPLP/Training center

Sasaran Kelima, Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular; Meningkatnya anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin; Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga; Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB;
- Perbaikan gizi masyarakat;
- Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;
- Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gratis;
- Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
- Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana krisis kesehatan;
- Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;
- Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; dan



- Menyiapkan sarana prasarana kesehatan.

Sasaran Keenam, Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam; Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) bidang pertanian dan perikanan; Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan; Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup; Peningkatan pengelolaan dan hasil pertanian (Zero Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan;
- Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan hutan;
- Mengupayakan penyelamatan danau limboto;
- Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan;
- Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan;
- Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
- Meningkatnya indeks kualitas lingkungan;
- Meningkatnya kontrol terhadap pengeelolaan air sungai;
- Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH;
- Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pelestarian wilayah pesisir dan laut;
- Meningkatnya kapasitas masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan;
- Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup;
- Meningkatnya kualitas air sungai;
- Meningkatnya kualitas air danau limboto;
- Meningkatnya kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini dan laut sulawesi;
- Meningkatnya kualitas udara perkotaan;
- Meningkatnya kualitas emisi yang di hasilkan oleh industri;
- Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri;
- Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan;
- Pengelolaan sampah terpadu;

- Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
- Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan;
- Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan;

Sasaran Ketujuh, Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata;
- Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Sasaran Kedelapan, Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta pembinaan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan dan Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah.

Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan.
- Meningkatkan pagelaran-pagelaran seni budaya daerah, mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal.
- Mengembangkan serta mempertahankan tradisi dan budaya religi.

Sasaran Kesembilan, Meningkatnya indikator kualitas hidup perempuan; Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi serta menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Pencapaian sasaran ini akan diupayakan dengan.

Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- meningkatkan partisipasi perempuan dalam membangun daerah melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan;
- meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
- Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;



- Serta menyempurnakan perangkat hukum dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT.

Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat; Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota; dan Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo. Untuk mencapai sasaran ini arah kebijakan yang dilakukan adalah.

Arah kebijakan yang diterapkan adalah :

- Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah;
- Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah;
- Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air;
- Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial;
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN);
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
- Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat;
- Mengembangkan SDM aparatur Bidang Komunikasi dan Informasi;
- Meningkatkan Layanan Informasi Publik;
- Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah;
- Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim e-procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN;
- Pengendalian Pembangunan Pada Sektor Perekonomian;
- Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat; dan



- Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- Mendorong tersusunnya SPM pada seluruh SKPD untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Sasaran Kesebelas, Berkurangnya persentase masyarakat miskin.

- Arah kebijakan yang diterapkan adalah :**
- dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin; dan
 - Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

Arah kebijakan yang diterapkan tersebut, dimaksudkan untuk memfokuskan realisasi pencapaian sasaran yang di targetkan sebagaimana indikator kinerja pembangunan yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.4
Sasaran Strategis Pembangunan Daerah

No	Indikator	2012 Capaian	2013 Capaian	2014 Capaian	2015 Capaian	2016 Sasaran	2017 Sasaran
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi %	7,71	7,76	7,74	6,23	7.8 - 8.3	7.8 - 8.5
1.2	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	9.562.965	10.839.592	11.991.349	25.183.152,21	12.509.103	13.309.103
1.3	Laju inflasi provinsi (%)	4,08	5,84	6,14	4,30	4 - 7	4 - 7
1.4	IPM	71.28	64.70	65.17	-	73.26	73.76
1.5	Indeks Gini	0,44	0,43	0,40	0,45	0.36	0.34
1.6	Persentase penduduk miskin (%)	17,22	18,01	17,41	18,16	14,5 - 12	13 - 10
1.7	Angka pengangguran terbuka (%)	4,81	4,12	4,18	4,65	3.75	3.50
1.8	Indeks Pemberdayaan Gender	55,63%	56,02%	57,55%	-	59.72%	60.10%
1.9	Indeks Pembangunan Gender	61,08%	62,41%	64,35%	-	67.02%	68.05%
Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan						
1.1	Angka melek huruf	90,00	95,50 %	99,68 %	99,71 %	97,00 %	97.50%
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	8,5	8	9	9,04	8,93	9.06
1.3	Angka partisipasi kasar :						
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD	40	50,53	43,77	50,40	57.19	60.04
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	129,23	114,29	114,64	114,23	111,25	111.30
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	99,50	97,06	97,82	102,27	99,90	99.99
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	73,60	87,15	88,19	89,92	93,09	98.09
1.4	Angka Partisipasi Murni :						
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,00	96,37	100,97	100,81	98,25	98.50
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	75,00	71,95	73,06	77,10	94,40	95.00
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	56,40	64,75	65,87	71,34	76,05	83.05
2.	Kesehatan						
2.1	Angka usia harapan hidup	67,16	67	67,54	68,24	68.6	68.96
2.2	Persentase balita gizi buruk	4,26	2,32	2,32	3,57	3.34	3.11
Pelayanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan dasar :						



1.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah : (Jumlah Sekolah dibagi Jumlah Penduduk Usia Sekolah dikali 10.000)						
	- SD/MI	66.16	73.54	75.24	73.92	74.00	7.00
	- SMP/MTs	50.49	58.52	68.46	67,18	61.00	61.10
1.2	Penuntasan Buta Aksara	8.000	3.500	3.000	3.500	3500	1.661
1.3.	Fasilitas Pendidikan:						
1.3.1	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	80,57	84,43	93,30	85,00	86.00	87.00
1.3.2	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs. SMA/MA dan SMK kondisi bangunan baik :						
	- SMP/MTs	80,04	83,03	96,13	90,50	85.00	86.00
	- SMA/MA	87,33	85,60	90,28	91,22	91.00	92.00
	- SMK	83,05	88,63	93,73	94,52	87.00	88.00
1.4	Angka Putus Sekolah :						
	- Angka Putus Sekolah SD/MI	2,70	0,02	0,01	0,00	0,03	0,02
	- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	3,00	0,04	0,10	0,04	0,03	0,02
	- Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,86	0,12	0,14	0,01	0,02	0,01
1.5	Angka Kelulusan:						
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,00	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,50	89,58	99,96	100,00	99,70	100.00
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	91,92	94,24	99,88	100,00	98,50	100.00
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Ibu/100.000	219,5	251,7	194,8	253,4	102.0	102.0
2.2	Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup	14,8	13,3	13,9	11,5	12.8	12.3
2.3	Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup	11,8	10,00	9,8	8,0	8.90	8.2
2.4	Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup	20,9	15,35	15,3	12,7	16.20	15.0
2.5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
2.6	Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	16,5	10,87	10,86	24,5	13.56	13.00
2.7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	73,5	60,20	65	67,9	93.75	100.00
2.8	Rasio puskesmas. per satuan penduduk	0,08	0,08	0,08	0,08	0.09	0.10
2.9	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS/Jih Pddk x 1000)	0,007	0,010	0,011	0,011	0.007	0.007
2.10	Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk	0,66	0,84	0,71	0,85	1.00	1.00
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	74%	153,84%	110%	129%	94%	95%
2.12	Jumlah masyarakat miskin yang mendpt pelayanan kesehatan gratis	185.310	272.071	235.058	235.058	120,868	102.675
2.13	Jumlah Posyandu	1.279	1.233	1.304	1.537	1500	1562
2.14	Rasio posyandu per 100 balita	11,46	49,24	14,58	11,28	12.28	12.50
2.15	Rasio Pustu per 1.000 penduduk	0,24	0,22	0,21	0,21	0.26	0.27
2.16	Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat	53,0	59	42,50	57	69.56	70.0
2.17	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0,25	0,24	0,24	0,16	0.29	0.30
2.18	Rasio Dokter gigi per satuan penduduk	0,02	0,02	0,04	0,02	0.04	0.04
2.19	Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk	0,04	0,04	0,05	0,08	0.06	0.07
2.20	Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk	1,14	1,45	1,45	1,06	1.49	1.58
2.21	Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk	0,57	0,89	0,89	0,49	0.91	1.00
2.22	Rasio tenaga nutritionist per satuan	0,25	0,22	0,22	0,15	0.33	0.35



	penduduk						
2.23	Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk	0,05	0,06	0,06	0,02	0,08	0,09
3.	Pekerjaan Umum						
3.1	Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yg dibangun & yang ditingkatkan	-	7,3 Km	27,86 Km	9,97 Km	10 Km	10 Km
3.2	Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan	-	7,12 Km	5,7 Km	10,12 Km	5 Km	5 Km
3.3	Jumlah jembatan yang dibangun diruas jalan provinsi	1 Bh	1 Bh	1 Bh	-	2 Bh	2 Bh
3.4	Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Stategis provinsi	4 Bh	2 Bh	2 Bh	-	2 Bh	2 Bh
3.5	Jumlah Panjang pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi	14,7 Km	15,4 Km	8,14 Km	22,99 Km	10 Km	10 Km
3.6	Jumlah Panjang pemeliharaan rutin jalan Provinsi	52 Km	142 Km	209,41 Km	194,07 Km	249,04 Km	259,04 Km
3.7	Jumlah Panjang jembatan diruas jalan provinsi yang dipelihara	-	90 Meter	531,31 Meter	477,85 Meter	413 Meter	454 Meter
3.8	Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (meter)	10.287 M	10.500 M	9.911 M	11.791,50 M	12.000 M	13.000 M
3.9	Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi dan Pemeliharaan)	17.131 Ha	17.304,5 Ha	17.905 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha	17.131 Ha
3.10	Jumlah Panjang penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal Pertanian, persawahan, dan permukiman masyarakat	4.877 M	2.001,29 M	838,29 M	1.366 M	2.200 M	3.850 M
3.11	jumlah panjang Tanggul pengarnan pantai yang dibangun bagi permukiman masyarakat	465 M	92 Meter	98 M	176 M	300 M	300 M
3.12	Jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitas dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	16.545 SR (46 % Pencapaian MDG's)	379 SR	8.370 SR	25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)	25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)	25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)
3.13	Jumlah Bangunan penyediaan Sanitasi yang terbangun	143 Unit	52 Unit	64 Unit	28 Unit	120 Unit	120 Unit
3.14	Jumlah KK yang terlayani melalui penyediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah	-	-	4 kws	-	3 kws	3 Kws
3.15	Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran (13 Kantor dalam 1 kawasan)	-	4 Unit	4 Unit	3 Unit	2 Unit	-
3.16	Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4.	Perumahan						
4.1	Pengendalian banjir pada kawasan permukiman dan pertanian (ha)	10 Ha	340 ha	361 Ha	323 ha	300 ha	300 Ha
5	Penataan Ruang						
5.1	Tersedianya sarana dan prasarana pada kawasan strategis dan cepat tumbuh	4 Dok	4 unit, 3 Dok	6 unit, 2 Dok	5 unit	3 Unit	
6	Perencanaan Pembangunan						
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan Pergub	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
6.2	Terwujudnya sistem perencanaan yang didukung oleh dokumen perencanaan yang terintegrasi (RPJPD, RPJMD, Renstra, RPKD, Renja)	-	30%	50%	75%	100 %	100 %
7	Perhubungan						



7.1	Meningkatnya layanan angkutan transportasi	3 lintasan angkutan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)	2 terminal memenuhi kriteria tipe B	4 terminal memenuhi kriteria tipe B	5 terminal memenuhi kriteria tipe B	1 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pemadu moda	5 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria, Gtlo-Tapa-Dulamayo)
					3 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pemadu moda	5 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria, Gtlo-Tapa-Dulamayo)	
			3 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)	4 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu-Mulyonegoro-Satria)		
7.2	Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo	2500 ton/hr	3.420 ton/hr	3.526 ton/hr	4.419 ton/hr	2900 ton/hr	3000 ton/hr
8	Lingkungan Hidup						
8.1	Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (352 perusahaan)	18 usaha /kegiatan	18 usaha/ kegiatan	29 usaha/ kegiatan	22 usaha /kegiatan	24 usaha /kegiatan	26 usaha /kegiatan
8.2	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	76	95,01	97,43	72,09	87	90
8.3	Cakupan layanan Air bersih dan sanitasi	47 % / 53 %	52 %/ 57 %	42,5%/ 46,5%	66,47 %/ 54,96%	67% / 69 %	72%/73%
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
9.1	Menekan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak	17 Kasus	17 Kasus	30 Kasus	35 Kasus	30 Kasus	10 Kasus
9.2	Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tertangani dengan baik	152 Kasus	127	30 Kasus	52 Kasus	27 Kasus	17 Kasus
9.3	Implementasi Perencanaan Penganggaran yg responsip Gender	10%	25%	65%	75%	100%	100%
9.4	Partisipasi angkutan kerja perempuan	43,75%	39,02%	52,10%	41,20%	42.11%	43%
10	Sosial						
10.1	Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat	39 KK	1.144 KK	61 KK	99 KK	120 KK	130 KK
10.2	Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT	100 KK	4.120 KK	175 KK	170 KK	180 KK	200 KK
10.3	Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban	165 org	135 org	211 org	293 org	370 org	480 org



	penyalahgunaan napza & LKS						
10.4	Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan social	10 lembaga/ 64 org	3 lembaga/ 64 org	10 lembaga/ 64 org	41 lembaga/ 77 org	20 lembaga/ 64 org	22 lembaga/ 70 org
11	Ketenagakerjaan						
11.1	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja & Norma K3	300 Perusahaan	300 Perusahaan	420 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan
11.2	Jumlah Tenaga Kerja yang Diatih	200 Orang	160 Orang	526 Orang	500 Orang	560 Orang	600 orang
11.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.08%	62%	62,84%	63,65%	65.75%	66.10%
12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
12.1	Jumlah Koperasi (unit)	1.011 koperasi	1.067 koperasi	1.131 koperasi	1.183	1.105 koperasi	1.135 koperasi
12.2	Jumlah Koperasi Berkualitas (unit)	15 Koperasi	16 koperasi	15 koperasi	15 koperasi	20 koperasi	30 koperasi
12.3	Jumlah UMKM (unit)	61.887 UMKM	63.057 UMKM	70.590 UMKM	96.124 UMKM	68.829 UMKM	70.274 UMKM
12.4	Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (UMKM)	330 UMKM	1.366 UMKM	859 UMKM	1.240 UMKM	1.000 UMKM	1.200 UMKM
13	Penanaman Modal						
13.1	Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN	9 PMA/PMDN	11 PMA/PMDN	15 PMA/PMDN	15 PMA/PMDN	17 PMA/PMDN	19 PMA/PMDN
13.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.)	1,667 Trilyun	3,024 Trilyun	3,243 Trilyun	4,112 Trilyun	4,069 Trilyun	5,087 trilyun
13.3	Rasio daya serap tenaga kerja	7.714	9.642	18.003	15.066	18,833	23.541
14	Kebudayaan						
14.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	3	3
14.2	Jumlah Pagelaran Budaya	5	5	5	35	5	5
15	Kepemudaan dan Olahraga						
15.1	Jumlah organisasi pemuda	26	27	28	29	30	31
15.2	Jumlah organisasi olahraga	23	23	23	23	23	23
16	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
16.1	Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik baik PILEG, PILPRES maupun PILKADA	15.685 Orang	15.700 Org	790 Org	300 Orang	15.450 Orang	15.400 orang
16.2	Terlaksananya penguatan kerukunan umat beragama masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama	100 Orang	100 Orang	100 Orang	125 Orang	100 Orang	100 orang
16.3	Terlaksananya LSM/Ormas yang mendapat penguatan dan pendataan LSM/Ormas	75 LSM/Ormas	74 LSM /Ormas & 1 Database	60 LSM/Ormas & 1 Database	60 LSM/Ormas & 1 Database	75 LSM/Ormas & 1 Database	75 LSM/Ormas & 1 Database
17	Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian						
17.1	Terjadinya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian	5 kajian	4 kajian	5 kajian	2 kajian	7 kajian	8 kajian
17.2	Tersusunnya produk hukum daerah	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 15 Pergub / SK 603	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300	Perda 10 Pergub / SK 300
17.3	Unit Pelayanan Publik (UPP) SKPD yang telah menerapkan SOP, CPP/CBAN	4 UUP Prov	4 UUP Prov	9 UUP Prov	4 UUP Prov	4 UUP Prov	4 UUP Prov
17.4	Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (IKPK)	0	50	72,03	87,84	80	85
17.5	Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap SKPD	55%	55%	55%	80%	90%	100%
17.6	Persentase PNS yang menempati Jabatan sesuai Standar Kompetensi Jabatan	55%	55%	55%	80%	90%	100%
17.7	Lembaga diklat yang terakreditasi	Belum terakreditasi	Akreditas:	Akreditas:	Akreditas:	Akreditas:	



	(Ket: Sebelumnya ada tapi sudah dicabut)	- Prajabtan "B"	- Prajabtan "B"	- Prajabtan "B"	- Prajabtan "A"	- Prajabtan "A"	
		- Diklatpim IV "C"	- Diklatpim IV "B"	- Diklatpim IV "B"	- Diklatpim IV "B"	- Diklatpim IV "A"	
		- Diklatpim III "C"	- Diklatpim III "B"				
17.8	Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
18	Ketahanan Pangan						
18.1	Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan	71.3	77.0	62,81	74,2	94.3	100
18.2	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	69.4	73.2	72,8	78,7 80.9	84.7	88,5
18.3	Meningkatnya Ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan di daerah	73,78%	73,78%	80.7%	87%	94%	100%
19	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
19.1	Rumah Layak Huni (Mahyani)	525 Unit	1.000 Unit	800 Unit	711 Unit	1000 Unit	1000 Unit
19.2	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa & 3 kelurahan				
20	Statistik						
20.1	Buku Gorontalo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Kearsipan						
21.1	Peningkatan SDM & pengelola kearsipan (orang)	-	30	105	120	70	70
22	Komunikasi dan Informatika						
22.1	Jumlah nilai rata-rata penerapan e-government Prov. (referensi PeGI)	2.55 (kurang)	2.75 (baik)	3.00 (baik)	3.25 (baik)	3.50 (baik)	3.75 (sangat baik)
22.2	Jumlah SDM Aparatur Pemerintah Provinsi & masyarakat dlm penerapan aplikasi Tek. Informasi	64 orang	260 orang	320 orang	380 orang	440 orang	500 orang
22.3	Jumlah nilai rata-rata kepuasan publik dalam mengakses informasi pemerintahan (referensi index kesiapan kompetisi)	>2 (rendah)	>2.5 (cukup)	>3 (cukup)	>3.25 (cukup)	>3.25 (cukup)	>3.25 (tinggi)
23	Perpustakaan						
23.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.152 Org	12.889 Org	10.069 Org	59.621 Org	7,000 Org	8.000 org
23.2	Meningkatnya Jumlah Buku dan Judul Bacaan	5,080	1.553	1.580	2.150	1,000	5.080
23.3	Ketersediaan jenis buku dan judul terbitan daerah	80	30	30	20	20	20
23.4	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan	2	10	17	17	35	35
Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian						
1.1	Peningkatan produksi padi 3% per tahun (ton)	290.588	295.512	314.703	331.220	328,521	338,620
	Peningkatan produktivitas padi sebesar 4,72 % per tahun (ku/ha)	53,49	52,01	50,20	55,51	57.77	58,84
	Peningkatan Produksi Jagung sebesar 9,29% per tahun (ton)	656.864	669.094	719.780	643.512	927,436	1,013,914
	Peningkatan Produktivitas Jagung Sebesar 2,66% per tahun (ku/ha)	48,46	47,65	48,37	50,41	54.00	55.22
	Meningkatnya Produksi Kedelai sebesar 3 % per tahun (ton)	2.247	4.410	4.273	3.203	2,502	2,550
	Meningkatnya Produktivitas Kedelai (ku/ha)	12,53	13,10	15,04	13,49	13.27	13,40
1.2	Komoditi Hortikultura :						
	Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton)	16.551	16.897	15.098	752	18,629	19,188
	Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn)	16.852	53.527	9.839	7.228,91	17,492	17,667



	Peningkatan Produksi Buah - buahan 2 % per Tahun (Tcn)	12.952	14.381	18.310	722,89	14,019	14,300
1.3	Peningkatan Produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) 1 %/Tahun (Kg)	186.400	188.270	124.435	192.054	193,975	195,915
1.4	Perluasan Areal Tebu (Ha)	1.764	1.324	1.031	1.249	1,940	2,116
1.5	Produksi Tebu (Ton)	30.195	32.521	32.521	49.331	31,297	31,579
1.6	Perluasan Areal Cengkik (Ha)	8.880	9.370	9.670	9.737	10,637	11,121
1.7	Produksi Cengkik (Ton)	910	755	773	604	913	914
1.8	perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha)	65.664	10.269	68.896	68.129	67,487	67,818
1.9	Produksi Kelapa Dalam (Ton)	62.369	66.345	66.793	22.093	62,494	62,525
1.10	Perluasan Areal Kakao (Ha)	12.928	13.692	14.205	14.932	15,114	15,599
1.11	Produksi Kakao (Ton)	3.923	5.043	5.043	2.948	4,082	4,123
1.12	Peningkatan Populasi Ternak Sapi (Ekor)	191.223	214.186	190.832	197.124	223,704	232,652
1.13	Peningkatan Populasi Kambing (Ekor)	86.077	88.513	83.127	84.868	96,881	99,787
1.14	Peningkatan Populasi Ayam Buras (Ekor)	1.104.859	1.555.867	1.291.040	1.850.163	1.932.405	2.222.266
1.15	Peningkatan Produksi Daging Sapi (Kg)	4.064.695	2.817.969	3.011.474	2.552.353	4.399.756	4.487.752
1.16	Peningkatan Produksi Daging Kambing (Kg)	183.747	134.406	176.524	68.708	231,976	245,895
1.17	Peningkatan Produksi Daging Ayam Buras (Kg)	1.657.415	1.232.663	1.397.921	2.037.214	3,105,809	3,633,796
1.19	Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th)	2,7	3,02	2,77	3,1	3,7	4,0
2	Kehutanan						
2.1	Rehabilitasi hutan & lahan kritis (Ha)	14.700	15.000	4.500	13.800	16,200	16,700
2.2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	243.116	228.116	150.200	197.016	180,816	164,116
2.3	Produksi hasil hutan						
	a. Kayu Bulat (m3)	55.235	56.000	60.764	57.750	59,000	60,000
	b. Kayu Gergajian (m3)	2.596,43	2.621,43	21.267,61	17.850	2,696,43	2,721,43
	c. Non Kayu (ton)	6.200	6.200	880	1200	6,200	6,200
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina	16,74%	20,76%	23,14%	34,16%	40,86%	47,56%
3.2	Ratio Elektrifikasi	72,12%	74,75%	74,48%	77,58%	77,75%	78,75%
4	Pariwisata						
4.1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan (org)	92.000	110.517	356.799	368.000	110,000	120,000
4.2	Meningkatnya lama tinggal	3 hari	3 hari	4 hari	4 hari	4 hari	5 hari
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	85.815	92.171,3	103.017,80	105.715	114,578	126,036
5.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	133.340	125.730,3	57.392,30	30.158	186,490	205,139
	- Produksi Ikan Budidaya (Ton)	26.668	21.730,3	32.457	25.885	37,298	41,028
	- Produksi rumput laut (Ton)	106.672	103.924,2	24.935,30	4.272	149,192	164,111
5.3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)	75.700	82.203	90.847	21.109	110,807	131,627
5.4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	46,93	48,6	46,8	54,8	55	58,1
5.5	Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)	430	467	731	680	630	750
5.6	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	1.945.558	2.968.642	2.597.000	2.500.000	2,648,545	2,910,225
5.7	Pendapatan pembudidaya (Rp/bln)	1.662.465	1.790.750	1.975.000	2.470.000	2,278,085	2,000,000
5.8	Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln)	2.500.000	2.359.183	3.830.166	3.830.166	3,401,204	3,673,300
5.9	Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir)	6	10	12	14	16	19
6	Perdagangan						
6.1	Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun	1 pasar tradisional	6 pasar tradisional	4 pasar tradisional	5 pasar tradisional	4 pasar tradisional	4 pasar tradisional
6.2	Jumlah perdagangan antar pulau (ton)	768.736 ton	810.617 ton	66.126 ton	620.902 ton	879,294 ton	920,621 ton

TABEL 5.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kode Program & Kegiatan 1	Program dan Kegiatan 2	Lokasi Kegiatan 3	Target Kinerja 4	JUMLAH 5
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur			8,839,623,750.13
1.01 . 1.01.01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	250 PNS	3,930,840,000.13
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	5 Paket	909,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi Gorontalo	1 Keg	1,763,958,750.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PLA)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	1,038,790,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum Daerah)	Provinsi Gorontalo	12 bulan	463,486,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPLP)	Provinsi Gorontalo	54 Orang	123,571,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PLA)	Provinsi Gorontalo	1 Unit	22,250,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-Museum Daerah)	Provinsi Gorontalo	1 unit	266,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PPLP)	Provinsi Gorontalo	3 Paket	27,600,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-PLA)	Provinsi Gorontalo	4 Orang	94,450,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-Museum Daerah)	Provinsi Gorontalo	120 org/hari	128,763,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-PPLP)	Provinsi Gorontalo	209 Orang	69,915,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			1,958,784,929.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	4 Paket	1,817,085,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	4 Laporan	141,699,929.00
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			373,765,000.00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	provinsi gorontalo	3 keg	373,765,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar			1,800,025,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Provinsi Gorontalo	7 Kegiatan	1,800,025,000.00
2.16 . 1.01.01 . 19	Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo			171,830,000.00
2.16 . 1.01.01 . 19 . 01	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Provinsi Gorontalo	100 org	171,830,000.00
1.01 . 1.01.01 . 19	Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi			3,214,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01	Bantuan Studi dan Akhir Studi	Provinsi Gorontalo	234 mahasiswa	2,924,228,000.00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02	Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan	Prov. Gorontalo	1 keg	289,772,000.00
1.01 . 1.01.01 . 21	Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013			584,563,000.00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01	Penerapan Kurikulum 2013	Kota Gorontalo, Provinsi	100 %	584,563,000.00
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Kepengawasan Pendidikan			378,627,000.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01	Peningkatan Kompetensi Pengawas	Provinsi Gorontalo	61 orang	378,627,000.00
1.01 . 1.01.01 . 35	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK			27,847,080,000.00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	Provinsi Gorontalo	1971 Orang	27,847,080,000.00
1.01 . 1.01.01 . 36	Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal			415,100,000.00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 01	Kemampuan Literasi Masyarakat	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	415,100,000.00
2.13 . 1.01.01 . 37	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			1,754,200,000.00
2.13 . 1.01.01 . 37 . 01	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Provinsi Gorontalo	47 Atlet dan Pelatih	1,754,200,000.00
2.13 . 1.01.01 . 38	Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			995,725,000.00
2.13 . 1.01.01 . 38 . 01	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Provinsi Gorontalo	96 orang	995,725,000.00
2.13 . 1.01.01 . 39	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda			1,467,660,000.00

Kode Program & Kegiatan 1	Program dan Kegiatan 2	Lokasi Kegiatan 3	Target Kinerja 4	JUMLAH 5
2.13 . 1.01.01 . 39 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan		90 orang	984,530,000.00
2.13 . 1.01.01 . 39 . 03	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia dan Kapal Pemuda Nusantara		120 orang	483,130,000.00
				1,174,545,000.00
1.01 . 1.01.01 . 39	Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK			
1.01 . 1.01.01 . 39 . 01	Pelaksanaan Seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi	Provinsi Gorontalo	54 Orang	1,174,545,000.00
2.13 . 1.01.01 . 40	Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional			556,037,500.00
2.13 . 1.01.01 . 40 . 01	Penyelenggaraan Pelestarian Olahraga Tradisional	Provinsi Gorontalo	10 Jenis Olahraga Tradisional	556,037,500.00
1.01 . 1.01.01 . 40	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Dikdas			756,975,000.00
1.01 . 1.01.01 . 40 . 02	Gebyar Multi Talenta dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus dan	Gorontalo	5 Kegiatan	756,975,000.00
				696,522,000.00
2.13 . 1.01.01 . 41	Program Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda			696,522,000.00
2.13 . 1.01.01 . 41 . 01	Pembinaan Organisasi Pemuda	Provinsi Gorontalo	26 Kelompok	696,522,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Dikmen			3,996,105,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 01	Peningkatan Prestasi Siswa	Provinsi Gorontalo	753 Orang	2,046,297,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 02	Festival Lomba Seni Siswa SMA/SMK	Provinsi Gorontalo	552 Org	374,820,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 05	Lomba Kompetensi Siswa SMK	Provinsi Gorontalo	96 Orang	304,014,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 06	Olimpiade Olahraga SMA/SMK	Provinsi Gorontalo	552 Org	425,902,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 07	Olimpiade Sains Nasional	Provinsi Gorontalo	729 Siswa	529,667,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 09	Parade Cinta Tanah Air	Provinsi Gorontalo	1589 Orang	270,497,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 10	Pengembangan Unit Produksi dan Inovasi Pembelajaran Praktek SMK	Provinsi Gorontalo	44 Program Keahlian	44,908,000.00
2.16 . 1.01.01 . 41	Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo			2,787,445,000.00
2.16 . 1.01.01 . 41 . 01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gorontalo	Provinsi Gorontalo	100 org	1,605,695,000.00
2.16 . 1.01.01 . 41 . 02	Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah	Provinsi Gorontalo	50 org	1,181,750,000.00
1.01 . 1.01.01 . 44	Program Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Dikdas			208,760,000.00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 01	Manajemen BOS Pendidikan Dasar	Prov. Gorontalo	4 keg	208,760,000.00
1.01 . 1.01.01 . 48	Program Penyelenggaraan Ujian Nasional			625,825,000.00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 01	Penyediaan Ujian Sekolah	Provinsi Gorontalo	6 Kegiatan	625,825,000.00
1.01 . 1.01.01 . 49	Program Perluasan Akses Dikmen			5,710,637,000.00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 01	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah (Pembangunan RKB/LAB/REHAB SMA/MA/SMK)	Provinsi Gorontalo	2 Paket	1,400,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 02	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah (Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA/SMK)	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	4,310,637,000.00
1.01 . 1.01.01 . 54	Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)			5,127,498,000.00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 01	Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA/SMK	Provinsi Gorontalo	116 Sekolah	4,422,481,000.00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 03	Manajemen Prodira	PROVINSI GORONTALO	123 ORG	705,017,000.00
1.01 . 1.01.01 . 55	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			171,120,000.00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Provinsi Gorontalo	50 orang	171,120,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61	Program Perluasan Akses Dikmen (DAK)			41,155,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 01	Peningkatan Akses Layanan SMK (DAK)			30,411,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 02	Peningkatan Akses Layanan SMA (DAK)			10,744,000,000.00
Total Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				112,767,453,179.13



	Peningkatan Produksi Buah - buahan 2 % per Tahun (Tcn)	12.952	14.381	18.310	722,89	14,019	14,300
1.3	Peningkatan Produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) 1 %/Tahun (Kg)	186.400	188.270	124.435	192.054	193,975	195,915
1.4	Perluasan Areal Tebu (Ha)	1.764	1.324	1.031	1.249	1,940	2,116
1.5	Produksi Tebu (Ton)	30.195	32.521	32.521	49.331	31,297	31,579
1.6	Perluasan Areal Cengkih (Ha)	8.880	9.370	9.670	9.737	10,637	11,121
1.7	Produksi Cengkih (Ton)	910	755	773	604	913	914
1.8	perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha)	65.664	10.269	68.896	68.129	67,487	67,818
1.9	Produksi Kelapa Dalam (Ton)	62.369	66.345	66.793	22.093	62,494	62,525
1.10	Perluasan Areal Kakao (Ha)	12.928	13.692	14.205	14.932	15,114	15,599
1.11	Produksi Kakao (Ton)	3.923	5.043	5.043	2.948	4,082	4,123
1.12	Peningkatan Populasi Ternak Sapi (Ekor)	191.223	214.186	190.832	197.124	223,704	232,652
1.13	Peningkatan Populasi Kambing (Ekor)	86.077	88.513	83.127	84.868	96,881	99,787
1.14	Peningkatan Populasi Ayam Buras (Ekor)	1.104.859	1.555.867	1.291.040	1.850.163	1,932,405	2,222,266
1.15	Peningkatan Produksi Daging Sapi (Kg)	4.064.695	2.817.969	3.011.474	2.552.353	4,399,756	4,487,752
1.16	Peningkatan Produksi Daging Kambing (Kg)	183.747	134.406	176.524	68.708	231,976	245,895
1.17	Peningkatan Produksi Daging Ayam Buras (Kg)	1.657.415	1.232.663	1.397.921	2.037.214	3,105,809	3,633,796
1.19	Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th)	2,7	3,02	2,77	3,1	3,7	4,0
2	Kehutanan						
2.1	Rehabilitasi hutan & lahan kritis (Ha)	14.700	15.000	4.500	13.800	16,200	16,700
2.2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	243.116	228.116	150.200	197.016	180,816	164,116
2.3	Produksi hasil hutan						
	a. Kayu Bulat (m3)	55.235	56.000	60.764	57.750	59,000	60,000
	b. Kayu Gergajian (m3)	2.596,43	2.621,43	21.267,61	17.850	2,696,43	2,721,43
	c. Non Kayu (ton)	6.200	6.200	880	1200	6,200	6,200
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina	16,74%	20,76%	23,14%	34,16%	40,86%	47,56%
3.2	Ratio Elektrifikasi	72,12%	74,75%	74,48%	77,58%	77,75%	78,75%
4	Pariwisata						
4.1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan (org)	92.000	110.517	356.799	368.000	110,000	120,000
4.2	Meningkatnya lama tinggal	3 hari	3 hari	4 hari	4 hari	4 hari	5 hari
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	85.815	92.171,3	103.017,80	105.715	114,578	126,036
5.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	133.340	125.730,3	57.392,30	30.158	186,490	205,139
	- Produksi Ikan Budidaya (Ton)	26.668	21.730,3	32.457	25.885	37,298	41,028
	- Produksi rumput laut (Ton)	106.672	103.924,2	24.935,30	4.272	149,192	164,111
5.3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)	75.700	82.203	90.847	21.109	110,807	131,627
5.4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	46,93	48,6	46,8	54,8	55	58,1
5.5	Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)	430	467	731	680	630	750
5.6	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	1.945.558	2.968.642	2.597.000	2.500.000	2,648,545	2,910,225
5.7	Pendapatan pembudidaya (Rp/bln)	1.662.465	1.790.750	1.975.000	2.470.000	2,278,085	2,000,000
5.8	Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln)	2.500.000	2.359.183	3.830.166	3.830.166	3,401,204	3,673,300
5.9	Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir)	6	10	12	14	16	19
6	Perdagangan						
6.1	Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun	1 pasar tradisional	6 pasar tradisional	4 pasar tradisional	5 pasar tradisional	4 pasar tradisional	4 pasar tradisional
6.2	Jumlah perdagangan antar pulau (ton)	768.736 ton	810.617 ton	66.126 ton	620.902 ton	879,294 ton	920,621 ton



6.3	Perkembangan ekspor	17.012 ton	83.529 ton	72.608 ton	144.291 ton	200.056 ton	240.068
7	Perindustrian						
7.1	Jumlah IKM (unit)	12.140 IKM	12.842 IKM	13.688 IKM	14.084 IKM	13.696 IKM	14.025
7.2	Jumlah Sentra IKM (unit)	272 sentra	415 sentra	289 sentra	287 sentra	312 sentra	321 sentra
7.3	Berkembangnya kluster industry	0 kluster	1 kluster	1 kluster	1 kluster	2 kluster	2 kluster
8	Ketransmigrasian						
8.1	Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	1 Kimtras	1 Kimtras	2 Kimtras	1 Kimtras	1 Kimtras	1 Kimtras
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.	Pertanian						
1.1	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)						
	- Subsektor Tanaman Pangan	91.82	91.84	96,31	98,30	91.91	91.93
	- Subsektor Hortikultura	110.36	110.38	121,14	123,60	110.45	110.47
1.2	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	105	99.97	97,50	106.73	108.41	109.42
1.3	Nilai Tukar Petani Kebun	128.00	102.41	92,80	95,99	128.05	128.06
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Penataan Ruang						
1.1	Persentase implementasi arahan RTRW yang telah dilaksanakan	0%	30%	45%	60%	75%	100%
3.2	Persentase kuantitas dan kualitas layanan akses internet pada Pemerintah Provinsi	40%	50%	60%	70%	80%	90%

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 - 2017

Sasaran strategis yang diuraikan dalam tabel diatas merupakan target RPJMD 2012 - 2017, dimana beberapa indikator telah melampaui target pada capaian tahun 2013 - 2015 sementara sebagian lainnya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Sasaran pencapaian yang masih sangat rendah tersebut membutuhkan perhatian dan kerja keras untuk upaya pencapaiannya hingga masa akhir RPJMD di tahun 2017.



BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program kegiatan prioritas yang telah disesuaikan dengan adanya perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah diuraikan dalam tabel 5.1 yang menjadi lampiran perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 ini.



BAB VI PENUTUP

Demikian perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dalam rangka mengakomodir program kegiatan yang perlu disesuaikan atas dampak perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan perubahan organisasi perangkat daerah.

RKPD Perubahan tahun 2017 ini tetap menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 untuk tahun terakhir atau kelima. Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 tetap akan didorong untuk percepatan pencapaian sasaran target pembangunan yang pencapaiannya masih jauh dibawah target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya RKPD Perubahan tahun 2017, menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan, yaitu :

1. Seluruh SKPD Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 secara sinergis dan terintegrasi.
2. RKPD Perubahan Tahun 2017 telah disesuaikan dengan Program kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Untuk mengoptimalkan sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD Perubahan tahun 2017 untuk memberikan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2017.
4. Akhir tahun anggaran 2017, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Dinas Keuangan dan Aset Daerah, BAPPEDA dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo.

Pit. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH



BAB VI PENUTUP

Demikian perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dalam rangka mengakomodir program kegiatan yang perlu disesuaikan atas dampak perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan perubahan organisasi perangkat daerah.

RKPD Perubahan tahun 2017 ini tetap menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 untuk tahun terakhir atau kelima. Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 tetap akan didorong untuk percepatan pencapaian sasaran target pembangunan yang pencapaiannya masih jauh dibawah target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya RKPD Perubahan tahun 2017, menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan, yaitu :

1. Seluruh SKPD Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 secara sinergis dan terintegrasi.
2. RKPD Perubahan Tahun 2017 telah disesuaikan dengan Program kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Untuk mengoptimalkan sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD Perubahan tahun 2017 untuk memberikan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2017.
4. Akhir tahun anggaran 2017, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Dinas Keuangan dan Aset Daerah, BAPPEDA dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo.

Pit. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

TABEL 5.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kode Program & Kegiatan 1	Program dan Kegiatan 2	Lokasi Kegiatan 3	Target Kinerja 4	JUMLAH 5
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur			8,839,623,750.13
1.01 . 1.01.01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	250 PNS	3,930,840,000.13
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	5 Paket	909,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi Gorontalo	1 Keg	1,763,958,750.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PLA)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	1,038,790,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum Daerah)	Provinsi Gorontalo	12 bulan	463,486,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPLP)	Provinsi Gorontalo	54 Orang	123,571,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PLA)	Provinsi Gorontalo	1 Unit	22,250,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-Museum Daerah)	Provinsi Gorontalo	1 unit	266,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PPLP)	Provinsi Gorontalo	3 Paket	27,600,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-PLA)	Provinsi Gorontalo	4 Orang	94,450,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-Museum Daerah)	Provinsi Gorontalo	120 org/hari	128,763,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-PPLP)	Provinsi Gorontalo	209 Orang	69,915,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17				1,958,784,929.00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	4 Paket	1,817,085,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	4 Laporan	141,699,929.00
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			373,765,000.00
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	provinsi gorontalo	3 keg	373,765,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar			1,800,025,000.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Provinsi Gorontalo	7 Kegiatan	1,800,025,000.00
2.16 . 1.01.01 . 19	Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo			171,830,000.00
2.16 . 1.01.01 . 19 . 01	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Provinsi Gorontalo	100 org	171,830,000.00
1.01 . 1.01.01 . 19	Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi			3,214,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01	Bantuan Studi dan Akhir Studi	Provinsi Gorontalo	234 mahasiswa	2,924,228,000.00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02	Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan	Prov. Gorontalo	1 keg	289,772,000.00
1.01 . 1.01.01 . 21	Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013			584,563,000.00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01	Penerapan Kurikulum 2013	Kota Gorontalo, Provinsi	100 %	584,563,000.00
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Kepengawasan Pendidikan			378,627,000.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01	Peningkatan Kompetensi Pengawas	Provinsi Gorontalo	61 orang	378,627,000.00
1.01 . 1.01.01 . 35	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK			27,847,080,000.00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	Provinsi Gorontalo	1971 Orang	27,847,080,000.00
1.01 . 1.01.01 . 36	Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal			415,100,000.00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 01	Kemampuan Literasi Masyarakat	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	415,100,000.00
2.13 . 1.01.01 . 37	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			1,754,200,000.00
2.13 . 1.01.01 . 37 . 01	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Provinsi Gorontalo	47 Atlet dan Pelatih	1,754,200,000.00
2.13 . 1.01.01 . 38	Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			995,725,000.00
2.13 . 1.01.01 . 38 . 01	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Provinsi Gorontalo	96 orang	995,725,000.00
2.13 . 1.01.01 . 39	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda			1,467,660,000.00

Kode Program & Kegiatan 1	Program dan Kegiatan 2	Lokasi Kegiatan 3	Target Kinerja 4	JUMLAH 5
2.13 . 1.01.01 . 39 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan		90 orang	984,530,000.00
2.13 . 1.01.01 . 39 . 03	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia dan Kapal Pemuda Nusantara		120 orang	483,130,000.00
1.01 . 1.01.01 . 39	Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK			1,174,545,000.00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 01	Pelaksanaan Seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi	Provinsi Gorontalo	54 Orang	1,174,545,000.00
2.13 . 1.01.01 . 40	Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional			556,037,500.00
2.13 . 1.01.01 . 40 . 01	Penyelenggaraan Pelestarian Olahraga Tradisional	Provinsi Gorontalo	10 Jenis Olahraga Tradisional	556,037,500.00
1.01 . 1.01.01 . 40	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Dikdas			756,975,000.00
1.01 . 1.01.01 . 40 . 02	Gebyar Multi Talenta dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus dan	Gorontalo	5 Kegiatan	756,975,000.00
2.13 . 1.01.01 . 41	Program Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda			696,522,000.00
2.13 . 1.01.01 . 41 . 01	Pembinaan Organisasi Pemuda	Provinsi Gorontalo	26 Kelompok	696,522,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Dikmen			3,996,105,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 01	Peningkatan Prestasi Siswa	Provinsi Gorontalo	753 Orang	2,046,297,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 02	Festival Lomba Seni Siswa SMA/SMK	Provinsi Gorontalo	552 Org	374,820,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 05	Lomba Kompetensi Siswa SMK	Provinsi Gorontalo	96 Orang	304,014,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 06	Olimpiade Olahraga SMA/SMK	Provinsi Gorontalo	552 Org	425,902,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 07	Olimpiade Sains Nasional	Provinsi Gorontalo	729 Siswa	529,667,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 09	Parade Cinta Tanah Air	Provinsi Gorontalo	1589 Orang	270,497,000.00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 10	Pengembangan Unit Produksi dan Inovasi Pembelajaran Praktek SMK	Provinsi Gorontalo	44 Program Keahlian	44,908,000.00
2.16 . 1.01.01 . 41	Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo			2,787,445,000.00
2.16 . 1.01.01 . 41 . 01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gorontalo	Provinsi Gorontalo	100 org	1,605,695,000.00
2.16 . 1.01.01 . 41 . 02	Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah	Provinsi Gorontalo	50 org	1,181,750,000.00
1.01 . 1.01.01 . 44	Program Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Dikdas			208,760,000.00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 01	Manajemen BOS Pendidikan Dasar	Prov. Gorontalo	4 keg	208,760,000.00
1.01 . 1.01.01 . 48	Program Penyelenggaraan Ujian Nasional			625,825,000.00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 01	Penyediaan Ujian Sekolah	Provinsi Gorontalo	6 Kegiatan	625,825,000.00
1.01 . 1.01.01 . 49	Program Perluasan Akses Dikmen			5,710,637,000.00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 01	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah (Pembangunan RKB/LAB/REHAB SMA/MA/SMK)	Provinsi Gorontalo	2 Paket	1,400,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 02	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah (Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA/SMK)	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	4,310,637,000.00
1.01 . 1.01.01 . 54	Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)			5,127,498,000.00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 01	Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA/SMK	Provinsi Gorontalo	116 Sekolah	4,422,481,000.00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 03	Manajemen Prodira	PROVINSI GORONTALO	123 ORG	705,017,000.00
1.01 . 1.01.01 . 55	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			171,120,000.00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Provinsi Gorontalo	50 orang	171,120,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61	Program Perluasan Akses Dikmen (DAK)			41,155,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 01	Peningkatan Akses Layanan SMK (DAK)			30,411,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 02	Peningkatan Akses Layanan SMA (DAK)			10,744,000,000.00
Total Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				112,767,453,179.13

SKPD : Dinas Kesehatan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.02 . 1.02.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100 %	7,820,680,966.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	1,361,574,100.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman)	UPTD Bapelkesman	100 %	338,695,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD LABKESDA)	UPTD Labkesda	100 %	195,918,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	1,400,085,866.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Bapelkesman)	UPTD Bapelkesman	100 %	121,961,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD LABKESDA)	UPTD Labkesda	100 %	905,920,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	Luar Daerah	10 Orang	165,905,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD Bapelkesman)	Luar Daerah	6 Orang	113,720,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD LABKESDA)	Luar Daerah	4 Org	50,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie)		100 %	2,236,138,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie)		100 %	469,600,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie)		65 %	461,160,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			1,059,125,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	3 Kali	314,470,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	2 Dok	138,130,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03	Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Gorontalo	1 Kali	220,890,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	Provinsi Gorontalo	1 Kali	385,635,000.00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			683,015,744.00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Provinsi Gorontalo	6 Kab/Kota	540,854,744.00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Provinsi Gorontalo	1 Kali	94,261,000.00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Provinsi Gorontalo	70 tenaga kesehatan/masyarakat	47,900,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat			663,582,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Kab./Kota	1500 Orang	132,715,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab./Kota	56 Puskesmas	74,950,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kab./Kota	6 kab/kota	187,980,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan (UPTD Labkesda)	Provinsi Gorontalo	100 %	189,322,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Gangguan Jiwa	Provinsi Gorontalo	6 Kab/Kota	78,615,000.00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			135,082,500.00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Provinsi Gorontalo	6	69,395,000.00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	Peningkatan, Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Provinsi Gorontalo	6 Kabupaten/Kota	65,687,500.00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			276,042,000.00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Provinsi Gorontalo	100 %	81,190,000.00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui Kegiatan Saka Bakti Husada	Provinsi Gorontalo	100 %	50,550,000.00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08	Pembinaan Kegiatan PHBS di Sekolah dan Masyarakat	6 Kab./Kota	6 Kab./Kota	59,890,000.00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09	Pembinaan Desa Siaga dan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi Gorontalo	60 %	84,412,000.00
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			592,415,000.00

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Provinsi Gorontalo	200 Balita	480,375,000.00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			162,380,000.00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02	Pengendalian Penyebaran Lingkungan Dan Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat	6 Kab./Kota	75 %	162,380,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular			572,526,540.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Provinsi Gorontalo	85 %	110,457,500.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Provinsi Gorontalo	50 Persn	125,970,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03	Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Provinsi Gorontalo	85 Persen	96,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Peningkatan Imunisasi	Provinsi Gorontalo	95 Persen	104,121,040.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Provinsi Gorontalo	90 Persen	135,478,000.00
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			316,380,000.00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	Pembekalan dan Pembinaan Teknis bagi Dokter Internsif/Nusantara Sehat/ Penugasan Khusus	Provinsi Gorontalo	132 Dokter Intersip dan	157,490,000.00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Provinsi Gorontalo	12 Nakes	126,780,000.00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13	Pemutakhiran Data Tenaga Kesehatan di Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	6 Kab/Kota	32,110,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin			1,002,790,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04	Pelayanan pengobatan massal dan sunatan masal	Kab./Kota	6 Kab/Kota	485,015,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11	Pelayanan rujukan pasien miskin keluar daerah	RS Rujukan di Luar	15 Orang	517,775,000.00
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata			25,604,636,112.00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01	Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie)		100 %	25,604,636,112.00
1.02 . 1.02.01 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata			117,506,000.00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie)		65 %	117,506,000.00
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			1,179,470,000.00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun)		100 %	1,179,470,000.00
1.02 . 1.02.01 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			326,837,000.00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	Kab./Kota	28049 Siswa	249,005,000.00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09	Pelayanan Kesehatan Anak Balita melalui Integrasi PAUD dan Posyandu	Provinsi Gorontalo	100 %	77,832,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34	Program Pembinaan Upaya Kesehatan			606,330,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan serta Pelaksanaan P3K	Provinsi Gorontalo	6 Kabupaten /	104,270,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03	Penilaian Puskesmas Berprestasi	Provinsi Gorontalo	6 kab/kota	88,830,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04	Pelaksanaan BPRS	Provinsi Gorontalo	7 RS	158,630,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05	Workshop dan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit	Provinsi Gorontalo	6 Kab/Kota	111,485,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06	Workshop dan Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Provinsi Gorontalo	11 pkm	109,865,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07	Workshop dan PKS Pelayanan Darah	Provinsi Gorontalo	1 kab	33,250,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			1,904,738,500.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06	Akselerasi Penurunan AKI dan AKB di Kab/ Kota	Provinsi Gorontalo	100 %	711,876,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07	Penguatan Rujukan Materian Dan Neonatal di Kabupaten/ Kota Dan Provinsi	Provinsi Gorontalo	12 RTK	30,242,500.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 08	Penggalangan Program Lintas Sektor Dalam Mendukung Akselerasi Penurunan AKI, AKB dan GIBUR Melalui Gema Siasa	Provinsi Gorontalo	6 Kab./Kota	638,165,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09	Pelayanan Keluarga Berencana	Provinsi Gorontalo	456 Orang	524,455,000.00
1.02 . 1.02.01 . 37	JAMKESTA			60,043,068,000.00

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Manajemen Pembiayaan Jamkesta	Kab./Kota	100 %	696,390,000.00
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02	Premi Jamkesta	Provinsi Gorontalo	212076 Jiwa	59,346,678,000.00
1.02 . 1.02.01 . 38	Pelayanan Medik			13,679,180,000.00
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01	Pelayanan Medik (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie)		65 %	13,679,180,000.00
1.02 . 1.02.01 . 39	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)			226,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 01	Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)			226,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 42	Pelayanan Medik (DAK)			6,975,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01	Pelayanan Medik (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) (DAK)		100 %	6,505,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02	Bimbingan Akreditasi Rumah Sakit (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) (DAK)			470,000,000.00
TOTAL DINAS KESEHATAN				123,946,785,362.00

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE PROGRAM & 1	PROGRAM KEGIATAN 2	LOKASI KEGIATAN 3	TARGET KINERJA 4	JUMLAH 5
				842,950,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			842,950,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 09	Koordinasi dan Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	4 Kali Kegiatan	290,550,000.00
1.05 . 1.05.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			290,550,000.00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 05	Kemah Bakti Kebangsaan bagi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa	Provinsi Gorontalo	150 Orang	124,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			124,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04	Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Provinsi Gorontalo	130 Orang	252,246,000.00
1.05 . 1.05.01 . 19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			115,550,000.00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02	Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Provinsi Gorontalo	75 Orang	45,700,000.00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 03	Sosialisasi Peraturan Bidang Kesatuan Bangsa	Provinsi Gorontalo	100 Orang	90,996,000.00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 04	Monitoring dan Pendataan Orang Asing	Provinsi Gorontalo	75 Orang	609,834,000.00
1.05 . 1.05.01 . 21	Program Pendidikan Politik			130,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 09	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol dan Fasilitas Pendampingan Lembaga Legislatif	Provinsi Gorontalo	9 Partai Politik	293,210,000.00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 10	Monitoring dan Pemantauan Tahapan Pilkada Gubernur dan Pilkada Kab. Boalemo	Kabupaten / Kota	4 Bulan	186,624,000.00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 13	Pengkajian dan Pemantauan Implementasi Kebijakan-kebijakan Pemerintah	Provinsi Gorontalo	12 Kali Rapat	576,167,775.00
1.05 . 1.05.01 . 23	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat			218,428,775.00
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01	Sosialisasi Penguatan Peran LSM/Ormas dan Pendataan LSM/Ormas	Kota Gorontalo	100 LSM	184,960,000.00
1.05 . 1.05.01 . 23 . 02	Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemantauan/Monitoring terhadap Aliran Sesat dan Hari-hari Besar Keagamaan	Provinsi Gorontalo	100 Orang	172,779,000.00
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03	Sosialisasi Pencegahan Praktek Prostitusi, Perjudian, Peredaran Miras, dan Penyalahgunaan Narkoba	Kota Gorontalo	150 Orang	74,500,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi			824,686,359.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 02	Pemantauan/Monitoring Ketersediaan dan Harga Kebutuhan Pokok	Provinsi Gorontalo	2 Kali	295,821,459.00
1.05 . 1.05.01 . 28	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur			528,864,900.00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	357,171,000.00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	235,571,000.00
1.05 . 1.05.01 . 29	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			121,600,000.00
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01	Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Provinsi Gorontalo	2 Kali	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	3 Kali	
TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3,952,105,134.00

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur			1,301,200,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	100 %	570,650,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	613,150,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	3 Kegiatan	117,400,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			477,236,500.00
1.04 . 1.04.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Gorontalo	3 Dokumen	375,736,500.00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	100 %	101,500,000.00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan			20,887,825,036.00
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	Provinsi Gorontalo	700 Unit	18,487,550,036.00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Provinsi Gorontalo	m	2,152,975,000.00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	247,300,000.00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Penyusunan Perencanaan Bidang Perumahan			373,225,000.00
1.04 . 1.04.01 . 21	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	373,225,000.00
1.04 . 1.04.01 . 21 . 02	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh			1,314,300,000.00
1.04 . 1.04.01 . 22	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	156,400,000.00
1.04 . 1.04.01 . 22 . 01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Provinsi Gorontalo	m,unit	1,157,900,000.00
1.04 . 1.04.01 . 22 . 02	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur			24,353,786,536.00
TOTAL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
				7,721,317,476.00
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	100 %	2,286,702,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Paket	165,211,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD TPA Talumelito	Provinsi Gorontalo	100 %	465,788,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	1,941,097,476.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Paket	1,642,839,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD TPA Talumelito	Provinsi Gorontalo	100 %	434,410,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Laboratorium	Provinsi Gorontalo	3 Kegiatan	785,270,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur			1,078,410,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	320,800,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	200,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	557,610,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Peningkatan Kinerja Penyusunan Program			206,750,000.00
2.05 . 1.03.01 . 15	Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Provinsi Gorontalo	200 Orang	206,750,000.00
2.05 . 1.03.01 . 15 . 01	Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan			61,821,165,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PROVINSI	10 KM	23,673,830,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Pembangunan Jalan Provinsi	PROVINSI GORONTALO	8.20 KM	23,450,400,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02	Pembangunan Jalan Strategis Provinsi	PROVINSI GORONTALO	0 Meter	0.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jembatan Provinsi	PROVINSI GORONTALO	2 Paket	10,959,110,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04	Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi	PROVINSI GORONTALO	9 Paket	3,490,120,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	PROVINSI GORONTALO	1 Kegiatan	247,705,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	Koordinasi Pengembangan Jaringan Jalan			6,761,585,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Provinsi Gorontalo	1 Paket	399,410,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan	Provinsi Gorontalo	6.40 Km	0.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02	Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi	Provinsi Gorontalo	100 KM	6,057,600,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	Provinsi Gorontalo	300 Meter	304,575,000.00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	Pemeliharaan Jembatan Provinsi		100 %	9,211,120,000.00
2.04 . 1.03.01 . 21	Program Pembebasan Tanah	Provinsi Gorontalo	331 Ha	9,211,120,000.00
2.04 . 1.03.01 . 21 . 01	Pelaksanaan Pengadaan Tanah			11,936,880,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Provinsi Gorontalo	10129.50 Ha	8,389,980,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Provinsi Gorontalo	3 Kegiatan	127,315,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23	Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Daya Air	provinsi Gorontalo	4 Kegiatan	100,175,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24	Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Rancangan, Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi	Provinsi Gorontalo	6 Dok	3,319,410,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Teknis Irigasi			18,823,225,000.00
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Provinsi Gorontalo	4 Kawasan	1,006,650,000.00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Air Limbah	Provinsi Gorontalo	7500 Jiwa	10,525,955,000.00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10	Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat	Provinsi Gorontalo	120 Unit	6,512,020,000.00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat	Provinsi Gorontalo	5 Dokumen	778,600,000.00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 12	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah			13,178,300,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	Provinsi Gorontalo	1318.19 M	6,570,695,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Provinsi Gorontalo	5425 M	5,884,195,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 11	Pembangunan Pengaman Badan Sungai dan Tebing			

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.03 . 1.03.01 . 28 . 13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air	Provinsi Gorontalo	5 Dok	723,410,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			28,569,055,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Provinsi Gorontalo	4 Km	15,769,150,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02	Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Unit	8,456,005,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Umum	Provinsi Gorontalo	3 Kawasan	3,485,450,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Provinsi Gorontalo	3 Dokumen	858,450,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Pembinaan Jasa Konstruksi			2,109,487,700.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01	Teknis Jasa Konstruksi	Provinsi Gorontalo	7 Keg	399,179,895.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02	Bina Jasa Konstruksi	Provinsi Gorontalo	100 Badan Usaha	650,795,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03	Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi	Provinsi Gorontalo	165 org	1,059,512,805.00
1.03 . 1.03.01 . 62	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)			26,336,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 62 . 01	Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK)	Provinsi Gorontalo		5,509,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 63	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (DAK)			5,509,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 63 . 01	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	Provinsi Gorontalo	3 Daerah Irigasi	5,509,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 64	Bina Marga (Lanjutan)			1,654,419,250.00
1.03 . 1.03.01 . 64 . 01	Kegiatan Bina Marga (Lanjutan)	Provinsi Gorontalo		1,654,419,250.00
1.03 . 1.03.01 . 65	Cipta Karya (Lanjutan)			3,387,050,500.00
1.03 . 1.03.01 . 65 . 01	Kegiatan Cipta Karya (Lanjutan)	Provinsi Gorontalo		3,387,050,500.00
1.03 . 1.03.01 . 66	Program Perencanaan Tata Ruang		100 %	2,386,080,000.00
1.03 . 1.03.01 . 66 . 04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	1,684,460,000.00
1.03 . 1.03.01 . 66 . 16	Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP	Provinsi Gorontalo	2 Kegiatan	701,620,000.00
1.03 . 1.03.01 . 67	Program Pemanfaatan Ruang		100 %	922,375,000.00
1.03 . 1.03.01 . 67 . 08	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	3 Laporan	922,375,000.00
1.03 . 1.03.01 . 68	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		100 %	632,850,000.00
1.03 . 1.03.01 . 68 . 08	Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Provinsi Gorontalo	3 Laporan	632,850,000.00
TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				202,245,069,926.00

SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
			100 %	1,332,653,065.00
1.06 . 1.06.01 . 01	Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	100 %	597,924,500.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	614,728,565.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		5 Orang	120,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		100 %	592,907,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	120,837,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 01	Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	472,070,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 02	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi		200 KK	1,605,186,250.00
1.06 . 1.06.01 . 15	Pemberdayaan Sosial	Provinsi Gorontalo	3 Kegiatan	284,595,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (KZKS)	Provinsi Gorontalo	230 KK	289,298,250.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil	Provinsi Gorontalo	10 KUBE	1,031,293,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Pemberdayaan Fakir Miskin		480 Orang	1,436,311,250.00
1.06 . 1.06.01 . 16	Rehabilitasi Sosial	Provinsi Gorontalo	43 264 Anak/LKSA/Panti	449,607,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak	Provinsi Gorontalo	100 Orang	154,370,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Provinsi Gorontalo	15 Orang	475,340,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Provinsi Gorontalo	25 Orang	356,994,250.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial		100 %	544,975,000.00
2.02 . 1.06.01 . 17	Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Provinsi Gorontalo	120 anak	297,725,000.00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 22	Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak	Provinsi Gorontalo	1 tahun anggaran	247,250,000.00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 26	Penguatan Kelembagaan P2TP2A		100 %	829,346,000.00
2.02 . 1.06.01 . 20	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Kab / Kota di Provinsi	6 Kab/Kota	1,12,510,000.00
2.02 . 1.06.01 . 20 . 03	Pelaksanaan Penilaian Program Terpadu P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu di Kab./Kota	Provinsi Gorontalo	19 Orang	284,070,000.00
2.02 . 1.06.01 . 20 . 06	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	Provinsi Gorontalo	4 Dokumen	269,838,000.00
2.02 . 1.06.01 . 20 . 09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen Database Gender	162,928,000.00
2.02 . 1.06.01 . 20 . 10	Penguatan Kelembagaan SIGA Data Gender SKPD dan SKPP		120 KK	1,232,535,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20	Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	448,140,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03	Pendataan dan Jaminan Sosial Keluarga	Provinsi Gorontalo	250 KK	315,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04	Koordinasi Dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Bidang Linjamsos	Kabupaten dan Kota Se	24 KK	469,395,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 05	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial		40 Lembaga	529,110,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21	Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan	Provinsi Gorontalo	16 Lembaga WKSMB	58,509,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Pemberdayaan melalui Kemitraan Sosial	Provinsi Gorontalo	77 Orang	330,220,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Provinsi Gorontalo	10 Lembaga Karang	140,381,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04	Pembinaan Organisasi Kesejahteraan Sosial			
TOTAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8,103,023,565.00

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur			1,980,055,040.00
1.06 . 1.06.02 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	12 bulan	433,695,040.00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	BPBD Provinsi	12 Bulan	1,396,810,000.00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	11 orang	149,550,000.00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03				782,662,250.00
1.06 . 1.06.02 . 02	Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			
1.06 . 1.06.02 . 02 . 01	Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD	Provinsi Gorontalo	12 bulan	123,500,000.00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 03	Perencanaan, Koordinasi, Monev dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Bencana	Provinsi Gorontalo	1 kali rakor	659,162,250.00
1.06 . 1.06.02 . 23				609,413,000.00
1.06 . 1.06.02 . 23	Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
1.06 . 1.06.02 . 23 . 01	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Kabupaten / Kota	420 Orang anak didik	227,193,000.00
1.06 . 1.06.02 . 23 . 03	Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana	Kabupaten Pohuwato	350 Orang Relawan	382,220,000.00
1.06 . 1.06.02 . 24				571,834,000.00
1.06 . 1.06.02 . 24	Kedaruratan dan Logistik			
1.06 . 1.06.02 . 24 . 01	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kedaruratan dan logistik	Provinsi Gorontalo	10 Mobil	305,280,000.00
1.06 . 1.06.02 . 24 . 02	PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi Sistem Penanggulangan Bencana)	Provinsi Gorontalo	3 kali rapat koordinasi	266,554,000.00
1.06 . 1.06.02 . 25				515,210,625.00
1.06 . 1.06.02 . 25	Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01	Inventarisasi Kerusakan Infrastruktur	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	92,586,125.00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 03	Workshop Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Kota Gorontalo	50 Orang	89,437,000.00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 04	Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	100 %	240,000,000.00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 05	Peningkatan Peran dan Partisipasi dalam Bidang Penanggulangan Bencana	Provinsi Gorontalo	70 orang	93,187,500.00
TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4,459,174,915.00

SKPD : Badan Keuangan Daerah

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.04 . 4.04.05 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur		100 %	6,284,528,070.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	1,407,420,000.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	5 Unit Roda Dua	3,127,108,076.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18	Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kota Gorontalo/Kabupaten Bone	Kota Gorontalo	100 %	450,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 19	Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten Gorontalo/Kabupaten	Kabupaten Gorontalo	100 %	450,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 20	Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten Boalemo/Kabupaten	Kabupaten Boalemo	100 %	350,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 21	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keuangan Daerah	Provinsi Gorontalo, Makassar	21 Orang pegawai	500,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi		100 %	919,386,792.00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 02	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen Dokumen Renja, DPA SKPD, RKA SKPD, DPA P-APBD, RKA-P, LPPD, Lakip, e-monep & Dokumen pengadaan.	200,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 03	Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (PDE)	Provinsi Gorontalo	9 titik	619,386,792.00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 20	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	7 Jenis laporan keuangan	100,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP	2,996,380,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH	Provinsi Gorontalo	2 org	295,576,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	120,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan	Provinsi Gorontalo	300 Buku	320,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 04	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Provinsi Gorontalo	3 org	425,960,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05	Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	75,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 06	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	145,714,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 07	Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa	Provinsi Gorontalo	150 buku	93,380,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 08	Penatausahaan Aset	Provinsi Gorontalo	25 Buku per triwulan	430,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 09	Penatausahaan APBD	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	245,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 10	Pelayanan Perbendaharaan	Provinsi Gorontalo	33 SKPD	182,600,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 11	Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	125,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 12	Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD	Provinsi Gorontalo	75 %	119,200,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 13	Kebijakan dan Pengendalian Aset	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	104,650,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 14	Sosialisasi Paket Regulasi Akuntansi	Provinsi Gorontalo	100 buku	314,300,000.00
4.04 . 4.04.05 . 04	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		100 %	140,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 04 . 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang	Provinsi Gorontalo	6 Kabupaten/Kota	140,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah		1.50 Trilyun	2,427,010,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 01	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango)	Kota Gorontalo	12 kali	500,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab. Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara)	Kabupaten Gorontalo	10 kali	450,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab. Boalemo dan Kabupaten Pohuwato)	Kabupaten Boalemo	10 Kali	423,680,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 04	Monitoring, Evaluasi, Pendapatan Daerah	Provinsi Gorontalo	3 Dokumen	200,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 05	Koordinasi Pajak	Provinsi Gorontalo	4 Kali	173,650,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 06	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsat	Provinsi Gorontalo	4 kali	487,680,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 07	Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	192,000,000.00
TOTAL BADAN KEUANGAN DAERAH				12,767,304,862.00

SKPD : Badan Kepegawaian

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.05 . 4.05.07 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur			1,193,697,688.00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran		1 paket	573,165,188.00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		1 paket	504,882,500.00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		8 ASN	115,650,000.00
4.05 . 4.05.07 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi			541,104,750.00
4.05 . 4.05.07 . 02 . 02	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi		4 Dokumen	416,993,500.00
4.05 . 4.05.07 . 02 . 20	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan		15 dokumen	124,111,250.00
4.05 . 4.05.07 . 15	Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian			180,090,000.00
4.05 . 4.05.07 . 15 . 01	Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah		2 perangkat lunak	84,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 15 . 02	Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip Induk Pegawai		100 %	96,090,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3,253,991,200.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01	Seleksi Penerimaan ASN		100 Peserta	137,650,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 02	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg dan Karis/Karsu		100 %	254,770,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 03	Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Disiplin		100 %	183,550,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 04	Penilaian dan Penghargaan PNS Teladan dan Berprestasi		9 Orang	241,678,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05	Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Pemprov Gorontalo		35 Orang	330,750,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 06	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Capra IPDN		100 %	289,275,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 07	Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi		1 Dokumen	76,115,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 08	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional		100 %	407,801,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 09	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat		150 Orang	102,470,500.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 10	Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural		60 Orang	543,193,700.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 11	Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS		100 %	198,498,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 15	Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Bagi ASN yang memasuki Purna Tugas			193,940,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 17	Fasilitasi Pembinaan Fisik, Mental dan Spritual Anggota Korpri			294,300,000.00
TOTAL BADAN KEPEGAWAIAN				5,168,883,638.00

SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur			1,537,313,235.00
4.06 . 4.06.10 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur	Badan Diklat Provinsi	100 %	574,001,500.00
4.06 . 4.06.10 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Badan Diklat	100 %	829,711,735.00
4.06 . 4.06.10 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Badan Diklat Provinsi	9 ASN	133,600,000.00
4.06 . 4.06.10 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			581,255,000.00
4.06 . 4.06.10 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi			
4.06 . 4.06.10 . 02 . 02	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Badan Diklat Provinsi	5 Dokumen	459,350,000.00
4.06 . 4.06.10 . 02 . 20	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Badan Diklat Provinsi	15 dokumen	121,905,000.00
4.06 . 4.06.10 . 15	Program Pendidikan Kedinasan			2,027,439,000.00
4.06 . 4.06.10 . 15 . 01	Pengiriman Peserta Kursus LEMHANAS, Diklat PIM I dan PIM II	Badan Diklat Provinsi	4 orang	304,021,000.00
4.06 . 4.06.10 . 15 . 03	Pelaksanaan Diklat PIM Tingkat IV	Badan Diklat Provinsi	40 Orang	818,008,000.00
4.06 . 4.06.10 . 15 . 04	Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan	Badan Diklat Provinsi	44 orang	423,050,000.00
4.06 . 4.06.10 . 15 . 07	Pengembangan Kapasitas Widyaiswara/Fasilitator	Badan Diklat Provinsi	32 orang	482,360,000.00
TOTAL BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				4,146,007,235.00

SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.03 . 4.03.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100 %	3,829,928,389.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	BAPPEDA Provinsi Gorontalo	12 Bulan	765,175,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	BAPPEDA Provinsi Gorontalo	11 Paket	2,401,013,389.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	Provinsi Gorontalo	75 Aparatur	170,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP)	BAPPEDA Provinsi Gorontalo	12 Bulan	93,340,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor (UPTB-KP)	BAPPEDA Provinsi Gorontalo	5 Paket	196,060,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Penanggulangan Kemiskinan dan Analisa Data Pembangunan)	BAPPEDA Provinsi Gorontalo	12 Bulan	100,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTB Penanggulangan Kemiskinan dan Analisa Data Pembangunan)		4 Paket	104,340,000.00
4.03 . 4.03.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100 %	1,218,400,000.00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	BAPPEDA Provinsi Gorontalo	17 Laporan	100,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 03	Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	1,118,400,000.00
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan Daerah		100 %	650,860,000.00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06	Dukungan Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga Donor	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	312,860,000.00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 09	Pengembangan Kerjasama Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	338,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	2,555,030,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur serta Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	296,470,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	732,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17	Penyusunan Dokumen RPJMD 2017 - 2022	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	438,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	409,060,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan		12 Bulan	334,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20	Sinkronisasi dan Analisa Data Pembangunan Berbasis Spasial	Provinsi Gorontalo	Prov. 5 Kab. dan 1 Kota	345,500,000.00
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100 %	1,690,700,000.00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09	Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	Provinsi Gorontalo	5 Kegiatan	844,200,000.00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10	Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan Industri	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	588,500,000.00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11	Perencanaan Pembangunan Sektor Perikanan dan Pariwisata	Provinsi Gorontalo	2 Kegiatan	258,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya		100 %	1,087,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	325,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	415,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	347,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup		100 %	1,352,350,000.00
4.03 . 4.03.01 . 26 . 04	Perencanaan Sektor Prasarana ke-Cipta Karya-an, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	530,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 26 . 05	Perencanaan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	Provinsi Gorontalo	4 Kegiatan	562,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 26 . 06	Perencanaan Sektor Prasarana Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	260,350,000.00
4.03 . 4.03.01 . 29	Pengembangan Riset Daerah		100 %	895,025,000.00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah	Provinsi Gorontalo	1 Rekomendasi	224,500,000.00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Provinsi Gorontalo	1 Rekomendasi	300,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 29 . 04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Provinsi Gorontalo	1 Rekomendasi	370,525,000.00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				13,279,293,389.00

SKPD : Biro Humas dan Protokol

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.03 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur			1,919,313,958.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Humas dan Protokol)	Provinsi Gorontalo	100 Persen	774,836,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Humas dan Protokol)	Provinsi Gorontalo	100 Persen	1,056,797,958.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	8 Orang	87,680,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			652,298,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 12	Koordinasi Pemerintah Dalam Daerah Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	20 Kali	209,320,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 13	Koordinasi Pemerintah Luar Daerah Provinsi Gorontalo	Nasional	20 Kali	304,660,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 14	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Pimpinan	Provinsi Gorontalo	3 Laporan	138,318,000.00
2.10 . 4.01.03 . 19	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			5,181,781,121.00
2.10 . 4.01.03 . 19 . 01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo,	36 kali	3,806,528,500.00
2.10 . 4.01.03 . 19 . 02	Penyebarluasan Informasi Melalui Radio Suara Rakyat Hulondalo	Provinsi Gorontalo	1 Kali	1,375,252,621.00
TOTAL BIRO HUMAS DAN PROTOKOL				7,753,393,079.00

SKPD : Biro Hukum dan Organisasi

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.03 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur			746,394,512.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Hukum dan Organisasi)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	451,479,512.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Hukum dan Organisasi)	Provinsi Gorontalo	100 Persen	168,915,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	3 Kali	126,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17	Penataan Peraturan Perundang-Undangan			671,965,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01	Pengkajian dan Pendampingan Ranperda	Provinsi Gorontalo	10 Ranperda	147,550,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02	Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah	Provinsi Gorontalo	300 Buah	98,550,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03	Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Gorontalo	450 Buku	375,805,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04	Koordinasi Bidang Hukum	Provinsi Gorontalo	4 Kali	50,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18	Advokasi dan Pendampingan Hukum			723,210,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Pendampingan dan Penyelesaian Masalah/Sengketa Hukum (termasuk pendampingan ASN)	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	428,520,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02	Orientasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Provinsi Gorontalo	33 SKPD	72,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 03	Pelayanan Hukum Terpadu melalui Sidang Itsbat Nikah Mobile	Provinsi Gorontalo	200 Pasutri	221,940,000.00
4.01 . 4.01.03 . 19	Pengkajian Kerja Sama			39,500,000.00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01	Evaluasi Dokumen dan Sinkronisasi Data Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerja Sama	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	39,500,000.00
4.01 . 4.01.03 . 20	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil			73,350,000.00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Provinsi Gorontalo	65 PPNS	73,350,000.00
4.01 . 4.01.03 . 21	Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)			50,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01	Focus Group Discussion Hak Asasi Manusia (HAM) (Penyusunan Rencana Aksi)	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	50,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 22	Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan dan Ketatalaksanaan			225,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01	Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	6 Usulan	125,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02	Validasi Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	100,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 23	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			255,560,000.00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Provinsi Gorontalo	32 SKPD	165,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Kinerja Instansi Pemerintah	Provinsi Gorontalo	32 SKPD	89,810,000.00
4.01 . 4.01.03 . 24	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			141,760,000.00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02	Evaluasi dan Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Provinsi Gorontalo	35 SKPD	70,880,000.00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Provinsi Gorontalo	33 SKPD	70,880,000.00
TOTAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI				2,926,679,512.00

SKPD : Badan Penghubung

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.08 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur			2,751,591,823.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Jakarta	100 %	1,000,740,000.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jakarta	100 %	1,574,803,500.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 22	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jakarta dan Daerah Lainnya	100 %	176,048,323.00
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi			126,610,000.00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jakarta dan Daerah Lainnya		126,610,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			1,149,000,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03 . 05	Koordinasi/Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jakarta dan Daerah Lainnya	100 %	180,000,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03 . 09	Pelayanan Keprotokoleran	Jakarta dan Daerah Lainnya	100 %	469,000,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03 . 11	Pelayanan pada Kantor Penghubung Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan	10 Kali	500,000,000.00
3.02 . 4.01.08 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			546,846,500.00
3.02 . 4.01.08 . 15 . 21	Penataan Anjungan Gorontalo di TMII	Jakarta		341,266,500.00
3.02 . 4.01.08 . 15 . 22	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jakarta		107,010,000.00
3.02 . 4.01.08 . 15 . 23	Penunjang Kegiatan Promosi Pariwisata	Jakarta		98,570,000.00
2.12 . 4.01.08 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			113,700,000.00
2.12 . 4.01.08 . 15 . 03	Peningkatan Kerjasama antar Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah	Jakarta dan daerah lainya	100 %	61,200,000.00
2.12 . 4.01.08 . 15 . 04	Koordinasi Membangun Sinergitas Pembangunan Daerah dengan Organisasi Masyarakat di Perantauan	Jakarta dan Daerah Lainnya	100 %	52,500,000.00
2.10 . 4.01.08 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			100,000,000.00
2.10 . 4.01.08 . 18 . 03	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jakarta dan Daerah Lainnya di	1 Kegiatan	100,000,000.00
TOTAL BADAN PENGHUBUNG				4,787,748,323.00

SKPD : Biro Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.03 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur			693,089,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Kesra dan Ekonomi)	Provinsi Gorontalo	100 % 12 bulan	693,089,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi			192,325,895.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	100 % Koordinasi	192,325,895.00
4.01 . 4.01.03 . 26	Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya			6,740,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01	Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Belum Memiliki Embarkasi/Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	100 % (sarana	4,497,440,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02	Pelayanan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	Provinsi Gorontalo	100 % (Tadarus 3	542,150,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03	Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan	Provinsi Gorontalo	100 %	1,103,100,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04	Penyelenggaraan Kegiatan STQ	Provinsi Gorontalo	100 %	443,440,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05	Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Budaya	Provinsi Gorontalo	100 %	154,620,000.00
4.01 . 4.01.03 . 28	Pengendalian Ekonomi			405,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01	Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian	Provinsi Gorontalo		405,000,000.00
TOTAL BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN				8,031,164,895.00

SKPD : Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.03 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur		100 %	1,252,790,816.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan)	Kantor Biro P2LP Setda	1 Paket	632,100,816.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan)	Kantor Biro P2LP Setda	12 Bulan	453,340,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo dan	9 Orang Dalam Daerah,	167,350,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi		100 %	300,400,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo dan	8 Dokumen	300,400,000.00
4.01 . 4.01.03 . 27	Pengendalian Pembangunan		100 %	946,740,000.00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01	Pengendalian Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo dan	12 Bulan	791,460,000.00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02	Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	Provinsi Gorontalo dan	100 %	155,280,000.00
4.01 . 4.01.03 . 29	Program Koordinasi, Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum		100 %	490,844,000.00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01	Penerapan Sistem dan Regulasi dalam Proses PBJ	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	490,844,000.00
BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN				2,990,774,816.00

SKPD : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.03 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur		100 %	616,564,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	282,706,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pemerintahan)	Provinsi Gorontalo	100 %	277,500,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo dan	6 Orang	56,358,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		12 bulan	402,957,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Provinsi Gorontalo dan	1 Dokumen	89,778,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 15	Pelayanan Administrasi Aparatur Pemerintah dan Legislatif	Provinsi Gorontalo	17 Kali Kunjungan Kerja	104,294,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 16	Pelayanan Dukungan Administrasi Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Provinsi Gorontalo	3 Kali	208,885,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04	Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Aparatur		100 %	185,173,500.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 06	Koordinasi dan Pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pengembangan Otonomi Daerah	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	185,173,500.00
4.01 . 4.01.03 . 15	Program Penataan Wilayah Provinsi		15 pilar	381,386,500.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01	Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas Antar Daerah dan Pencegahan Perselisihan Batas Antar Daerah	Provinsi Gorontalo	15 Pilar	228,655,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 02	Pendataan/Penamaan Rupa Bumi (Toponimi)	Provinsi Gorontalo	1 Paket	93,856,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03	Koordinasi Evaluasi Kecamatan PATEN dan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	58,875,500.00
2.07 . 4.01.03 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		90 %	422,032,237.00
2.07 . 4.01.03 . 17 . 05	Peningkatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa dan Kelurahan	Provinsi Gorontalo	5 Desa	210,973,237.00
2.07 . 4.01.03 . 17 . 06	Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Kelembagaan, Pendapatan serta Kekayaan Desa/Kelurahan	Provinsi Gorontalo	3 Kelurahan	211,059,000.00
2.07 . 4.01.03 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		90 %	182,875,000.00
2.07 . 4.01.03 . 18 . 03	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Provinsi Gorontalo	35 Kepala Desa	182,875,000.00
4.01 . 4.01.03 . 25	Dukungan Pembentukan Daerah Otonom Baru		3 DOB	35,044,000.00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01	Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)	Provinsi Gorontalo	3 Kabupaten	35,044,000.00
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				2,226,032,237.00

SKPD : Biro Umum

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.03 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur			12,486,220,324.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Umum)	Provinsi Gorontalo	100 persen	1,494,134,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Umum)	Provinsi Gorontalo	100 Persen	7,433,840,824.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	100 Persen	247,700,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor	Provinsi Gorontalo	100 Persen	2,308,995,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Provinsi Gorontalo	100 Persen	1,001,550,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi			249,299,916.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	100 Persen	124,299,916.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	13 Dokumen	125,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			257,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Provinsi Gorontalo	100 Persen	257,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo			847,825,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	30 Kegiatan	685,875,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02	Monitoring Aset dan Bantuan Barang Hibah	Provinsi Gorontalo	10 Kegiatan	161,950,000.00
TOTAL BIRO UMUM				13,841,095,240.00

SKPD : Pimpinan Sekretariat Daerah

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
				12,990,400,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01	Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)	Provinsi Gorontalo	36 Kegiatan	4,500,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)	Provinsi Gorontalo	25 Kegiatan	2,995,200,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03	Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)	Provinsi Gorontalo	25 Kegiatan	2,908,930,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04	Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)	Provinsi Gorontalo	15 Kegiatan	2,586,270,000.00
				16,585,260,804.00
4.01 . 4.01.03 . 04	Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Aparatur			
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	108 kegiatan	14,991,250,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	12 Kali/Bulan	450,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 03	Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan	Provinsi Gorontalo	6 Kali/bulan	700,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 04	Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat	Provinsi Gorontalo	12 kali/bln	444,010,804.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 05	Pelayanan Umum Atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo		
	TOTAL PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH			29,575,660,804.00

SKPD : Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.10 . 2.10.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur		60 Peningkatan jasa	946,063,902.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	306,063,902.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	565,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	5 orang	75,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi		5 Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, dan LKPJ)	100,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 01	Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD	Provinsi Gorontalo	6 kali	100,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa		3.75 Peningkatan e-Government Indonesia (PEGI)	5,115,610,490.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07	Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Government	Provinsi Gorontalo	9 Kegiatan	4,753,610,490.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh SKPD	Provinsi Gorontalo	2 kegiatan	362,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 17	Program Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi		150 Jumlah Sumber Daya	217,750,000.00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02	Peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan Teknologi Informasi	Provinsi Gorontalo	6 kegiatan	217,750,000.00
2.10 . 2.10.01 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		3.50 Meningkatnya kepuasan publik dalam memanfaatkan saluran komunikasi publik di Provinsi Gorontalo	200,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01	Peningkatan Layanan Media Informasi Publik	Gorontalo	3 kegiatan	200,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 20	Program Pengembangan Data/Informasi		100 Tersusunnya dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD	717,767,110.00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 01	Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1 dokumen	428,836,250.00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi Gorontalo	1 Aplikasi	100,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 20 . 03	Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan	Provinsi Gorontalo	4 sektor	188,930,860.00
TOTAL DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK				7,297,191,502.00

SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.17 . 2.17.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		3 Urusan	1,798,860,940.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	KPAD Provinsi Gorontalo	3 urusan	965,117,940.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	KPAD Provinsi Gorontalo	14 Paket	733,250,000.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM	KPAD Provinsi Gorontalo	20 Aparat	100,493,000.00
2.17 . 2.17.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		3 Urusan	182,282,500.00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 02	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Provinsi Gorontalo	75 Orang dan 6 Lembaga Perpustakaan /Arsip Kab/ Kota.	137,917,500.00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan		12 Bulan	44,365,000.00
2.17 . 2.17.01 . 04	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		6300 Orang	587,343,113.00
2.17 . 2.17.01 . 04 . 01	Gerakan Gorontalo Gemar Membaca	Provinsi Gorontalo	300 Orang dan 1000	358,077,553.00
2.17 . 2.17.01 . 04 . 02	Pengembangan Kapasitas Perpustakaan	Kabupaten/Kota	6000 Eksamplar Buku/12	229,265,560.00
2.17 . 2.17.01 . 05	Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi		16875 Pemustaka	100,495,000.00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Kabupaten/Kota	40 Kali	100,495,000.00
2.17 . 2.17.01 . 08	Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan		30 Pengelola Teknis	106,072,500.00
2.17 . 2.17.01 . 08 . 02	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan	Provinsi Gorontalo	30 Orang	106,072,500.00
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		200 Orang	322,954,000.00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04	Sosialisasi/Penyuluhan Penyelamatan Arsip Vital	Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	171,384,000.00
2.18 . 2.17.01 . 18 . 06	Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Kearsipan Daerah Berbasis TIK	Luar Daerah	35 orang	151,570,000.00
2.18 . 2.17.01 . 19	Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan		100 Persen	92,890,000.00
2.18 . 2.17.01 . 19 . 02	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif	Provinsi Gorontalo	5 Dokumen JRA Substantif	92,890,000.00
TOTAL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				3,190,898,053.00

SKPD : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100 %	1,871,242,160.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	677,520,000.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	839,612,160.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, Kab /kota dan Luar	120 ASN	168,790,000.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi UPTD BPSMB	Provinsi Gorontalo	100 %	185,320,000.00
2.11 . 2.11.01 . 02	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		100 %	944,630,000.00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi, 6 Kab/Kota, Luar	1 Kegiatan	831,250,000.00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	113,380,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04	Program Pengembangan KUKM		1135 koperasi	540,900,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04 . 01	Sosialisasi Kredit Perbankan Bagi KUKM	Kabupaten/Kota	500 UMKM	150,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04 . 03	Peningkatan Penumbuhan Koperasi Baru	Kabupaten/Kota	50 Peserta	98,500,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04 . 04	Revitalisasi Koperasi	Kabupaten/Kota	6 Kab/Kota	97,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04 . 05	Pengembangan UPTD PLUT KUKM	Provinsi, Kabupate/Kota,	1 Kegiatan	195,400,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05	Program Pengembangan UMKM		68829 UMKM	625,670,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01	Pemdampingan Pos Daya Dan SHAT	Provinsi dan	1 Kegiatan	138,750,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 02	Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota	4 UMKM	155,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03	Update Data Base UMKM Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo,	1 Dokumen	100,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 04	UMKM Naik Kelas	Kab. Kota	6 Kab/Kota	231,920,000.00
2.11 . 2.11.01 . 13	Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan (DAK)		304 Pelaku UMKM	2,500,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 13 . 01	Peningkatan Kapasitas SDM UMKM (DAK)	Provinsi Gorontalo	6 Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 13 . 02	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi (DAK)	Provinsi Gorontalo	6 Kabupaten/Kota	1,500,000,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		90 %	300,120,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Provinsi, Kab/Kota	3 Kegiatan	300,120,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		13696 IKM	1,067,800,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09	Penumbuhan IKM	Provinsi Gorontalo	1 kegiatan	367,800,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 10	Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	13696 IKM - 312 Sentra	350,000,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 11	Pengembangan Industri Terpadu	Kab. Bone Bolango	1 Industri	350,000,000.00
3.06 . 2.11.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		240068 ton	172,100,000.00
3.06 . 2.11.01 . 17 . 13	Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah	Provinsi Gorontalo	2 Kegiatan	172,100,000.00
3.06 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		920612 Ton	2,749,650,000.00
3.06 . 2.11.01 . 18 . 08	Revitalisasi Pasar Tradisional	Provinsi Gorontalo	3 Pasar	1,273,400,000.00
3.06 . 2.11.01 . 18 . 10	Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Provinsi Gorontalo	100 %	1,476,250,000.00
3.06 . 2.11.01 . 20	Peningkatan Standarisasi Mutu Barang		250 kali	400,000,000.00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Provinsi Gorontalo	250 Kali	280,000,000.00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03	Bimtek dan Sosialisasi Standarisasi Mutu Barang	Provinsi Gorontalo	3 Kegiatan	120,000,000.00
TOTAL DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				11,172,112,160.00

SKPD : Dinas Perhubungan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.09 . 2.09.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100 %	1,988,952,750.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	503,197,750.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	1,293,805,000.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	Provinsi Gorontalo	13 Orang	191,950,000.00
2.09 . 2.09.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100 %	489,827,448.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Provinsi Gorontalo	12 Kali	421,455,000.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan		12 bulan	68,372,448.00
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan		100 %	1,098,940,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan, Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Dan Penguji Teladan	Provinsi Gorontalo	800 Siswa SLTA	118,325,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Pelayanan Angkutan Darat	Provinsi Gorontalo	5 Lintasan Perintis	980,615,000.00
2.09 . 2.09.01 . 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasana Perhubungan		1 Kapasitas Layanan	305,165,000.00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01	Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan		8 Kali	144,345,000.00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Forum Koordinasi Teknis Sektor Perhubungan Laut, Udara dan Kereta Api	Provinsi Gorontalo		160,820,000.00
2.09 . 2.09.01 . 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		100 %	1,076,876,000.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas LLAJ	Provinsi Gorontalo	17 TL, 4 WL	1,076,876,000.00
TOTAL DINAS PERHUBUNGAN				4,959,761,198.00

SKPD : Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.12 . 2.12.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100 %	3,178,428,451.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	973,647,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Peningkatan Kualitas SDM	Provinsi Gorontalo	165 Orang	260,210,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 %	1,773,571,451.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (BLK)	Provinsi Gorontalo	100 %	171,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi / Pelaporan		100 %	895,800,000.00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	8 Dokumen	768,850,000.00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	100 %	126,950,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1,180,727,500.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01	Pemagangan Berbasis Pengguna	Provinsi Gorontalo	27 Orang	176,585,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat	Kabupaten/Kota se-Provinsi	64 Orang	405,750,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03	Pembinaan Desa Produktif	5 Kabupaten	5 Desa	198,500,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo	15 LPKS	56,000,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 05	Sosialisasi Magang Luar Negeri (Jepang) dan Persiapan Rekrutmen	Kabupaten/Kota se-Provinsi	200 Orang	282,242,500.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 06	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Produktivitas	Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo	75 Orang	61,650,000.00
3.05 . 2.12.01 . 15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah			590,000,000.00
3.05 . 2.12.01 . 15 . 07	Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Provinsi Gorontalo	2 Sumur Bor	209,150,000.00
3.05 . 2.12.01 . 15 . 08	Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	100,000,000.00
3.05 . 2.12.01 . 15 . 09	Survey Pendahuluan Potensi Calon Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	Desa Ilangata & Desa Ibarat	4 Lokasi	140,000,000.00
3.05 . 2.12.01 . 15 . 11	Survey Konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) Gorontalo Tahap II	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	140,850,000.00
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		100 %	862,550,000.00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01	Promosi dan Kerjasama Investasi	Provinsi Gorontalo	3 Kegiatan	862,550,000.00
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		100 %	573,105,000.00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01	Penyelenggaraan PTSP	Provinsi Gorontalo	9 Orang	250,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	Pengendalian Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	4 Kali	323,105,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			155,075,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01	Sosialisasi Norma Kerja Perempuan dan Anak	Provinsi Gorontalo	30 Orang	76,700,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Provinsi Gorontalo	1080 perusahaan	78,375,000.00
3.05 . 2.12.01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan			1,358,375,000.00
3.05 . 2.12.01 . 17 . 04	Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Provinsi Gorontalo	1 lokasi	208,750,000.00
3.05 . 2.12.01 . 17 . 05	Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah	Provinsi Gorontalo	459 RTS	937,500,000.00
3.05 . 2.12.01 . 17 . 08	Konservasi Energi dan Pengembangan Bioenergi	Provinsi Gorontalo	1 gugus tugas	212,125,000.00
2.12 . 2.12.01 . 17	Program Pengembangan Sumber Daya Investasi		100 %	226,500,000.00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01	Penyusunan Regulasi Pro Investasi	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	150,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02	Pemutakhiran Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah	Provinsi Gorontalo	2 Kali	76,500,000.00
2.01 . 2.12.01 . 18	Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan produktifitas Daerah		100 %	630,250,000.00

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.01 . 2.12.01 . 18 . 01	Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Warga Transmigrasi	Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo	60 Orang	310,250,000.00
2.01 . 2.12.01 . 18 . 02	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja dan Pencari Kerja	UPTD Balai Latihan Kerja Latihan Transmigrasi Prov	80 Orang	320,000,000.00
3.05 . 2.12.01 . 18	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (DAK)			5,511,000,000.00
3.05 . 2.12.01 . 18 . 01	Pengembangan Energi Baru Terbarukan (DAK)	Provinsi Gorontalo	26 Unit	5,511,000,000.00
2.01 . 2.12.01 . 19	Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja			566,614,300.00
2.01 . 2.12.01 . 19 . 01	Pengelolaan Layanan Informasi Pasar Kerja	Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo	210 Orang	184,930,000.00
2.01 . 2.12.01 . 19 . 04	Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan	Provinsi Gorontalo	4 Kelompok	138,954,000.00
2.01 . 2.12.01 . 19 . 05	Temu Konsultasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten/Kota se-Provinsi	300 Orang	196,739,000.00
2.01 . 2.12.01 . 19 . 06	Monitoring dan Evaluasi Penempatan Tenaga Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Kabupaten/Kota se-Provinsi	6 Kab/Kota	45,991,300.00
2.01 . 2.12.01 . 20	Pengembangan Hubungan Industri dan Peningkatan Jaminan sosial Tenaga kerja		100 %	526,300,000.00
2.01 . 2.12.01 . 20 . 01	Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	327,100,000.00
2.01 . 2.12.01 . 20 . 02	Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial	Provinsi Gorontalo	50 Orang	199,200,000.00
3.08 . 2.12.01 . 22	Program Pembangunan Dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi			200,000,000.00
3.08 . 2.12.01 . 22 . 02	Pengembangan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi	3 (tiga) lokasi di 3 (tiga)	600 Orang	200,000,000.00
BADAN PENANAMAN MCDAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI				16,454,725,251.00

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.07 . 2.07.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur			1,403,271,713.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	6 Jasa Kantor yang	728,246,713.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	6 Paket	471,450,000.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi Gorontalo	12 Orang	55,795,000.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi TP-PKK		100 %	147,780,000.00
2.07 . 2.07.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			816,616,850.00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 01	Sistem Pengendalian, Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan	Provinsi Gorontalo	5 Dokumen, 3 Kegiatan	649,316,850.00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 02	Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Provinsi Gorontalo dan Luar	15 Dokumen	167,300,000.00
2.06 . 2.07.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			370,435,000.00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 17	Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas PMDDUKCAPIL	90 %	175,707,000.00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 18	Temu Teknis Pembersihan Data Kependudukan	Provinsi Gorontalo	140 Orang	106,705,000.00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 19	Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Provinsi Gorontalo	457 Orang	88,023,000.00
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			150,000,000.00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02	Penunjang Administrasi PNPM-GSC	Provinsi Gorontalo	2 Kegiatan	150,000,000.00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03	Rakor Penanggulangan Kemiskinan			0.00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06	Identifikasi dan Pelatihan Lembaga Ekonomi Masyarakat			0.00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07	Pengembangan dan Pemanfaatan Lembaga Ekonomi Lokal Desa			0.00
2.06 . 2.07.01 . 16	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)			1,596,949,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 01	Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Provinsi Gorontalo	120 Orang	563,487,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 02	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota (DAK)	Provinsi Gorontalo	52 Orang	335,970,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 03	Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota (DAK)	Provinsi Gorontalo	120 Orang	310,202,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 04	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)	Provinsi Gorontalo	50 Orang	145,490,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 05	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Provinsi Gorontalo	120 Orang	241,800,000.00
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			549,080,000.00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02	Lomba Desa/Kelurahan Tkt Prov. Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1 Desa & 1 Kelurahan	200,000,000.00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG	Provinsi Gorontalo	6 Kabupaten Kota	349,080,000.00
2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa			300,000,000.00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01	Pembinaan Kades, Lurah dan Camat	Provinsi Gorontalo	77 Camat dan 72 Lurah	150,000,000.00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02	Pelatihan Aparatur pemerintahan Desa	Provinsi Gorontalo	20 Orang Aparatur	150,000,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19	Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga			637,220,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02	Peningkatan Program Tertib Administrasi	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	382,570,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03	Pemberdayaan Sosial dan Keagamaan	Provinsi Gorontalo	75 Orang	76,275,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 04	Pembinaan Anak Remaja, Masyarakat dan Peningkatan Usaha Kesejahteraan Keluarga (UP2K)	Provinsi Gorontalo	75 Orang	50,850,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05	Pangan, Sandang dan Tata Laksana Rumah Tangga	Provinsi Gorontalo	75 Orang	50,850,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 06	Pemberdayaan Kader PKK dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Kegiatan	75 Orang	76,675,000.00
2.07 . 2.07.01 . 20	Program Pembangunan Desa Tertinggal			3,628,387,000.00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01	Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal	Provinsi Gorontalo	21 Unit	3,628,387,000.00
TOTAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				9,451,959,563.00

SKPD : Sekretariat DPRD

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.04 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur		1 Tahun	4,440,653,682.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	712,010,000.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	3,616,143,682.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	26 Pegawai	112,500,000.00
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi			200,000,000.00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	6 Laporan (LAKIP,RENJA,RENSTRA,LPP D.LKP)	75,000,000.00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	1 Laporan Keuangan	125,000,000.00
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo		1 Tahun	765,900,000.00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 10	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	765,900,000.00
4.01 . 4.01.04 . 30	Peningkatan Pelayanan Kehumasan			5,683,605,000.00
4.01 . 4.01.04 . 30 . 01	Pelayanan Umum Kehumasan	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	2,180,575,000.00
4.01 . 4.01.04 . 30 . 02	Pelayanan Protokol dan Aspirasi	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	3,503,030,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			35,732,164,136.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			8,139,400,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 02	Hearing/DIALOG dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama			496,040,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan			903,660,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 04	Rapat-rapat Paripurna			511,294,136.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 05	Kegiatan Reses			3,798,195,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			4,548,450,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			16,654,330,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			680,795,000.00
TOTAL SEKRETARIAT DPRD				46,822,322,818.00

SKPD : Inspektorat

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	10 = 6 + 7 + 8 + 9
	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur		8 Paket	1,503,150,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01		Provinsi Gorontalo	5 Paket	682,705,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Unit	358,370,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Luar Daerah	4 orang	462,075,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		10 Dokumen	194,974,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi	PROVINSI GORONTALO DAN	1 DOKUMEN	106,662,500.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 04	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja	Provinsi Gorontalo dan Luar Daerah	500 Dokumen SPJ	88,311,500.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan		30 SKPD	4,559,739,992.00
4.02 . 4.02.01 . 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Provinsi Gorontalo dan Luar Daerah	33 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	869,074,742.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	Pelaksanaan Pengawasan Berkala SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1 Laporan Hasil Reviu	641,429,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03	Peningkatan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Provinsi Gorontalo Dan Luar Daerah	33 Buah	287,500,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	5 Dokumen	614,815,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Provinsi Gorontalo dan Luar Daerah	24 Laporan	460,600,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06	Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional	Provinsi Gorontalo	6 LHP	224,424,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kabupaten Kota	Provinsi Gorontalo	1 Laporan Bimtek/50	234,180,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09	Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi	Pemerintah Daerah	6 LHE	221,525,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	18 LHP	321,516,250.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11	Pelaksanaan Pengawasan Program Strategis Pemda	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	114,396,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Provinsi Gorontalo dan Luar Daerah	3 Laporan	570,370,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13	Pencegahan Korupsi		100 %	125,465,000.00
4.02 . 4.02.01 . 16	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Provinsi Gorontalo	1 dokumen	125,465,000.00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			6,383,328,992.00
TOTAL INSPEKTORAT				

SKPD : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
			100 %	1,076,017,000.00
1.05 . 4.01.09 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		50 Orang	1,047,612,000.00
1.05 . 4.01.09 . 15 . 01	Pemberdayaan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Provinsi Gorontalo	50 Orang	28,405,000.00
1.05 . 4.01.09 . 15 . 11	Pembinaan Potensi Masyarakat		100 %	110,800,000.00
1.05 . 4.01.09 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		4 Laporan	44,910,000.00
1.05 . 4.01.09 . 20 . 09	Operasi Terpadu, Operasi Yustisi dan Operasi Non Yustisi	Provinsi Gorontalo	12 Laporan	65,890,000.00
1.05 . 4.01.09 . 20 . 10	Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Penegakan Perda dan Perkada	Provinsi Gorontalo	100 %	104,995,000.00
1.05 . 4.01.09 . 25	Program Perlindungan Masyarakat		50 Orang	21,810,000.00
1.05 . 4.01.09 . 25 . 01	Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAK DAMKAR)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	83,185,000.00
1.05 . 4.01.09 . 25 . 02	Peringatan Dini/Deteksi Dini	Provinsi Gorontalo	100 %	3,391,937,000.00
1.05 . 4.01.09 . 26	Program Pemantapan Tugas-tugas Operasional dalam mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan serta Ketertiban Umum		12 Bulan	3,353,032,000.00
1.05 . 4.01.09 . 26 . 01	Pemantapan Ketertiban Umum dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Gorontalo	800 Orang	38,905,000.00
1.05 . 4.01.09 . 26 . 03	Koordinasi Pemantapan Sistem Operasional	Provinsi Gorontalo	100 %	135,742,000.00
1.05 . 4.01.09 . 27	Program Peningkatan Kinerja PPNS		50 Orang	135,742,000.00
1.05 . 4.01.09 . 27 . 01	Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS	Provinsi Gorontalo	100 %	564,214,073.00
1.05 . 4.01.09 . 28	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		12 Bulan	63,884,073.00
1.05 . 4.01.09 . 28 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	432,548,000.00
1.05 . 4.01.09 . 28 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo dan	5 Orang	67,782,000.00
1.05 . 4.01.09 . 28 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		100 %	90,668,500.00
1.05 . 4.01.09 . 29	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		12 Bulan	90,668,500.00
1.05 . 4.01.09 . 29 . 03	Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo		
TOTAL DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, LINMAS DAN KEBAKARAN				5,474,373,573.00

SKPD : Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur			2,368,189,100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	784,664,100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	1,028,925,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Provinsi Gorontalo	6 Diklat Tekhnis, 4 Diklat Kependidikan/Keuangan	126,800,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit I dan II Gorontalo Barat)			71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit III Pohuwato)			71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit IV Gorontalo Utara)			71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit V Boalemo)			71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit VI Gorontalo)			71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)			71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			878,198,768.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	7 Dokumen	761,373,768.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	2 Laporan	116,825,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			595,463,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir	Kab. Gorontalo Utara	100 orang masyarakat dan	138,500,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03	Pembinaan dan Penilaian Program Adipura	Provinsi Gorontalo	6 Kota seProvinsi	124,033,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 06	Penyusunan Dokumen RPPLH Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	242,360,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 07	Penyusunan Laporan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Pohuwato	1 Kabupaten	90,570,000.00
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Data Dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup			338,288,000.00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Data SLHD, SPM, IKLH	Provinsi Gorontalo	6 Kabupaten/Kota	167,163,000.00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 05	Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air, Sungai dan Udara Ambien)	Provinsi Gorontalo	24 15 titik pantau air	171,125,000.00
2.05 . 2.05.01 . 06	Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan			154,130,000.00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Pada Kegiatan Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan Lingkungan	Provinsi Gorontalo	26 pelaku usaha	154,130,000.00
2.05 . 2.05.01 . 10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			476,167,500.00
2.05 . 2.05.01 . 10 . 03	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program 3R dan Bank Sampah	2 Kabupaten Di Provinsi	2 Kabupaten	126,640,000.00
2.05 . 2.05.01 . 10 . 04	Pembinaan Model Sekolah Adiwiyata	Provinsi Gorontalo	24 Sekolah	161,597,500.00
2.05 . 2.05.01 . 10 . 08	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Gorontalo 2018 - 2022	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	187,930,000.00
3.04 . 2.05.01 . 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan			1,010,777,900.00
3.04 . 2.05.01 . 15 . 10	Bina Usaha Perhutanan Sosial	Desa Batu Loreng	1 kelompok (40 Orang)	315,415,000.00
3.04 . 2.05.01 . 15 . 11	Penatausahaan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan	Provinsi Gorontalo	30 Unit Izin Usaha	107,500,000.00
3.04 . 2.05.01 . 15 . 12	Pemolaan Kawasan Hutan	Provinsi Gorontalo	15 Dokumen Peta Spasial	148,410,000.00
3.04 . 2.05.01 . 15 . 14	Bina Usaha Perhutanan Sosial	Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango	2 Kelompok	192,802,000.00
3.04 . 2.05.01 . 15 . 16	Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan	5 (Lima) Kabupaten	5 Peta Spasial	160,360,900.00
3.04 . 2.05.01 . 15 . 17	Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan (IPHHK/IPHHBK/IUIPHHK/Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan)	Provinsi Gorontalo	20 IPHHK-IPKR dan 50 IPHHK	86,290,000.00
3.04 . 2.05.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan			1,567,792,000.00
3.04 . 2.05.01 . 16 . 07	Pengendalian Kebakaran Hutan	5 Kabupaten	22 Titik Api (Hotspot)	94,245,000.00

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.04 . 2.05.01 . 16 . 08	Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kec. Telaga & Telaga Biru Kab. Gorontalo	25696 Batang	222,500,000.00
3.04 . 2.05.01 . 16 . 11	Pelaksanaan Forum DAS dan POKJA Mangrove di Provinsi Gorontalo	Kec. Duhiadaa dan Kec. Popayato Kab. Pohuwato	1 Unit	65,640,000.00
3.04 . 2.05.01 . 16 . 12	Pengamanan Hutan	5 Kabupaten	10 %	216,507,000.00
3.04 . 2.05.01 . 16 . 13	Pembuatan Hutan Manunggal	Kec. Limboto dan Kec. Batudaa Kab. Gorontalo	120 Ha	413,360,000.00
3.04 . 2.05.01 . 16 . 14	Pembuatan Areal Model Usaha Tani Konservasi	Kec. Pulubala Kab. Gorontalo	150 Ha	450,000,000.00
3.04 . 2.05.01 . 16 . 16	Penyiapan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kabupaten Gorontalo	1 Dokumen	105,540,000.00
TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				7,389,006,268.00

SKPD : Dinas Pangan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.03 . 2.03.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur		12 Jumlah layanan administrasi dan perkantoran	785,377,837.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	346,817,837.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	338,560,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	Provinsi Gorontalo	5 kali	100,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi		5 Jumlah dokumen rencana program anggaran dan evaluasi (dokumen)	334,638,816.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	234,638,816.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan			100,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 15	Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		5 Tersusunnya Laporan Analisis dan kajian ketersediaan pangan, ketersediaan pangan daerah, neraca bahan makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	712,100,000.00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01	Pengembangan Ketersediaan Pangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	712,100,000.00
2.03 . 2.03.01 . 16	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan		6 Tersedianya data dan	973,601,184.00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01	Pengembangan Distribusi Pangan	Provinsi Gorontalo	6 Kabupaten/Kota	973,601,184.00
2.03 . 2.03.01 . 17	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		5 Jumlah Kawasan Rumah	765,300,000.00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal		12 Desa	445,467,000.00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02	Analisis Konsumsi Pangan		75 Desa	148,490,000.00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03	Penanganan Keamanan Pangan Segar		12 Sekolah	171,343,000.00
TOTAL DINAS PANGAN				3,571,017,837.00

SKPD : Dinas Pariwisata

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.02 . 3.02.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100 Presentase layanan jasa adminisitrasi perkantoran	1,211,661,500.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	250,605,000.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	100 persen (3 kegiatan)	872,556,500.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi Gorontalo	5 orang	88,500,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			368,723,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	15 Kali	285,465,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	83,258,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata		120000 Wisatawan mancanegara 2500 orang, wisatawan domestik 117500	2,031,152,066.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01	Penyiapan Strategi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Gorontalo	1 Logo Pariwisata Gorontalo	444,245,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Promosi Potensi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Gorontalo	5 event	1,121,610,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	465,297,066.00
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		9 Obyek wisata	1,500,565,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01	Perencanaan Obyek Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Gorontalo	1 kali pelaksanaan Bimtek	78,935,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Pembinaan Industri Jasa Pariwisata	Provinsi Gorontalo	1 kali Pelaksanaan Gorontalo Travel Mart	216,745,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pengembangan Industri Kreatif	Provinsi Gorontalo	1 Kali pelaksanaan Workshop	211,265,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04	Pengembangan Hubungan Kelembagaan Pariwisata	Provinsi Gorontalo	1 Kali Pelaksanaan Seminar Internasional	294,345,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Obyek Wisata dan Sinergitas Stakeholder Pariwisata	Provinsi Gorontalo	1 Kali Pelaksanaan Bimtek	70,395,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Penataan Obyek Wisata Prov. Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1 Unit	628,880,000.00
3.02 . 3.02.01 . 17	Program Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah			1,078,170,000.00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10	Pelestarian Nilai Budaya Seni Daerah Gorontalo	Provinsi Gorontalo	7 Kegiatan	1,078,170,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (DAK)		3 obyek wisata unggulan	3,900,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20 . 01	Penataan Amenitas Pariwisata (DAK)	Provinsi Gorontalo	100 %	1,500,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20 . 02	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	Provinsi Gorontalo		2,400,000,000.00
TOTAL DINAS PARIWISATA				10,090,271,566.00

SKPD : Dinas Perikanan dan Kelautan

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.01 . 3.01.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100 %	5,155,384,070.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	1,374,644,360.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi Gorontalo	23 Paket	956,515,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi Gorontalo	4 Kegiatan Diklat	217,050,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPPMHP)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	218,183,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPPMHP)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	222,573,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	438,930,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-TMB)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	146,039,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT)	UPTD BPBIAT	12 Bulan	439,190,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT)	UPTD BPBIAT	12 Bulan	116,970,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBIP)	UPTD BBIP	12 Bulan	354,580,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BBIP)	UPTD BBIP	12 Bulan	670,709,710.00
3.01 . 3.01.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		15 Dokumen Utama	978,047,500.00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	3 Kegiatan	849,487,500.00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	12 Bulan	128,560,000.00
3.01 . 3.01.01 . 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		19 Desa	2,083,500,000.00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 01	Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)	Desa Pesisir	19 Kali atau 19 Desa	211,000,000.00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 02	Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	233,100,000.00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03	Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Wilayah Pesisir Bagian	1 Dokumen	1,639,400,000.00
3.01 . 3.01.01 . 16	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan		82.23 %	333,270,000.00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 01	Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan	Provinsi Gorontalo	2 Kapal Pengawas	89,120,000.00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02	Pelayanan Adminstrasi P2SDKP Kapal Pengawas Perikanan	Provinsi Gorontalo	2 Kapal Pegawai	244,150,000.00
3.01 . 3.01.01 . 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		205319 Ton	3,756,414,100.00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01	Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payau	6 Kabupaten / Kota	1 Paket	1,543,512,750.00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	6 Kabupaten / Kota	8 Unit	1,142,439,750.00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut	6 (enam) Kab./Kota	8 Paket (2 Lokasi)	1,070,461,600.00
3.01 . 3.01.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		126036 Ton	6,273,855,000.00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	6 Kabupaten / Kota	1 Dokumen	5,688,590,000.00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 03	Peningkatan Keterampilan Dan pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	6 (enam) Kab./Kota	30 Orang	585,265,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan		7080 Ton	2,611,150,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 01	Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	6 Kabupaten / Kota	25 UKM Pengolahan/UPI	115,960,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02	Penguatan Sistem Informasi Pasar	6 Kabupaten / Kota	1 Tahun	93,150,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03	Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)	6 Kabupaten / Kota	3 Kegiatan	1,932,600,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 04	Pengembangan Peluang Usaha dan Investasi Pasca Panen	Pelaku Usaha Non	1 Kegiatan	469,440,000.00
3.01 . 3.01.01 . 25	Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan		100 Data Uji	194,220,000.00
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01	Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	194,220,000.00
3.01 . 3.01.01 . 26	Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis		2000000 Ekor	394,885,000.00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01	Pengembangan Calon Induk dan Benih Ikan Unggul (UPTD BPBIAT)	UPTD BPBIAT	12 Bulan	39,115,000.00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 03	Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD-BBILP)	UPTD BBIP	12 Bulan	355,770,000.00
3.01 . 3.01.01 . 27	Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan		12 Bulan	669,950,000.00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01	Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)	6 (enam) Kab./Kota	12 Bulan	669,950,000.00

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.01 . 3.01.01 . 29 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)		12 Bulan	16,825,000,000.00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-BPBIAT (DAK)	Provinsi Gorontalo	7 Paket	2,501,408,300.00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-BPBILP (DAK)			5,146,134,700.00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)		10 Paket	9,177,457,000.00
TOTAL DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN				39,275,675,670.00

SKPD : Dinas Pertanian

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.03 . 3.03.01 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100 %	6,739,078,537.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	1,672,538,250.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPSBTPH)	Provinsi Gorontalo	1 Thn	482,700,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BTPH)	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	515,500,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBTPH)	Provinsi Gorontalo	1 Thn	463,425,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Balai Perbibitan Ternak)	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	306,104,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan)	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	148,012,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian)	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	232,626,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Provinsi	8 Pkt	2,398,289,068.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	Provinsi Gorontalo	10 Orang	519,884,219.00
3.03 . 3.03.01 . 02	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		13 Dok	2,175,537,500.00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Gorontalo	1 Dok	1,001,705,000.00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	2 Dokumen	150,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 05	Penyusunan Data Statistik dan Sistem Informasi Pertanian	Provinsi Gorontalo	4 Dokumen	1,023,832,500.00
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		100 %	23,117,155,400.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Buah dan Tanaman Hias	Provinsi Gorontalo	3000 pohon	687,950,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Provinsi Gorontalo	1300 Ha	3,459,030,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Provinsi Gorontalo	10000 Kg	445,460,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sayuran dan Biofarmaka	Provinsi Gorontalo	100 ha	1,162,211,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19	Pengembangan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan	Provinsi Gorontalo	2000 kg	585,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20	Pengembangan Benih/Bibit Unggul Hortikultura	Provinsi Gorontalo	20 Kg	313,586,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 21	Pengembangan Sistem Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Provinsi Gorontalo	1 Tahun	617,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 22	Pengembangan Sistem Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Provinsi Gorontalo	1 tahun	300,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 23	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Provinsi Gorontalo	6 Kabkota	530,500,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Hortikultura	Provinsi Gorontalo	6 Kab/kota	258,140,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 27	Pengembangan Bibit Ternak	Provinsi Gorontalo	6 Kab/Kota	8,792,232,500.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 28	Pengembangan Kawasan Ternak	Provinsi Gorontalo	30 Ekor	754,860,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pakan	Provinsi Gorontalo	1 Kali	477,945,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	Provinsi Gorontalo	1 Kali	510,700,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31	Diagnosa dan penyidikan secara cepat, tepat dan akurat terhadap gejala penyakit hewan menular	Provinsi Gorontalo	30 Botol	178,390,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 32	Peningkatan produksi, produktivitas tanaman semusim dan rempah	Provinsi Gorontalo	1 Kali	481,520,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 33	Peningkatan produksi, produktivitas tanaman tahunan dan penyegar	Provinsi Gorontalo	1 Kali	645,110,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 34	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Provinsi Gorontalo	2 Kali	170,835,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	Provinsi Gorontalo	10000 Benih	252,080,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 36	Pengembangan Bibit Ternak Ruminansia	Provinsi Gorontalo	12 Buah	1,200,619,900.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 37	Pengembangan Bibit Ternak Non Ruminansia	Provinsi Gorontalo	1000 Ekor	1,293,986,000.00
3.03 . 3.03.01 . 34	Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan		1617 Orang	385,127,000.00
3.03 . 3.03.01 . 34 . 01	Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan bagi Pendampingan Penyuluh PPK	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	385,127,000.00
3.03 . 3.03.01 . 35	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		144 Kelompok	640,190,000.00
3.03 . 3.03.01 . 35 . 02	Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK	Provinsi gorontalo	144 Kelompok	640,190,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36	Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		222 Orang	875,300,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01	Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	421,000,000.00

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.03 . 3.03.01 . 36	Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		222 Orang	875,300,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01	Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	421,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 02	Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK	Provinsi Gorontalo	182 Orang	454,300,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43	Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan		85 %	213,550,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43 . 01	Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH	Provinsi Gorontalo	1 Kali	114,195,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43 . 02	Diagnosa dan Penyidikan secara Cepat, Tepat dan Akurat terhadap Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur)	Provinsi Gorontalo	100 Sampel	99,355,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian		100 %	2,444,185,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 01	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Gorontalo	5 Kab	866,820,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 02	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Provinsi Gorontalo	2 unit	1,245,675,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 03	Peningkatan Pengolahan dan Nilai Tambah Hasil Produksi Peternakan	Provinsi Gorontalo	1 Kali	167,585,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 04	Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	Provinsi Gorontalo	1 Kali	164,105,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		100 %	3,841,999,500.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 01	Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi dan Alsintan	Provinsi Gorontalo	42 org	3,075,758,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 02	Pengelolaan Lahan dan Air	Provinsi Gorontalo	1 keg	572,800,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 03	Pengembangan Usaha Investasi dan Pembiayaan	Provinsi Gorontalo	1 kali	193,441,500.00
3.03 . 3.03.01 . 57	Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian serta Penyediaan Sarana		100 %	5,375,043,000.00
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01	Pembangunan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Provinsi Gorontalo	5 Paket	5,375,043,000.00
TOTAL DINAS PERTANIAN				45,807,165,937.00

Pt. GUBERNUR GORONTALO



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.03 . 3.03.01 . 36	Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		222 Orang	875,300,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01	Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	421,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 02	Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK	Provinsi Gorontalo	182 Orang	454,300,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43	Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan		85 %	213,550,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43 . 01	Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH	Provinsi Gorontalo	1 Kali	114,195,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43 . 02	Diagnosa dan Penyidikan secara Cepat, Tepat dan Akurat terhadap Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur)	Provinsi Gorontalo	100 Sampel	99,355,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian		100 %	2,444,185,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 01	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Gorontalo	5 Kab	866,820,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 02	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Provinsi Gorontalo	2 unit	1,245,675,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 03	Peningkatan Pengolahan dan Nilai Tambah Hasil Produksi Peternakan	Provinsi Gorontalo	1 Kali	167,585,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 04	Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	Provinsi Gorontalo	1 Kali	164,105,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		100 %	3,841,999,500.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 01	Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi dan Alsintan	Provinsi Gorontalo	42 org	3,075,758,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 02	Pengelolaan Lahan dan Air	Provinsi Gorontalo	1 keg	572,800,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 03	Pengembangan Usaha Investasi dan Pembiayaan	Provinsi Gorontalo	1 kali	193,441,500.00
3.03 . 3.03.01 . 57	Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian serta Penyediaan Sarana		100 %	5,375,043,000.00
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01	Pembangunan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Provinsi Gorontalo	5 Paket	5,375,043,000.00
TOTAL DINAS PERTANIAN				45,807,165,937.00

Pt. GUBERNUR GORONTALO



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.03 . 3.03.01 . 36	Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Provinsi Gorontalo	222 orang	875,300,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01	Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK	Provinsi Gorontalo	1 dokumen	421,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 02	Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK	Provinsi Gorontalo	182 orang	454,300,00.00
3.03 . 3.03.01 . 43	Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan		85 %	213,550,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43 . 01	Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH	Provinsi Gorontalo	1 Kali	114,195,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43 . 02	Diagnosa dan Penyidikan secara Cepat, Tepat dan Akurat terhadap Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur)	Provinsi Gorontalo	100 Sampel	99,355,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian		100 %	2,444,185,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 01	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Gorontalo	5 Kab	866,820,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 02	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Provinsi Gorontalo	2 unit	1,245,675,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 03	Peningkatan Pengolahan dan Nilai Tambah Hasil Produksi Peternakan	Provinsi Gorontalo	1 Kali	167,585,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 04	Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	Provinsi Gorontalo	1 Kali	164,105,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		100 %	3,841,999,500.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 01	Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi dan Alsintan	Provinsi Gorontalo	42 org	3,075,758,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 02	Pengelolaan Lahan dan Air	Provinsi Gorontalo	1 keg	572,800,000.00
3.03 . 3.03.01 . 51 . 03	Pengembangan Usaha Investasi dan Pembiayaan	Provinsi Gorontalo	1 kali	193,441,500.00
3.03 . 3.03.01 . 57	Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukung		100 %	5,375,043,000.00
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01	Pembangunan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Provinsi Gorontalo	5 Paket	5,375,043,000.00
TOTAL DINAS PERTANIAN				45,807,165,937.00

Plt. Gubernur Gorontalo



ZUDAN ARIF FAKRULLOH